

**TESIS**

**PENGARUH FAKTOR ORGANISASIONAL, INDIVIDUAL DAN  
SOSIAL TERHADAP PENERIMAAN STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN  
KEUANGAN DAERAH DENGAN MELALUI PERSEPSI  
KEMUDAHAN DAN PERSEPSI MANFAAT  
(Studi Empiris Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Propinsi  
Jawa Timur)**

**IRA INDRIYANTI  
N.I.M. 090610303L**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2009**

**PENGARUH FAKTOR ORGANISASIONAL, INDIVIDUAL DAN  
SOSIAL TERHADAP PENERIMAAN STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN  
KEUANGAN DAERAH DENGAN MELALUI PERSEPSI  
KEMUDAHAN DAN PERSEPSI MANFAAT  
(Studi Empiris Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Propinsi  
Jawa Timur)**

**TESIS**

Untuk memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Studi Magister Akuntansi  
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga

**Oleh:**

**IRA INDRIYANTI  
N.I.M. 090610303L**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2009**

..embar pengesahan

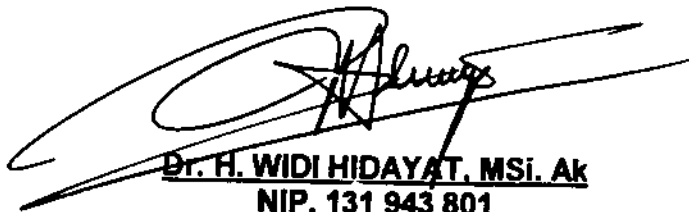
TESIS INI TELAH DISETUJUI  
Tanggal ..3../..2../2009

Oleh  
Pembimbing Ketua



**Dra. ISNALITA, MSi. Ak**  
**NIP. 131 943 801**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Akuntansi



**Dr. H. WIDI HIDAYAT, MSi. Ak**  
**NIP. 131 943 801**

Telah diuji pada  
Tanggal.....

**PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua** :  
**Anggota** : 1.  
2.  
3.  
4.  
5.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Mulailah segala aktifitas kita dengan **basmallah, Bismillahirrohmanirrohim**. Dengan mengucapkan ucapan ini, kita bukan sekedar mengharapkan 'berkah', tetapi juga menghayati maknanya, sehingga dapat melahirkan sikap dan karya yang positif (M. Quraish Shihab). Alhamdulillah, atas pertolongan, kehendak, dan cahaya Allah SWT, penelitian dengan judul **“PENGARUH FAKTOR ORGANISASIONAL, INDIVIDUAL DAN SOSIAL TERHADAP PENERIMAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DENGAN MELALUI PERSEPSI KEMUDAHAN DAN PERSEPSI MANFAAT (Studi Empiris Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur)”** ini dapat terselesaikan. Selain itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Isnalita M.Si., A.k., selaku Dosen Pembimbing, yang dalam kesibukannya masih menyempatkan waktu dan tenaga untuk berkenan membimbing dalam penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. H. Widi Hidayat, M.Si. Ak., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Airlangga
3. Seluruh Dosen Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi Sektor Publik Universitas Airlangga atas ilmu bermanfaatnya
4. Seluruh staf Sekretariat Maksi, yang banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa program studi magister akuntansi sektor publik Universitas Airlangga Surabaya.

5. Bapak Dr. Edi Purwinarto, M.Si, yang memberikan dukungan kepada penulis untuk menempuh studi ini.
6. Bapak Drs. Soekarjono, M.Si, Drs.Gatot Edy, SH.MM, dan Drs. Imam Kiswoto, yang banyak membantu dan memberikan kesempatan waktu kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
7. Bapak Oesodo SH,MM dan Ibu Erlijana SE, M.Si, yang mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data.
8. Ibu Margaretha Sari SH,MSi dan kel, yang banyak memberikan masukan dan informasi dalam studi ini.
9. Suamiku tercinta, Dwi Bakti Nurwicaksono dan anandaku tersayang, Nadia Nasywa Kamilah (Naya), yang memberikan semangat dan rela berbagi waktu dalam menyelesaikan studi ini.
10. Ayahanda dan Ibunda, terima kasih atas doa dan restunya yang membuat penulis mampu menyelesaikan studi ini.
11. Adik-adikku tersayang, Rony, Devi, *especially* adik Rudy *"thank you for everything"*.
12. *Friends of Rudy* : Dik Laila, mbak Weni, Arya, Dedi.
13. Rekan-rekan akuntansi sektor publik angkatan 06, semoga masa-masa indah kuliah akan menjadi kenangan terindah yang tak terlupakan.
14. Rekan-rekan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Propinsi Jawa Timur *especially ex* Subdin Penyusunan Program.
15. Para responden yang telah bersedia mengisi kuisioner dan membantu dalam penelitian ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan beribu-ribu kali lipat kebaikan.

Akhirnya, penulis berharap tesis ini akan bermanfaat bagi semua pihak terutama Pemerintah Propinsi Jawa Timur, serta bagi para peneliti untuk menambah khasanah pengetahuan dan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya. Sesungguhnya manusia adalah tempat segala kesalahan, dan kesempurnaan yang hakiki hanya milik Allah SWT. Terima kasih.

Surabaya, Februari 2009

Penulis

## RINGKASAN

### **PENGARUH FAKTOR ORGANISASIONAL, INDIVIDUAL DAN SOSIAL TERHADAP PENERIMAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DENGAN MELALUI PERSEPSI KEMUDAHAN DAN PERSEPSI MANFAAT (Studi Empiris Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur)**

Dalam rangka meningkatkan *good governance*, pemerintah Indonesia tengah melakukan reformasi dalam pengelolaan keuangan Negara, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Beragam upaya telah ditempuh, antara lain dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk penatausahaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Implementasi standar akuntansi pemerintahan masih relatif baru dalam pemerintahan di Indonesia, sehingga perlu dilakukan kajian evaluasi terhadap implementasinya di lapangan. Penelitian ini bertujuan menguji faktor organisasional, individual, dan lingkungan sosial tempat kerja terhadap penerimaan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan di SKPD Pemprop Jawa Timur.

Dalam penelitian ini dikembangkan model konseptual yang menempatkan variabel kemudahan dan manfaat penggunaan SAP sebagai mediasi pengaruh variabel organisasional, individual, dan lingkungan sosial terhadap penerimaan SAP oleh pegawai. Faktor organisasional diukur dari dimensi pelatihan, dukungan teknis, dan komitmen implementasi atau sosialisasi. Faktor individual dioperasional dengan dua variable, yaitu pengalaman pegawai dalam tugas penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan dan komitmen pegawai atas penggunaan SAP. Adapun faktor lingkungan sosial diwakili oleh pengaruh pimpinan unit kerja yang menjadi atasan langsung pegawai.

Sampel penelitian menggunakan 102 pegawai di Bagian Keuangan di 37 SKPD di Pemprop Jawa Timur. Untuk pengumpulan data digunakan kuesioner dan analisis data untuk menguji hipotesis digunakan analisis jalur.

Hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa ada tiga jalur dari 11 jalur model yang dimodifikasi yang tidak signifikan. Faktor organisasional, pengalaman sebelumnya, dan komitmen pengguna terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi kemudahan penggunaan SAP, dimana faktor organisasional memiliki pengaruh terbesar. Komitmen pengguna dan persepsi kemudahan terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi manfaat penggunaan SAP untuk penyusunan laporan keuangan daerah, dimana komitmen pengguna memiliki pengaruh terbesar. Selanjutnya, persepsi kemudahan dan manfaat penggunaan terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan SAP oleh pegawai. Adapun tiga jalur yang tidak signifikan adalah pengaruh faktor organisasional, pengalaman sebelumnya dan pengaruh pimpinan unit kerja terhadap persepsi manfaat. Pengaruh pimpinan unit kerja tidak berpengaruh langsung terhadap manfaat, akan tetapi dari pengujian model yang dimodifikasi disimpulkan berpengaruh langsung terhadap penerimaan SAP oleh pegawai.



## SUMMARY

### **The Influence of Organizational, Individual, and Social Factors on Acceptance of Government Accounting Standard for Local Government Financial Statement Report that mediated by Perceived Ease of Use and Perceived Usefulness (Empirical Study at SKPD of The East Java Province)**

In order to increase good governance, Indonesia government is doing reformation in the management of Country finances included the management of local area finances. Many efforts have been done, such as the prevailing of Government Accounting Standard for management and report of local government finances. Implementation of government accountancy standard is still new relative in the government of Indonesia, thereby it must be held the evaluation review on the implementation in the field. This research is purposed to analyzes the organizational, individual and social environment of work place toward acceptance of Government Accounting Standard in SKPD East Java Province Government.

In this research was developed the conceptual model that place the easiness variable and usefulness of SAP using as mediation of variable influences of organizational, individual, and social environment on SAP accepting by the employee. Organizational factor was measured from training dimension, technical support, and commitment of implementation or socialization. Individual factor was operationalized with two variables, namely the government experience in the task of management and arrangement of financial report and employee's commitment for SAP using. Where the factor of social environment was represented by the influence of work unit leader who become the direct supervisor of employee.

The research sample used 102 employees of Finances Division in 37 SKPD in East Java Province. In order to collect data used questionnaire and the data analysis to test hypothesis was path analysis.

The hypothesis analyze result indicated that there were three lines from 11 lines of modified model that were not significant. Organizational factor, previous experience, and commitment of user was proved have significant positive influence on easiness perception of SAP using, where the organizational factor has biggest influence. The commitment of user and easiness perception was proven has significant positive influence on usefulness perception of SAP using to arrange the local area finance, while user's commitment has biggest influence. Further, the easiness perception and using usefulness was proved has significant positive influence on SAP accepting by the employees. Where the three of lines that not significant were organizational factor influence, previous experience and the influence of work unit leader on usefulness perception. The influence of work unit leader did not have direct influence on usefulness, but from modified model analysis can draw the conclusion that it has direct influence on SAP accepting by employees.

## ABSTRACT

### **The Influence of Organizational, Individual, and Social Factors on Acceptance of Government Accounting Standard for Local Government Financial Statement Report that mediated by Perceived Ease of Use and Perceived Usefulness (Empirical Study at SKPD of The East Java Province)**

This research attempt to analyze the effect of organizational, individual and social environment of work place toward receiving of Government Accounting Standard in SKPD East Java Province Government.

Design research was developed the conceptual model that place the easiness variable and usefulness of SAP using as mediation of variable influences of organizational, individual, and social environment on SAP accepting by the employee. The research sample used 102 employees of Finances Division in 37 SKPD in East Java Province. In order to collect data used questionnaire and the data analysis to test hypothesis was path analysis.

The hypothesis analyze result indicated that there were three lines from 11 lines of modified model that were not significant. Organizational factor, previous experience, and commitment of user was proved have significant positive influence on easiness perception of SAP using, where the organizational factor has biggest influence. The commitment of user and easiness perception was proved has significant positive influence on usefulness perception of SAP using to arrange the local area finance, while user's commitment has biggest influence. Further, the easiness perception and using usefulness was proved has significant positive influence on SAP accepting by the employees. Where the three of lines that not significant were organizational factor influence, previous experience and the influence of work unit leader on usefulness perception. The influence of work unit leader did not have direct influence on usefulness, but from modified model analysis can draw the conclusion that it has direct influence on SAP accepting by employees.

**Key word: Organizational, Individual, Social, Government Accounting Standard.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan .....	i
Sampul Dalam .....	ii
Prasyarat Gelar .....	iii
Persetujuan .....	iv
Ucapan terima kasih .....	v
Ringkasan .....	viii
<i>Summary</i> .....	ix
<i>Abstract</i> .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	13
1.3. Tujuan Penelitian .....	14
1.4. Manfaat Penelitian .....	16
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	17
2.1. Penelitian Terdahulu .....	17
2.2. Landasan Teori .....	20
2.2.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	20
2.2.2. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).....	21
2.2.3. Standar Akuntansi Pemerintah sebagai Inovasi .....	27
2.2.4. Model Penerimaan Inovasi oleh Individu dalam Organisasi .....	28
2.2.4.1. Teori Tindakan Beralasan ( <i>Theory of Reasoned                         Action</i> ) .....	30
2.2.4.2. Teori Model Penerimaan Teknologi ( <i>Technology Acceptance Model</i> ) .....	31
2.2.4.3. Teori Pengaruh Sosial Kelman .....	33
2.2.4.4. Teori Penerimaan Inovasi oleh Individu dalam Organisasi ( <i>Individual Innovation                         Acceptance in Organizations</i> ) .....	36
2.2.4.4.1. Faktor Organisasional .....	37
2.2.4.4.2. Faktor Karakteristik Personal .....	42
2.2.4.4.3. Faktor Lingkungan Sosial .....	43
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS .....	46
3.1. Kerangka Konseptual .....	46
3.2. Hipotesis .....	51

BAB 4 METODE PENELITIAN.....	53
4.1. Rancangan Penelitian .....	53
4.2. Identifikasi Variabel .....	54
4.3. Definisi Operasional Variabel .....	54
4.4. Jenis dan Sumber Data .....	59
4.5. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel .....	60
4.6. Metode Pengumpulan Data .....	61
4.7. Teknik Analisis Data .....	61
BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	63
5.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	63
5.1.1. Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi .....	63
5.1.2. Karakteristik Responden .....	66
5.2. Validitas dan Reliabilitas .....	68
5.3. Deskripsi Variabel Penelitian .....	73
5.4. Analisis Model dan Uji Hipotesis .....	79
5.4.1. Asumsi Normalitas .....	79
5.4.2. Asumsi Linieritas .....	80
5.4.3. Pengujian Multikolinieritas .....	81
5.4.4. Analisis Jalur .....	81
5.4.4.1. Pengujian Hipotesis .....	84
5.4.4.2. Analisis Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total .....	89
BAB 6 PEMBAHASAN.....	92
6.1. Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Manfaat terhadap Penerimaan SAP .....	92
6.2. Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Proses Penerimaan SAP .....	95
6.2.1. Pengaruh Faktor Organisasional ( <i>Internal Marketing</i> ) .....	95
6.2.2. Pengaruh Pengalaman Sebelumnya .....	98
6.2.3. Pengaruh Komitmen Pengguna .....	100
6.2.4. Pengaruh Pimpinan Unit Kerja .....	102
6.3. Implikasi, Keterbatasan dan Arah Penelitian Selanjutnya .....	103
BAB 7 SIMPULAN DAN SARAN .....	106
7.1. Simpulan .....	106
7.2. Saran-saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1. Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan Manajemen Pemerintahan .....	2
Tabel 2.1. Daftar PSAP sesuai PP 24/2005 .....	22
Tabel 2.2. Perbedaan Jenis LKPD menurut Kepmendagri 29/2002 dan PP 24/2005 .....	23
Tabel 2.3. Perbedaan Kebijakan Akuntansi Kepmendagri 29/2002 dan PP 24/2005 .....	24
Tabel 2.4. Perbedaan Format Laporan Realisasi Anggaran dan Pos-pos Belanja antara Kepmendagri 29/2002 dan PP 24/2005.....	25
Tabel 2.5. Format Neraca Pemerintah Daerah.....	25
Tabel 2.6. Perbedaan Laporan Arus Kas antara Kepmendagri 29/2002 dan PP 24/2005 .....	26
Tabel 5.1. Distribusi Sampel per SKPD .....	67
Tabel 5.2. Jabatan Responden .....	67
Tabel 5.3. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel bebas .....	69
Tabel 5.4. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Terikat .....	71
Tabel 5.5. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner .....	72
Tabel 5.6. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	74
Tabel 5.7. Uji Normalitas Data .....	79
Tabel 5.8. Uji Asumsi Linieritas .....	80
Tabel 5.9. <i>Goodness-of-Fit Index</i> Model awal dan Model Modifikasi .....	82
Tabel 5.10. <i>Modification Indices</i> Model Awal .....	83
Tabel 5.11. Ikhtisar Uji Hipotesis .....	87
Tabel 5.12. <i>Standardized Direct Effect, Indirect Effect, dan Total Effect</i> ...	90

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1. <i>Model Theory of Reasoned Action</i> .....	30
Gambar 2.2. Technology Acceptance Model .....	32
Gambar 2.3. Teori Pengaruh Sosial Kelman .....	33
Gambar 2.4. A Conceptual Framework of Individual Innovation Acceptance in Organizations .....	36
Gambar 2.5. Classification of Learning Outcomes .....	38
Gambar 3.1. Model Konseptual Penelitian .....	47
Gambar 5.1. <i>Path Diagram</i> Hasil Pengujian Model Struktural yang Dimodifikasi <i>Standardized Estimate</i> .....	85

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Daftar Kuesioner

Lampiran 2: Data Penelitian

Lampiran 3: Validitas dan Reliabilitas

Lampiran 4: Statistik Deskriptif

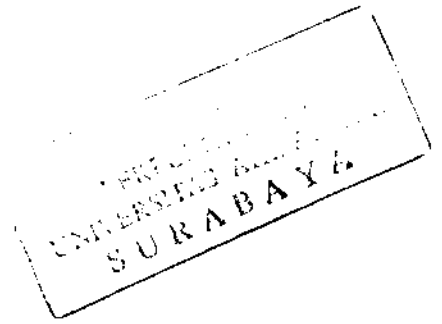
Lampiran 5: Uji Linieritas

Lampiran 6: Hasil Analisis Jalur Model Awal

Lampiran 7: Hasil Analisis Jalur Model Modifikasi

## BAB I

### PENDAHULUAN



#### 1.1. Latar Belakang

Tuntutan penerapan *good governance* dalam manajemen pemerintahan merupakan fenomena global, bukan hanya bagi negara berkembang, tapi juga pada negara maju sekalipun. Hal ini dapat disimak dari publikasi *OECD Journal on Budgeting* mengenai *Models of Public Budgeting and Accounting Reform* di negara maju dan negara berkembang (OECD, 2002, Ouda, 2005). Pada konteks manajemen pemerintahan, substansi *good governance* adalah tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan pemerintah.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan seperangkat perundang-undangan yang menjadi pedoman aparatur pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan *good governance* dalam manajemen pemerintahan. Tonggak penting pelaksanaan *good governance* dalam manajemen pemerintahan adalah dikeluarkannya paket UU Keuangan Negara pada tahun 2003 dan 2004 beserta peraturan pelaksanaannya. Berikut disarikan peraturan perundang-undangan yang



menjadi pedoman dalam pelaksanaan *good governance* dalam manajemen pemerintahan di Indonesia.

Tabel 1.1.  
Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan Manajemen Pemerintahan

No	Peraturan Perundang-undangan
1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3	Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
4	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6	PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
7	PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.07/2001 tanggal 5 Juni 2001
9	Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah direvisi menjadi Permendagri 59 tahun 2007.

Seiring reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan yang paling diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya dapat mewujudkan transparansi

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sebagai cerminan pelaksanaan *good governance* manajemen pemerintah daerah.

Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memerlukan waktu lama. Awalnya, dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri. Hal ini tentu saja menjadikan daerah provinsi, kabupaten/kota menjadi entitas-entitas otonom yang harus melakukan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangannya sendiri mendorong perlunya standar pelaporan keuangan. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 menyatakan bahwa “penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah”, meskipun belum ada standar akuntansi pemerintahan yang baku.

Belum adanya standar akuntansi pemerintahan yang baku memicu perdebatan siapa yang berwenang menyusun standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sementara itu, pelaporan dan penyajian keuangan harus tetap berjalan sesuai peraturan perundangan meskipun standar belum ada. Untuk mengisi kekosongan sambil menunggu penetapan yang berwenang menyusun dan menetapkan standar akuntansi pemerintahan dan terutama upaya untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan *akuntable* maka pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan mengambil inisiatif untuk membuat pedoman penyajian laporan keuangan. Maka lahirlah sistem akuntansi keuangan daerah dari

Departemen Keuangan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.07/2001 tanggal 5 Juni 2001. Dari Departemen Dalam Negeri keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 18 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedua keputusan ini bukanlah standar akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 maupun standar akuntansi pada umumnya.

Kemudian pada tahun 2004 terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pasal 56 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan yang berlaku baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan

kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku umum. Sebagai amanat dari Paket UU otonomi Daerah yang baru dan Paket UU Keuangan Negara, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, aturan pelaksanaannya dirinci dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah juga mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menjadi landasan hukum standarisasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Sesuai pasal 332 ayat 1 PP No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa “penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2006”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2006 dan 2007, semestinya telah disusun berdasarkan SAP. Fakta di lapangan, berkaitan dengan implementasi SAP khususnya dan *good governance* umumnya, masih belum sesuai yang diharapkan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan SAP untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), secara resmi dimulai pada tahun anggaran 2007. Hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2007, memperoleh pendapat *disclaimer* (tidak memberikan pendapat). Faktor lebih luas, dari belum maksimalnya penerapan SAP diungkapkan Ketua BPK Anwar Nasution, yang menegaskan bahwa Hasil

Pemeriksaan BPK RI atas LKPD tiga tahun (2004 – 2006) menunjukkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah semakin memburuk. Hal ini ditunjukkan dengan persentase LKPD yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama periode 2004-2006 semakin menurun setiap tahunnya. Sebaliknya, LKPD dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar (TW) justru semakin meningkat. Hasil Pemeriksaan 459 LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2006 menunjukkan bahwa hanya 3 LKPD yang memperoleh opini WTP dan masih ada enam LKPD yang belum disampaikan ke BPK RI sampai akhir 2007 ([www.bpkp.id](http://www.bpkp.id), 28 Mei 2008). Sehubungan dengan fakta tersebut, Ketua BPK memberikan mengidentifikasi 6 bidang yang harus segera dibenahi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:

1. “Sistem pembukuan yang perlu diperbaiki secara mendasar untuk kesesuaiannya dengan standar akuntansi pemerintahan,
2. Sistem aplikasi teknologi komputer yang menjamin sinkronisasi dan integritas data keuangan,
3. Inventarisasi aset dan hutang,
4. Jadwal waktu penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan serta pertanggungjawaban anggaran,
5. *Quality assurance* atas LKPD oleh pengawas intern, dan
6. Sumber daya manusia, yaitu penetapan status bendahara sebagai jabatan fungsional, pengetahuan dasar ilmu akuntansi bagi bendahara atau petugas

pembukuan, dan penggunaan tenaga BPKP atau pelatihan akuntansi keuangan daerah” ([www.bpkp.id](http://www.bpkp.id)).

Fakta tersebut mengindikasikan adanya kendala-kendala dalam implementasi reformasi manajemen keuangan pemerintah daerah untuk mewujudkan *good governance*. Fakta lain yang mengindikasikan adanya kendala dalam implementasi *good governance* di pemerintah daerah, ditunjukkan oleh studi Rahayu, Ludigdo, dan Affandy (2007), yang meneliti penyusunan anggaran berbasis kinerja (ABK) pada satu SKPD di Pemerintah Propinsi Jambi tahun anggaran 2005. Rahayu, dkk (2007) menyimpulkan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja masih terbatas formalitas saja. Format dan struktur anggaran telah mengikuti peraturan yang berlaku, akan tetapi substansi dan semangat implementasi anggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen pemerintah daerah belum berjalan seperti yang diharapkan. Beberapa faktor yang ditemukan Rahayu, dkk (2007) sebagai penyebabnya adalah (1) tidak diikutinya perubahan sikap mental aparat pemerintah yang sesuai dengan paradigma baru, (2) peraturan perundangan yang berubah-ubah, (3) pelaksanaan aturan baru lebih rumit dan proses yang lebih lama dan sering terjadinya, serta (4) resistensi terhadap perubahan kebijakan baru.

Berdasarkan fakta yang dikemukakan Ketua BPK Anwar Nasution (2008) dan temuan studi Rahayu, dkk (2007) mengindikasikan implementasi reformasi manajemen pemerintahan daerah masih menemui banyak kendala. Reformasi manajemen pemerintahan daerah, seperti diamanatkan dalam paket UU keuangan

negara (UU 17 tahun 2003, UU 1 tahun 2004, dan UU 15 tahun 2004) dan aturan pelaksanaannya (PP 24 tahun 2005, PP 58 tahun 2005, Permendagri 13 tahun 2006) secara substansial merupakan perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik. Lebih lanjut, perubahan-perubahan tersebut dapat dipandang sebagai inovasi dalam manajemen pemerintahan.

Berdasarkan telaah literatur, studi reformasi manajemen pemerintahan, lebih banyak dilakukan pada konteks penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Lebih lanjut, studi implementasi akuntansi pemerintahan pada level target pemakai (individual) juga masih relatif terbatas. Olorilanto (2008) dan Ouda (2005) meneliti adopsi *accounting accrual* akuntansi pemerintahan berbasis kedua studi tersebut dilakukan pada level makro, dengan menggunakan unit analisis pemerintah lokal dan negara. Ouda (2005) menyimpulkan beberapa faktor yang menghambat adopsi standar akuntansi dalam pemerintah adalah masalah legal, kurangnya ualifikasi tenaga akunting, sistem internal yang tidak konsisten, kurangnya pendidikan mengenai proses reformasi pemerintahan, budaya birokrasi, kapasitas teknologi informasi yang kurang mendukung, dan resistensi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Hampir sama Olorilanto (2008) dalam studinya menyimpulkan faktor-faktor yang menghambat implementasi standar akuntansi di pemerintah lokal, seperti dikemukakan Ouda (2005).

Penelitian ini difokuskan pada implementasi SAP dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diatur dalam PP 24 tahun 2005, PP 58 tahun 2005, dan Permendagri 13 tahun 2006. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pandangan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah seperti diatur dalam PP 24 tahun 2005 dan Permendagri 13 tahun 2006 adalah sebuah hal baru (inovasi) bagi aparat pemerintah daerah, karena disusun berdasarkan pedoman dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sebagai ganti dari ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002.

Pasal 232 ayat 6 Permendagri 13 tahun 2006, menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi: (a) laporan realisasi anggaran, (b) neraca, dan (c) catatan atas laporan keuangan. Entitas akuntansi yang dimaksud pada ayat tersebut adalah SKPD dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Lebih lanjut, pasal 240 Permendagri 13 tahun 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah merupakan penggabungan (integrasi) dari laporan keuangan SKPD dan BLUD. Selain, tiga jenis laporan keuangan, pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan juga membuat laporan arus kas. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara logis ditentukan oleh kualitas laporan keuangan SKPD dan BLUD.

Inovasi adalah gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang (Rogers, 1995). Jelas bahwa suatu inovasi, bukan hanya berupa benda berwujud (*tangible*) akan tetapi juga dalam bentuk gagasan maupun tindakan.



Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP, merupakan inovasi, karena berbeda dari aspek paradigma dan prosedur penyusunannya dibanding dengan ketentuan sebelumnya. Lebih lanjut, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP, juga dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, yaitu aplikasi komputer yang harus disesuaikan dengan SAP.

Pada konteks organisasional, adopsi suatu inovasi bersifat berjenjang dalam dua level keputusan, yaitu level 1 oleh organisasi dan level 2 oleh individu anggota organisasi yang menjadi target pemakai (Frambach dan Schillewaert, 1999). Tolok ukur utama yang mengindikasikan berhasil tidaknya adopsi inovasi adalah penerimaan inovasi pada level individual. Ini berarti bahwa keberhasilan implementasi inovasi, ditentukan oleh penerimaan anggota organisasi itu sendiri yaitu ketika inovasi tersebut telah digunakan secara rutin dan diintegrasikan menyeluruh dalam unit-unit organisasi (Frambach dan Schillewaert, 1999). Meskipun pada konteks organisasional, keputusan menerima inovasi bagi individu merupakan kelanjutan dari keputusan *level* organisasi yang cenderung bersifat paksaan atau kewajiban tugas (*task obligation*), akan tetapi pada prakteknya, individu-individu memberikan respon sikap beragam. Ada yang menerima dengan senang hati, terpaksa, atau bahkan penghindaran.

Faktor-faktor yang diidentifikasi mempengaruhi anggota organisasi bersedia menerima inovasi, meliputi: (1) faktor organisasional atau *internal marketing*; (2) karakteristik personal/individual; dan (3) *social usage* atau pengaruh lingkungan sosial. *Internal marketing* atau pemasaran internal organisasi

adalah upaya-upaya yang dilakukan organisasi untuk mensosialisasikan dan mendidik anggota organisasi dalam penggunaan inovasi. Faktor kedua adalah karakteristik personal, meliputi demografis, masa kerja (*tenure*), pengalaman terhadap inovasi sebelumnya (*product experience*), dan nilai pribadi (*personal values*). Lebih lanjut, aspek komitmen pegawai pada tujuan organisasi, juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi individu dalam mengimplementasikan inovasi. Sumiyana (2007) menemukan bahwa dimensi-dimensi komitmen pegawai, meliputi internalisasi, identifikasi, dan kepatuhan (*compliance*) terhadap tujuan organisasi terbukti berpengaruh positif terhadap sikap dan perilaku menggunakan inovasi sistem informasi baru.

Frambach dan Schillewaert (1999) menegaskan bahwa faktor *internal marketing*, keinovatifan individu, dan faktor lingkungan sosial mempengaruhi penerimaan inovasi oleh individu melalui variabel sikap. Ini berarti variabel sikap merupakan komponen pokok dalam penerimaan inovasi. Terdapat dua variabel sikap penting, yaitu persepsi kemudahan penggunaan (*ease of use*) dan persepsi manfaat/kegunaan inovasi (*perceived of usefulness*). Dengan demikian, keberhasilan implementasi penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sangat ditentukan oleh bagaimana sikap target pemakai (*end user*), yaitu apakah hal tersebut mudah diterapkan dan memberikan manfaat lebih dibanding cara sebelumnya, yaitu sesuai ketentuan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002.

Variabel sikap (*ease of use* dan *usefulness*) dapat dikategorikan sebagai variabel motivasional (Davis *dalam* Ramayah, et al., 2002). Kemudahan

penggunaan adalah bentuk motivasi intrinsik, yaitu pelaksanaan aktivitas terdorong oleh aktivitas itu sendiri yang mudah dan menyenangkan, bukan karena faktor lain. Adapun manfaat inovasi merupakan bentuk motivasi ekstrinsik, yaitu pelaksanaan aktivitas didorong manfaat dari aktivitas tersebut untuk meningkatkan kinerja, baik individual maupun organisasi, tak terkecuali organisasi publik (pemerintah).

Berdasarkan berbagai kerangka teoritis dan temuan-temuan tersebut di atas, maka akan diuji faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan inovasi SAP di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Mengacu temuan studi sebelumnya, diidentifikasi tiga faktor yang diduga berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan penerimaan inovasi, yaitu faktor organisasional (*internal marketing*), faktor karakteristik individual dan pengaruh lingkungan sosial. Pertama; faktor organisasional, yaitu semua upaya organisasi untuk meningkatkan penguasaan dan mempromosikan inovasi ke semua unit organisasi. Upaya-upaya ini meliputi pelatihan, dukungan teknis, dan komitmen pimpinan organisasi dalam implementasi inovasi. Pelatihan terutama ditujukan untuk meningkatkan penguasaan dan ketrampilan menggunakan inovasi. Adapun dukungan teknis, meliputi antara lain pembentukan unit khusus yang diisi tenaga-tenaga ahli yang siap setiap saat untuk memberikan layanan asistensi bagi pemakai inovasi. Dukungan teknis juga dapat dilihat dari ketersediaan peralatan-peralatan pendukung yang memadai untuk mengimplementasikan inovasi. Organisasi juga perlu memiliki komitmen yang kuat dan jelas terhadap keberhasilan implementasi

inovasi. Semua upaya organisasi tersebut perlu dilakukan secara konsisten, baik sebelum implementasi ataupun ketika implementasi telah berlangsung. Melalui pelatihan, dukungan teknis, dan komitmen implementasi yang kuat, diharapkan ada perubahan sikap dan persepsi pemakai terhadap inovasi. Misal melalui pelatihan yang intensif, akan mempermudah penggunaan inovasi bagi pemakai, karena menyediakan bekal pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk menggunakan inovasi tersebut.

Tersedianya asistensi dan peralatan pendukung yang memadai, juga akan memperlancar dan mempermudah penggunaan inovasi, karena ketika terjadi kendala dalam implementasi dapat segera diatasi. Lebih lanjut, promosi atau sosialisasi yang konsisten, akan memperkuat keyakinan pemakai terhadap nilai penting dan manfaat inovasi. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa upaya-upaya yang dilakukan organisasi tersebut di atas, secara langsung akan mempermudah penggunaan inovasi dan memperkuat keyakinan atas manfaat inovasi, sehingga dapat dihipotesiskan bahwa faktor organisasional berpengaruh positif terhadap persepsi kemudahan (*ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*).

Kedua; faktor individual, yaitu karakteristik personal anggota organisasi, meliputi demografis, masa kerja (*tenure*), pengalaman terhadap inovasi (*product experience*), dan nilai pribadi (*personal values*). Dalam studi ini difokuskan kepada dimensi *product experience*, yaitu pengalaman target pemakai terhadap praktek penyusunan laporan keuangan sebelumnya, berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 serta komitmen pegawai.

Ketiga, faktor pengaruh lingkungan sosial, yaitu orang-orang atau pihak-pihak yang berinteraksi intensif dan dijadikan kelompok acuan (*reference group*) bagi target pemakai. Dalam arti luas, lingkungan sosial ini bersumber dari pihak internal dan eksternal organisasi, namun dalam studi ini dibatasi pada lingkungan sosial yang berasal dari internal organisasi. Ada dua sumber referensi penting bagi target pemakai yang bersumber dari internal, yaitu rekan kerja dan atasan langsung, dan pada konteks penerimaan inovasi SAP, peneliti mengidentifikasi atasan langsung (pimpinan unit kerja), sebagai representasi faktor lingkungan sosial. Jika pimpinan unit kerja menilai bahwa SAP adalah penting dan bermanfaat, maka Pegawai akan cenderung mengikutinya, sehingga dapat dihipotesis bahwa pimpinan unit kerja berpengaruh terhadap persepsi manfaat inovasi bagi target pemakai.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor organisasional, pengalaman dalam penyusunan laporan keuangan sebelumnya dan komitmen pegawai berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan SAP dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah faktor organisasional, pengalaman dalam penyusunan laporan keuangan sebelumnya, komitmen pegawai, pimpinan unit kerja dan persepsi

kemudahan berpengaruh terhadap persepsi manfaat SAP dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur?

3. Apakah persepsi kemudahan dan persepsi manfaat berpengaruh terhadap penerimaan SAP dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji apakah faktor organisasional, pengalaman dalam penyusunan laporan keuangan sebelumnya dan komitmen pegawai berpengaruh signifikan terhadap persepsi kemudahan penggunaan SAP dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur?
2. Menguji apakah faktor organisasional, pengalaman dalam penyusunan laporan keuangan sebelumnya, komitmen pegawai, pimpinan unit kerja dan persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap persepsi manfaat SAP dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur?
3. Menguji apakah persepsi kemudahan dan persepsi manfaat berpengaruh signifikan terhadap penerimaan SAP dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur?

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengambil kebijakan dalam implementasi penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP.
2. Memberi kontribusi dalam bidang studi implementasi standar akuntansi di lingkungan organisasi publik.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai implementasi sistem akuntansi baru di organisasi pemerintahan antara lain dilakukan oleh Ouda (2005) dan Olorilanto (2008). Kedua penelitian tersebut mengkaji adopsi *accounting accrual* sebagai standar akuntansi pemerintahan. Kedua studi tersebut dilakukan pada level makro, dengan menggunakan unit analisis pemerintah lokal dan negara.

Studi Ouda (2005) menyimpulkan adanya tiga masalah pada masa transisi dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan, yaitu masalah kepraktisan, masalah konseptual, dan masalah lingkungan politik, budaya birokratis, dan sosial ekonomi. Masalah yang ketiga ini oleh Ouda disebut sebagai masalah tambahan (*additional problems*). Namun demikian, Ouda menyatakan bahwa yang paling mendasar dalam transisi implementasi standar akuntansi pemerintahan adalah cenderung masalah kepraktisan. Ouda (2005) menyimpulkan bahwa masalah-masalah yang terjadi dalam masa transisi implementasi standar akuntansi pemerintah adalah masalah legal, kurangnya kualifikasi tenaga akunting, sistem internal yang tidak konsisten, kurangnya pendidikan mengenai proses reformasi pemerintahan, budaya birokrasi, kapasitas teknologi informasi yang kurang mendukung, dan resistensi terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Hasil hampir sama dengan studi Ouda (2005), dijumpai dalam studi Olorilanto (2008) yang meneliti problem adopsi standar akuntansi berbasis akrual oleh pemerintah daerah di Madagaskar. Meskipun secara legal sudah ditetapkan



peraturan perundangan mengenai penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala. Olorilanto (2008) dalam studi tersebut mengacu pada model kontinjensi Luder (Luder's contingency model), menyimpulkan bahwa lemahnya promosi atau sosialisasi inovasi akuntansi akrual secara intensif dan menyeluruh kepada semua instansi pemerintahan dari pusat hingga pemerintah lokal merupakan hambatan utama. Temuan Olorilanto (2008) menyebutkan lemahnya promosi dan sosialisasi akuntansi akrual disebabkan oleh dua faktor yaitu (1) kurangnya interaksi dan komunikasi antara agen pembaharu (akademisi, pemerintah pusat dan asosiasi akuntan) dengan target pemakai pada level pemerintah lokal, dan (2) regulasi yang kurang jelas dan cenderung terlambat untuk memenuhi kebutuhan pedoman implementasi akuntansi akrual di pemerintahan. Olorilanto (2008) juga menyebutkan bahwa kurangnya sinergi antara agen pembaharu dengan target pemakai serta lemahnya komitmen politik pemerintah pusat menjadi penyebab utama lemahnya promosi dan sosialisasi implementasi standar akuntansi pemerintahan yang hendak diterapkan.

Persamaan penelitian ini dengan studi Ouda (2005) dan Olorilanto (2008) adalah (1) konteks organisasi yang diteliti, yaitu organisasi publik (pemerintahan) dan (2) obyek studinya adalah sama-sama implementasi inovasi akuntansi di sektor pemerintahan. Adapun perbedaannya adalah (1) pendekatan studi, Ouda (2005) dan Olorilanto (2008), keduanya menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan (2) unit analisis, yaitu studi Ouda (2005) dan Olorilanto (2008) unit analisisnya adalah pemerintahan atau level makro, sedangkan unit analisis studi ini adalah level

individual. Hasil studi Ouda (2005) dan Olorilanto (2008) memberikan bukti empiris mengenai kendala-kendala implementasi inovasi akuntansi di organisasi pemerintahan, dan diidentifikasi sebagai variabel bebas dalam studi ini.

Penelitian selanjutnya yang dijadikan acuan adalah Sumiyama (2006). Penelitian ini berada pada level mikro dengan unit analisis individual. Penelitian Sumiyama bertujuan memvalidasi teori pengaruh sosial dari Kelman (Kelman's Social Influence Theory), dalam menjelaskan minat (intensi) penggunaan sistem informasi baru. Teori ini menempatkan komitmen afeksi (identifikasi dan internalisasi) dan komitmen berkelanjutan (kepatuhan/compliance) sebagai variabel anteseden terhadap penggunaan inovasi sistem informasi melalui variabel sikap. Studi Sumiyama menghasilkan temuan bahwa identifikasi dan internalisasi masing-masing berpengaruh positif terhadap (1) persepsi kemudahan, (2) persepsi manfaat, (3) sikap penggunaan sistem informasi dan (4) intensi penggunaan sistem informasi. Sebaliknya, komitmen kontinuans berpengaruh negatif terhadap (1) persepsi kemudahan, (2) persepsi manfaat, (3) sikap penggunaan sistem informasi dan (4) intensi penggunaan sistem informasi. Lebih lanjut, persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap sikap dan intensi penggunaan, dan sikap penggunaan berpengaruh positif terhadap intensi penggunaan sistem informasi baru. Berdasarkan hasil studinya, Sumiyama menyatakan bahwa komitmen pemakai merupakan variabel kunci dalam menjelaskan kesediaan target pemakai menggunakan sistem informasi baru.

Hasil studi Sumiyama di atas, didukung Malhotra dan Galletta (2005) yang juga mendasarkan pada teori pengaruh sosial Kelman. Studi Malhotra dan Galletta

yang berjudul "*A Multidimensional Commitment Model of Volitional Systems Adoption and Usage Behavior*" menyimpulkan bahwa komitmen pengguna merupakan faktor penting bagi penerimaan dan perilaku penggunaan sistem. Komitmen afektif yang terukur melalui internalisasi dan identifikasi berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan sistem, sedangkan komitmen berbasis kepatuhan justru berpengaruh negatif. Studi Sumiyama (2006) dan Malhotra dan Galleta (2005) tersebut menegaskan peran penting komitmen pengguna terhadap keberhasilan implementasi suatu sistem baru (inovasi).

Persamaan penelitian ini dengan studi Sumiyama (2006) serta Malhotra dan Galleta (2005) adalah (1) sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif (hipotesis diuji dengan analisis jalur) dan (2) dasar teori yang digunakan, yaitu penerimaan/penggunaan inovasi oleh individu dalam organisasi. Adapun perbedaannya adalah (1) jenis inovasi, yaitu pada studi Sumiyama (2006) serta Malhotra dan Galleta (2005), inovasi yang diteliti adalah penggunaan sistem informasi dan (2) jenis organisasi, yaitu perusahaan swasta.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Dalam Bab 1, telah disebutkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar reformasi pemerintah daerah, dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Menurut PP No 58 tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sebagai wujud pertanggungjawaban pejabat perangkat daerah dalam penggunaan anggaran, setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi diwajibkan membuat laporan keuangan. Sesuai PP No 58 tahun 2005, entitas pelaporan adalah level pemerintah daerah (propinsi, kabupaten, kota), jenis laporan keuangan yang dibuat adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca,
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Adapun untuk entitas akuntansi (level SKPD dan BLUD), jenis laporan keuangan yang wajib dibuat adalah:

1. Laporan realisasi anggaran
2. Neraca,
3. Catatan atas Laporan Keuangan.

SKPD dan BLUD tidak membuat Laporan Arus Kas, aliran kas masuk dan keluar, dalam pemerintah daerah harus melalui Bendahara Umum Daerah.

### **2.2.2. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disusun Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), yang dibentuk sesuai amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut PP. 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP disusun berdasarkan Kerangka

Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang memuat prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 2 PP. 24 Tahun 2005 dinyatakan:

- 1) SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP.
- 2) SAP dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 3) PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh KSAP dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 2.1.

Daftar PSAP sesuai PP 24/2005

PSAP	Isi
PSAP NO. 1	Penyajian Laporan Keuangan
PSAP NO. 2	Laporan Realisasi Anggaran
PSAP NO. 3	Laporan Arus Kas
PSAP NO. 4	Catatan Atas Laporan Keuangan
PSAP NO. 5	Akuntansi Persediaan
PSAP NO. 6	Akuntansi Investasi
PSAP NO. 7	Akuntansi Aset Tetap
PSAP NO. 8	Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
PSAP NO. 9	Akuntansi Kewajiban
PSAP NO. 10	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
PSAP NO. 11	Laporan Keuangan Konsolidasian

Sumber: PP 24/2005

KSAP juga berwenang menentukan interpretasi PSAP (IPSAP) dalam rangka menyamakan persepsi dari pengguna SAP. Lebih lanjut, untuk mempermudah dan mempercepat penyebaran SAP, KSAP juga berwenang menerbitkan Buletin

Teknis (Bultek), yaitu informasi yang diterbitkan oleh KSAP yang memberikan arahan/pedoman secara tepat waktu untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul. Sampai saat ini, KSAP telah menerbitkan 4 Bultek, yaitu:

1. Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat
2. Buletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah
3. Buletin Teknis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai dengan SAP dengan Konversi
4. Buletin Teknis Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah

Sesuai konteks penelitian, yaitu penyusunan LKPD berbasis SAP atau PP 24/2005, sebagai ganti dari ketentuan dalam Kepmendagri 29/2002, maka perlu diuraikan lebih rinci mengenai perbedaan diantara kedua peraturan tersebut.

### 1. Jenis laporan keuangan

Tabel 2.2.

Perbedaan Jenis LKPD menurut Kepmendagri 29/2002 dan PP 24/2005

Kepmendagri 29/2002	PP 24/2005 (SAP)
Nota perhitungan anggaran, Neraca Laporan Arus Kas	Laporan realisasi anggaran, Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas laporan keuangan

Sumber: Kepmendagri 29/2002 dan PP 24/2005

Sebelum diterapkannya PP 24/2005, LKPD pemerintah daerah disusun berdasarkan Kepmendagri 29/2002. Dilihat dari jenis LKPD yang dibuat, Kepmendagri 29/2002 mengamanatkan pemerintah daerah membuat Laporan Nota Perhitungan Anggaran, yang kemudian menurut PP 24/2005 berubah menjadi Laporan Realisasi Anggaran.

## 2. Basis akuntansi yang digunakan

Paragraf 6 dalam SAP, menyatakan bahwa “Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu **basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana**”. Basis akuntansi ini disebut *cash toward accrual*. Dalam Kepmendagri 29/2002, basis akuntansi untuk akun-akun tersebut belum diatur secara tegas.

Entitas pelaporan diperkenankan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.

Selain basis akuntansi untuk akun-akun dalam LKPD, juga terdapat perbedaan kebijakan akuntansi antara Kepmendagri 29/2002 dengan PP 24/2005, seperti dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 2.3.

Perbedaan Kebijakan Akuntansi Kepmendagri 29/2002 dan PP 24/2005

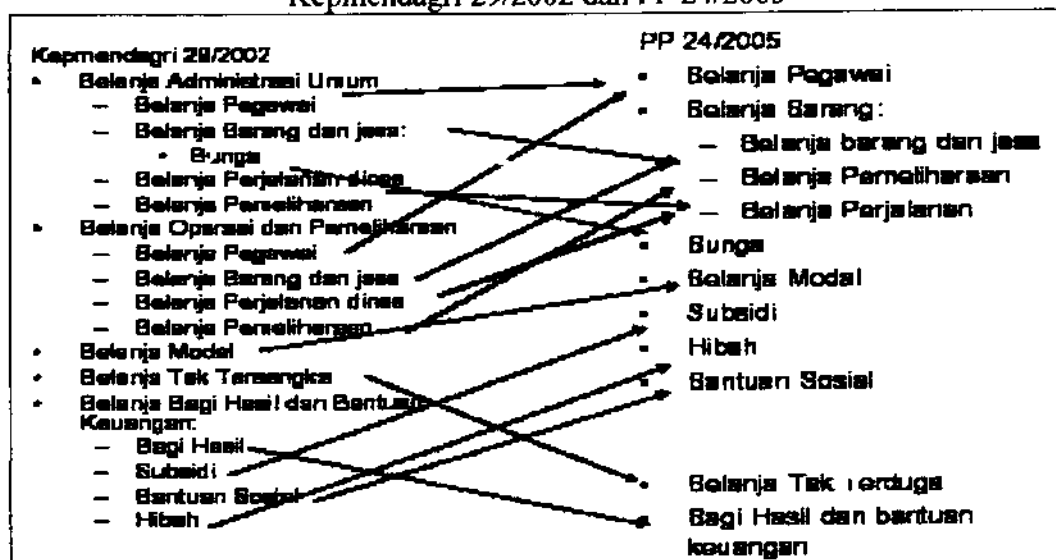
Keterangan	Kepmendagri 29/2002	PP 24/2005 (SAP)
Pengakuan Pendapatan dan Belanja	Basis kas modifikasian	Basis kas
Pengakuan Aset	Diakui akhir periode	Diakui saat terjadinya perpindahan kepemilikan.
Pengakuan Kewajiban	Diakui akhir periode	Saat pinjaman diterima atau kewajiban timbul
Penilaian Aset	aset lembaga independen bersertifikat	aset dinilai berdasarkan harga perolehan.

Sumber: PP 24/2005

3. Akun-akun dalam laporan keuangan daerah

Perubahan yang banyak terjadi dalam PP 24/2005 tentang SAP, dibandingkan dengan Kepmendagri 29/2002 adalah akun-akun dalam LKPD, terutama untuk Laporan Realisasi Anggaran (Pos-pos Belanja) dan Laporan Arus Kas.

Tabel 2.4.  
Perbedaan Format Laporan Realisasi Anggaran dan Pos-pos Belanja antara Kepmendagri 29/2002 dan PP 24/2005



Sumber: Bultek No 2, PP 24/2005

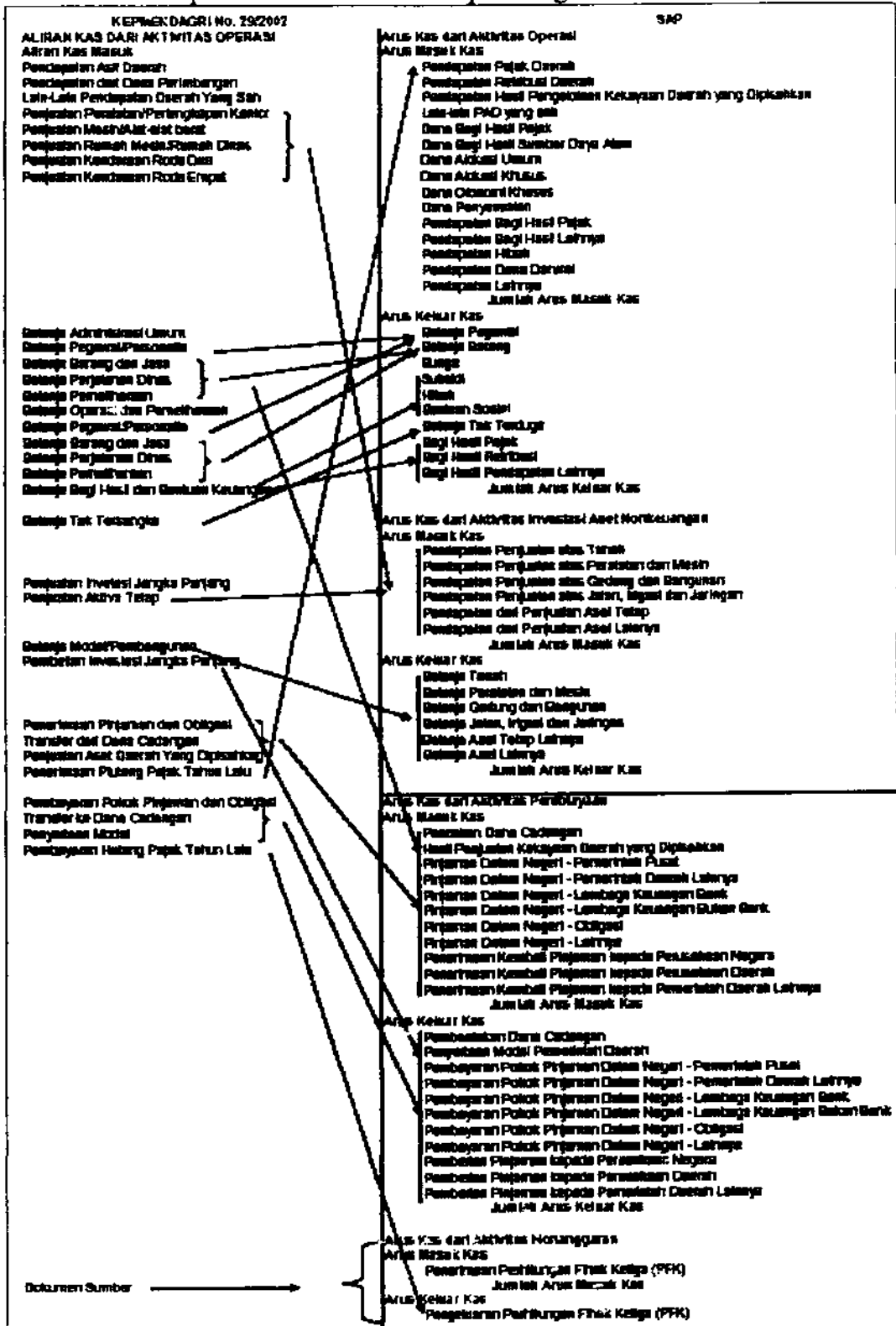
Tabel 2.5.  
Format Neraca Pemerintah Daerah  
Pemerintah Daerah XX  
Neraca  
Per 31 Desember 200X

ASET		KEWAJIBAN	
Aset Lancar	XXX	Kewajiban Jangka Pendek	XXX
Investasi Jangka Panjang	XXX	Kewajiban jangka Panjang	XXX
Aset Tetap	XXX	Jumlah Kewajiban	XXX
Dana Cadangan	XXX		
Aset Lainnya	XXX	EKUITAS DANA	
		Ekuitas Dana Lancar	XXX
		Ekuitas Dana Investasi	XXX
		Ekuitas Dana Cadangan	XXX
		Jumlah Ekuitas Dana	XXX
Jumlah Aset	XXX	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	XXX

Sumber: PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan



Tabel 2.6.  
Perbedaan Laporan Arus Kas antara Kepmendagri 29/2002 dan PP 24/2005



Sumber: Bultek No 2, PP 24/2005

Berdasarkan Permendagri 13/2006, yang menjadi pemakai SAP adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah. Pasal 13 peraturan tersebut menyatakan:

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
  - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  - c. melakukan verifikasi SPP;
  - d. menyiapkan SPM;
  - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  - f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
  - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

### **2.2.3. Standar Akuntansi Pemerintah sebagai Inovasi**

SAP merupakan metode baru dalam praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia. Meskipun telah diamanatkan dalam paket UU keuangan negara (UU Nomor 17/2003, UU Nomor 1/2004, UU Nomor 15/2004), PP 58/2005, dan Permendagri 13/2006, namun di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, implementasi SAP untuk penyusunan LKPD baru efektif dilaksanakan untuk tahun anggaran 2007. Dengan demikian, baru satu tahun SAP dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Karena itu, bagi PPK-SKPD di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, penyusunan LKPD berbasis SAP dapat dikatakan sebagai hal baru atau inovasi.

Rogers (1995) mendefinisikan inovasi sebagai gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Makna baru ini, dilihat secara subyektif menurut pandangan individu. Artinya, bisa jadi apa yang dianggap inovasi bagi individu atau organisasi tertentu, bukan suatu inovasi bagi orang atau organisasi lain. SAP mungkin bukan inovasi atau konsep baru bagi aparaturnya di negara maju, yang telah lebih dulu menerapkannya, akan tetapi bagi aparaturnya pemerintah daerah di Indonesia, konsep tersebut merupakan hal baru, sehingga dapat dikatakan sebagai inovasi.

Suatu inovasi dapat berupa gagasan, tindakan atau barang. Ini menunjukkan bahwa inovasi dapat berupa benda fisik yang bersifat *tangible*, seperti teknologi komputer atau teknologi informasi pada umumnya, dan dapat pula berupa gagasan atau tindakan yang bersifat *intangible*, misal implementasi konsep SAP untuk penyusunan LKPD. Bagi organisasi, apapun wujud inovasi yang diadopsi, baik *tangible* atau *intangible*, akan selalu menghadapi pertanyaan pokok, yaitu bagaimana mengkomunikasikan inovasi tersebut agar dapat diterima target pemakai dan bagaimana implementasinya agar berhasil.

#### **2.2.4. Model Penerimaan Inovasi oleh Individu dalam Organisasi**

Ketika metode baru diintroduksi dan diterapkan dalam organisasi, yang diharapkan adalah inovasi tersebut dapat diterapkan dengan berhasil. Demikian pula dengan implementasi SAP untuk penyusunan LKPD. Penyusunan LKPD berbasis SAP adalah inovasi, dan untuk itu perlu dipahami rasional pentahapan implementasinya.

Dalam konteks organisasional, pentahapan implementasi, pada dasarnya mengikuti proses perubahan (change) dalam organisasi. Kwon dan Zmud (dalam Fichman, 1992), menyebutkan 6 tahap dalam implementasi inovasi, yaitu: *initiation, adoption, adaption, acceptance, routinization, dan infusion*, yang secara umum terbagi dalam 3 tahap *unfreezing, change, dan refreezing*.

Tahap inisiasi dicerminkan adanya kesadaran bahwa masalah atau peluang organisasi dapat dipecahkan dengan inovasi. Tahap inisiasi ini dapat dipicu kebutuhan organisasi (organizational pull) atau tekanan teknologi (technological push) atau keduanya. Berikutnya adalah tahap adopsi, yang menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilandasi pertimbangan rasional, ditandai keputusan menginvestasikan sumber daya organisasi untuk implementasi inovasi. Tahap berikutnya adalah adaptasi, yaitu proses instalisasi, penyusunan prosedur baru, dan pelatihan bagi pemakai (operator), baik terhadap prosedur ataupun inovasi. Tahap *acceptance* (penerimaan), ditandai oleh mulai diterapkannya inovasi baru dan pemakai (operator) berkomitmen menggunakan. Setelah penerimaan adalah tahap rutinisasi, yaitu inovasi baru digunakan secara rutin/normal. Sedangkan tahap terakhir adalah infusi, dimana inovasi baru digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Pada tahap infusi ini, organisasi berusaha memaksimalkan manfaat inovasi baru dan terus mendukung upaya memperoleh manfaat yang lebih baik bagi organisasi.

Teori sikap dan perilaku merupakan dasar yang digunakan untuk menjelaskan fenomena adopsi, implementasi, dan penerimaan inovasi oleh individu. Dalam literatur adopsi dan implementasi sistem informasi atau teknologi

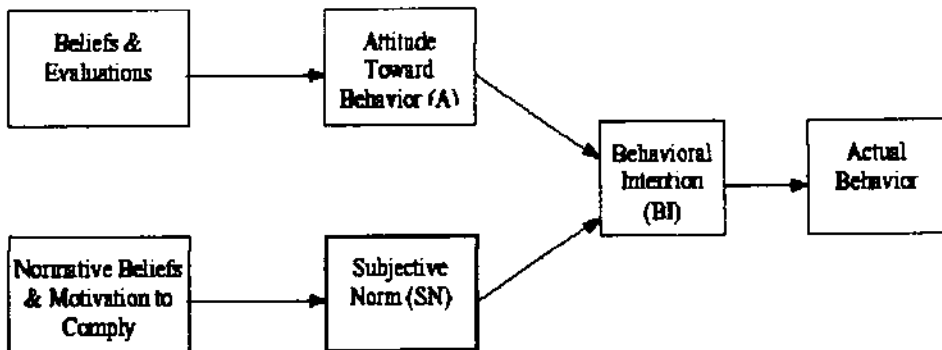
baru, ada beberapa model teoritis yang sering digunakan untuk menjelaskan perilaku penerimaan individu terhadap inovasi.

#### 2.2.4.1. Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action)

*Theory of Reasoned Action* (TRA) dikemukakan Fisbein dan Azjen (1975) menyatakan bahwa perilaku (behavior = B) individu dapat diprediksi dari minat berperilaku (behavior intention = BI). Adapun minat berperilaku individu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior = Ab) dan norma subyektif (subjective norms = SN). TRA dapat diilustrasikan dengan gambar berikut:

Gambar 2.1.

*Model Theory of Reasoned Action*



Sumber: Fisbein dan Ajzen (dalam Malhotra dan Galleta, 1999)

Sikap terhadap obyek (*Ab*) merupakan hasil dari keyakinan atas konsekuensi perilaku dan hasil evaluasi terhadap perilaku. Sikap yang terbentuk dalam komponen ini adalah sikap positif atau negatif, yang tergantung pada segi positif atau negatif dari komponen keyakinan dan evaluasi. Makin banyak segi positif dari komponen pengetahuan dan keyakinan, maka makin positiflah sikap

seseorang. Demikian pula, semakin positif atau negatif evaluasi seseorang atas manfaat perilaku, maka semakin positif atau negatif sikapnya.

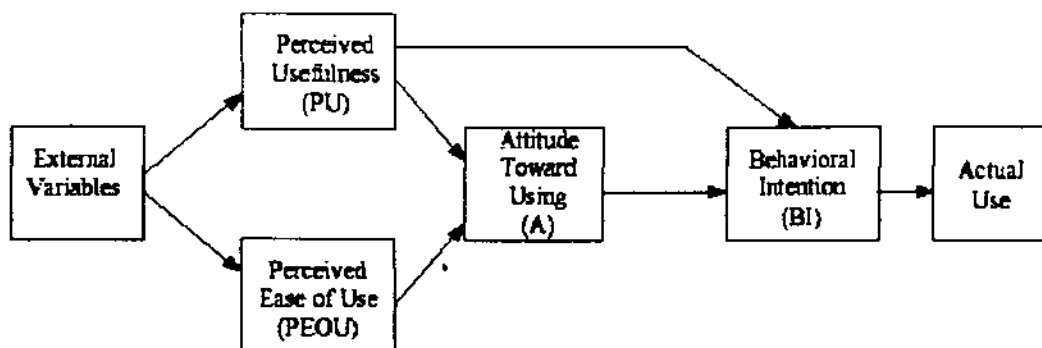
Pada sisi lain, norma subyektif diartikan sebagai “keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita perbuat” (Azwar, (2000:11). Norma subyektif berisikan keputusan yang dibuat individu setelah mempertimbangkan pandangan orang-orang dalam kelompok referennya tentang perilaku tertentu. Norma subyektif inilah yang menjadi sumber dari pengaruh sosial bagi individu dalam menentukan perilaku. Norma subyektif seseorang merupakan produk dari keyakinan bahwa orang lain (referen) berpendapat sebaiknya ia melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu dan motivasi untuk menuruti pendapat tersebut. Dengan demikian, secara sederhana TRA menyatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang perbuatan tersebut positif dan bila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya. Semakin positif sikap dan norma subyektif seseorang atas perilaku tertentu, maka kecenderungan minat dan perilaku aktualnya juga semakin kuat.

#### **2.2.4.2. Teori Model Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model)**

Model TAM dikembangkan berbasis teori TRA. Model TAM adalah model yang secara khusus dikonstruksi menjelaskan penerimaan individu terhadap teknologi komputer pada latar organisasi (*organizational setting*). Model TAM menjelaskan bahwa penerimaan individu terhadap inovasi teknologi ditentukan dua aspek keyakinan, yaitu (1) yakin bahwa inovasi memiliki manfaat lebih baik

(perceived usefulness) dan (2) yakin bahwa inovasi tersebut mudah digunakan, dengan upaya-upaya yang tidak terlalu sulit (perceived ease of use).

Gambar 2.2  
Technology Acceptance Model



Sumber: Davis (dalam Malhotra dan Galletta, 1999)

Menurut model TAM, kedua jenis keyakinan tersebut secara langsung berpengaruh positif terhadap penerimaan inovasi (Schillawaert, et al., 2001). Lebih lanjut, menurut Davis (1989) seperti dikutip Schillawaert, et al. (2001), *perceived ease of use* juga berpengaruh langsung terhadap *perceived usefulness*, karena inovasi yang mudah digunakan secara otomatis memberikan manfaat lebih besar. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan model TAM, maka pada konteks penelitian ini dapat dihipotesiskan bahwa kemudahan inovasi penyusunan LKPD berbasis SAP dan manfaatnya berpengaruh positif terhadap penerimaan target pemakai, serta kemudahan SAP untuk penyusunan LKPD juga berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat SAP.

Kedua bentuk keyakinan (beliefs), yaitu persepsi kemudahan dan persepsi manfaat menurut model TAM merupakan mediator bagi semua faktor eksternal. Menurut teori TAM, variabel-variabel selain variabel keyakinan

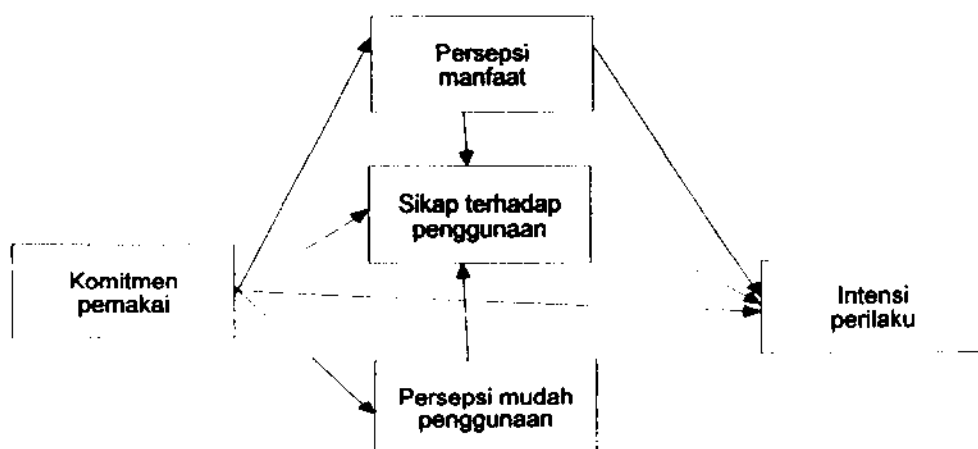
berpengaruh terhadap penerimaan melalui terbentuknya keyakinan terlebih dahulu. Dengan demikian, pengaruh faktor-faktor lingkungan baik *controllable*, (faktor organisasional; pelatihan, dukungan teknis dan komitmen organisasi, persuasi atasan langsung) maupun yang *uncontrollable* (karakteristik individual dan karakteristik tugas), terhadap penerimaan inovasi bersifat tidak langsung.

### 2.2.4.3. Teori Pengaruh Sosial Kelman

Teori pengaruh sosial Kelman (Kelman social influence theory) pada dasarnya menyatakan bahwa perilaku penggunaan suatu inovasi ditentukan oleh komitmen spesifik dari pemakai. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini, komitmen pemakai digunakan sebagai pelekatan psikologis pemakai terhadap penggunaan sistem. Beberapa studi mengintegrasikan teori pengaruh sosial Kelman dengan teori tindakan beralasan dan teori penerimaan teknologi Davis. Seperti studi Sumiyama (2006) dan Malhotra dan Galletta (1999). Model teori pengaruh sosial Kelman digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3.

Teori Pengaruh Sosial Kelman



Sumber: Sumiyama (2006)



Tampak bahwa model teori pengaruh sosial Kelman, menggunakan variabel-variabel yang hampir sama dengan TAM, ditambah dengan komitmen pemakai. Komitmen pemakai haruslah didefinisikan secara spesifik mengenai apa yang menjadi obyek komitmen. Dalam hal ini yang menjadi obyek komitmen pemakai adalah penggunaan SAP. Berdasarkan teori pengaruh sosial Kelman, dapat diprediksi bahwa penerimaan inovasi oleh target pemakai, ditentukan oleh komitmen pemakai terhadap penggunaan SAP. Komitmen atau keikatan individu terhadap penggunaan inovasi, mempengaruhi persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan sikap pada penggunaan inovasi. Selanjutnya sikap pada inovasi yang terbentuk akan menentukan niat (intensi) perilaku menggunakan inovasi.

Kelman membagi komitmen pemakai menjadi 3 dimensi, yaitu internalisasi (internalization), identifikasi (identification), dan kepatuhan (compliance). Ketiga perwujudan komitmen tersebut memiliki anteseden yang berbeda, yaitu sebagai berikut (Malhotra dan Galleta, 1999):

1. Internalisasi

Internalisasi adalah individu menerima (accepts) pengaruh sosial karena kesesuaian (kongruensi) antara sistem nilai (value system) personal dengan kandungan nilai dan tujuan penggunaan inovasi. Jadi nilai personal yang tercermin pada norma-norma pribadi pemakai inovasi merupakan sumber terbentuknya internalisasi.

2. Identifikasi

Identifikasi adalah individu menerima pengaruh sosial, karena individu bermaksud menciptakan (establish) atau memelihara (maintain) rasa senang,

nyaman atau pemuasan bagi dirinya dalam berhubungan dengan orang lain atau kelompok. Jadi pemeliharaan hubungan yang menyenangkan antara diri pemakai dengan orang lain merupakan sumber identifikasi.

### 3. Kepatuhan

Kepatuhan (compliance) adalah individu bersedia menggunakan inovasi karena dorongan untuk memperoleh imbalan atau menghindari hukuman atau sanksi dari kelompok, jika tidak menggunakan. Jelas bahwa sumber kepatuhan berbeda dengan internalisasi dan identifikasi. Sumber kepatuhan adalah norma sosial, karena jika tidak menggunakan atau menerima inovasi, target pemakai akan mendapat sanksi oleh kelompok referennya. Jika basis kepatuhan ini kuat, maka kesediaan menggunakan atau menerima inovasi, mengindikasikan pemakai cenderung asal melaksanakan kewajiban semata. Dengan demikian, secara teoritis kepatuhan berdampak negatif terhadap penerimaan inovasi.

Dalam literatur perilaku organisasi, dimensi kepatuhan tersebut disebut juga komitmen kontinuans (continuance commitment). Adapun dimensi internalisasi dan identifikasi disebut komitmen afektif (affective commitment). Secara teoritis, komitmen afektif (internalisasi dan identifikasi) dihipotesiskan berdampak positif terhadap penerimaan inovasi. Artinya, semakin kuat internalisasi dan identifikasi target pemakai terhadap tujuan penggunaan inovasi, maka semakin tinggi pula kecenderungannya untuk menerima inovasi. Pada konteks penerimaan dan penggunaan inovasi, pegawai dengan komitmen afektif yang kuat, menerima dan menggunakan inovasi. karena dia senang melakukannya. Adapun pegawai dengan komitmen kontinuans yang

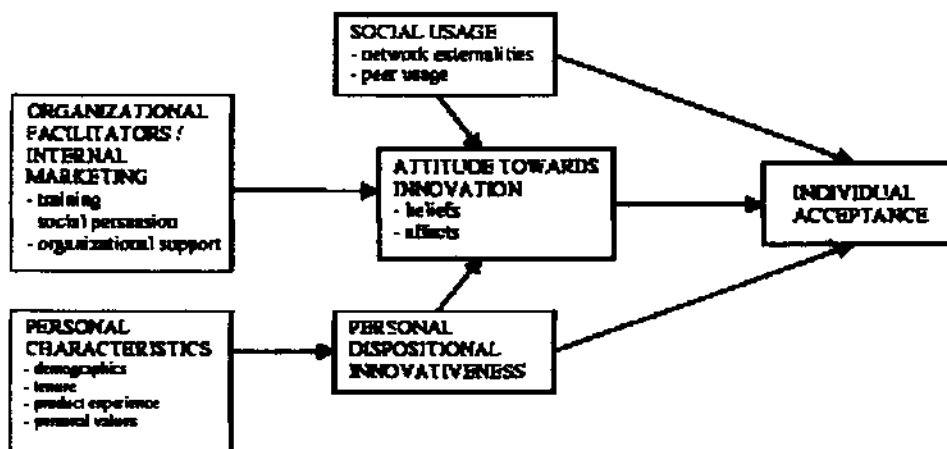
kuat, menerima dan menggunakan inovasi, karena dia merasa melakukannya adalah sebagai keharusan untuk memenuhi kebutuhan.

#### 2.2.4.4. Teori Penerimaan Inovasi oleh Individu dalam Organisasi (Individual Innovation Acceptance in Organizations)

Uraian mengenai teori TRA, TAM, dan teori sosial Kelman, di atas belum secara eksplisit menyebutkan faktor-faktor eksternal (di luar faktor individu) yang dapat menjelaskan penerimaan inovasi oleh individu dalam organisasi. Model yang diajukan Frambach dan Schillewaert (1999) berikut mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi anggota organisasi bersedia menerima inovasi, meliputi: (1) *internal marketing*; (2) karakteristik personal; dan (3) *social usage* (penggunaan inovasi dalam masyarakat luas) atau lingkungan sosial. Frambach dan Schillewaert (1999) mengajukan konseptual *framework* sebagai berikut:

Gambar 2.4.

#### *A Conceptual Framework of Individual Innovation Acceptance in Organizations*



Sumber: Frambach dan Schillewaert (1999)

Frambach dan Schillewaert menegaskan bahwa faktor *internal marketing*, keinovatifan individu, dan faktor lingkungan sosial mempengaruhi penerimaan

inovasi oleh individu dalam organisasi melalui variabel sikap. Ini berarti, tingkat penerimaan inovasi ditentukan bagaimana sikap target pemakai terhadap inovasi. Hasil studi pada level makro, seperti Ouda (2005) dan Olorilanto (2008), memperlihatkan bagaimana peran penting *internal marketing* dalam proses adopsi SAP di lembaga pemerintahan.

#### **2.2.4.4.1. Faktor Organisasional**

Beberapa studi menemukan bahwa penerimaan inovasi, bukan hanya tergantung dari sikap individu, akan tetapi juga oleh strategi manajemen, kebijakan dan upaya organisasi (Schillawaert, et al., 2001). Faktor organisasional dalam hal ini dapat dipandang sebagai *internal marketing* organisasi, yaitu upaya-upaya organisasi dalam mensosialisasikan, melatih, dan menyediakan layanan guna mendukung target pemakai dalam penggunaan inovasi. Dapat dianalogkan organisasi sebagai pemasar, sedangkan target pemakai sebagai pelanggan (Frambach dan Schillewaert, 1999). Lebih lanjut, Frambach dan Schillewaert (1999) mengidentifikasi beberapa variabel faktor organisasional yang berpengaruh positif terhadap pembentukan sikap dan keyakinan anggota organisasi terhadap inovasi, yaitu pelatihan, persuasi sosial dan dukungan teknis.

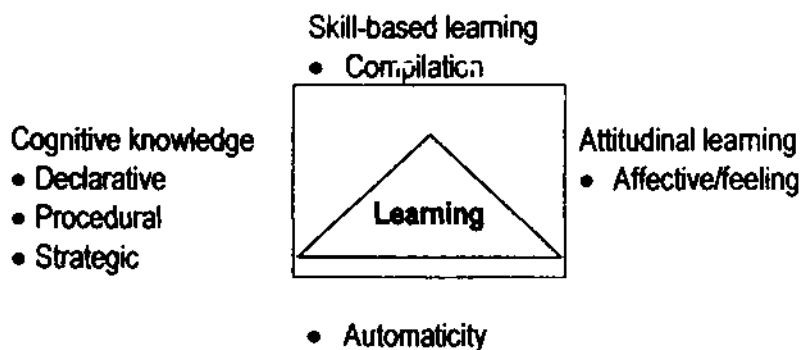
##### **1. Pelatihan**

Pelatihan adalah upaya organisasi memperbaiki pengetahuan dan ketrampilan kerja. Derajat dua elemen tersebut menunjukkan tingkat kemampuan seseorang yang dihasilkan dari proses pembelajaran melalui pelatihan. Blanchard dan Thacker (2003:8) menambahkan sikap (*attitude*) sebagai elemen kemampuan, sehingga output yang diharapkan dari pelatihan dalam implementasi inovasi

adalah peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap pegawai, atau KSAs (knowledge, skill, and attitude). Gambar berikut mengilustrasikan *outcome* dari pelatihan.

Gambar 2.5.

*Classification of Learning Outcomes*



Sumber: Blanchard and Thacker (2003:8)

Ketiga keluaran tersebut, menurut Blanchard dan Thacker (2003), meskipun saling terkait, akan tetapi ketiganya adalah berbeda. Pengetahuan mencerminkan tingkat pemahaman individu terhadap suatu realitas, oleh karena itu pengetahuan bersifat kognitif. Keterampilan adalah kapasitas yang diperlukan untuk menjalankan serangkaian tugas-tugas kecil yang dibentuk melalui pelatihan dan pengalaman. Keterampilan ini mencerminkan aspek motorik seseorang. Adapun sikap, adalah keyakinan atau pendapat yang mendukung atau menolak suatu perilaku. Sikap target pegawai sangat penting, karena dukungan terhadap implementasi inovasi akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi inovasi.

Blanchard dan Thacker (2003) membagi pengetahuan menjadi tiga kategori dan bersifat hierarkis, yaitu: pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural dan pengetahuan strategik.

- a. **Pengetahuan deklaratif** yaitu kumpulan informasi faktual yang tersimpan pada memori seseorang mengenai materi pembelajaran tertentu (subject matter). Indikator pengetahuan deklaratif adalah tingkat pemahaman atas substansi materi yang dipelajari.
- b. **Pengetahuan prosedural** yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan cara kerja atau aplikasi pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan ini selevel lebih tinggi dari pengetahuan deklaratif. Seseorang akan memiliki pengetahuan prosedural yang baik jika didasari pengetahuan deklaratif yang baik pula.
- c. **Pengetahuan strategis** merupakan tingkat pengetahuan tertinggi, karena membutuhkan akuisisi dua level pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan ini digunakan dalam perencanaan, monitoring dan perbaikan aktivitas yang diarahkan untuk mencapai tujuan (goal directed activity) dengan cara lebih efektif dan efisien. Individu yang memiliki pengetahuan strategis, dapat menentukan bagaimana cara menyelesaikan tugasnya dengan lebih baik.

Keluaran kedua dari pelatihan sebagai proses pembelajaran adalah ketrampilan. Blanchard dan Thacker (2003) membagi keterampilan menjadi dua level yaitu, kompilasi (level rendah) dan otomatis (level tinggi). Umumnya tingkat keterampilan seseorang, dimulai dari level rendah (kompilasi) dulu, baru level tinggi (otomatis). Keterampilan level kompilasi terbentuk pada tahap awal pembelajaran, dan meningkat ke level otomatis, ketika keterampilan tersebut diaplikasikan secara rutin dan terus menerus. Pada level kompilasi, seseorang masih berfikir dulu, dalam mengkoordinasikan antara gerakan fisik dengan pikirannya, ketika mengerjakan tugas tertentu. Namun ketika keterampilan berada

pada level otomatis, seseorang secara naluri mampu mengintegrasikan antara pikiran dan gerakan organ tubuhnya secara cepat atau dalam waktu bersamaan.

Dalam kondisi ideal, hasil pelatihan dalam rangka penerapan inovasi baru, adalah mampu memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta sikap positif pegawai terhadap penggunaan inovasi. Namun demikian, untuk memperoleh pengetahuan level strategik dan ketrampilan otomatis, bekal yang diperoleh dalam pelatihan harus dipraktekan secara rutin dan berulang-ulang pada konteks pelaksanaan pekerjaan secara aktual. Dengan demikian, level tertinggi dari kemampuan dan sikap pegawai adalah hasil pelatihan dan pengalaman. Lebih lanjut, Schillawaert, et al. (2001) menyatakan beberapa studi empiris membuktikan pelatihan berpengaruh positif terhadap sikap target pemakai atas penggunaan inovasi.

Pada konteks implementasi SAP untuk penyusunan LKPD, pemakai SAP pada SKPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur mendapat pelatihan dan bimbingan teknis, dari instansi vertikal seperti, BPK dan BPKP. Selain itu, dalam rangka sosialisasi penerapan SAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), juga mempublikasikan Buletin Teknis (Bultek) yang menjelaskan bagaimana penerapan SAP tersebut dalam penyusunan LKPD. Publikasi tersebut dapat diakses secara online pada situs [www.ksap.org.id](http://www.ksap.org.id).

## **2. Dukungan teknis**

Selain pelatihan, organisasi perlu memberikan dukungan teknis yang memadai agar implementasi inovasi berhasil (Frambach dan Schillewaert, 1999) . Dukungan teknis didefinisikan sebagai upaya-upaya yang mencerminkan sampai

sejauh mana organisasi menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung penggunaan inovasi (Schillawaert, et al., 2001). Upaya ini termasuk menyediakan pusat informasi untuk memberikan asistensi ketika implementasi telah berlangsung dan penyediaan peralatan pendukung sesuai kebutuhan. Misal dalam implementasi SAP dan LKPD, diperlukan dukungan teknologi informasi dan sistem informasi yang handal, yang mengintegrasikan antar unit kerja untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan tugas penatausahaan. Dukungan teknologi informasi umumnya, masih kurang memadai, misal seperti ditemukan studi Ouda (2005) dan saran dari Ketua BPK Anwar Nasution (2008). Oleh karena itu, dukungan teknis berpengaruh positif terhadap penerimaan inovasi, baik pada tahap awal implementasi maupun pada tahap selanjutnya.

### **3. Komitmen manajemen puncak**

Upaya lain adalah persuasi secara massif yang dilakukan organisasi. Schillawaert, et al. (2001) menggunakan istilah *implementation efforts* (upaya implementasi), yaitu seberapa intensif kampanye melalui *internal marketing* dan implementasi dilakukan organisasi sebagai agen pembaharu. Misal dorongan dan komitmen dari pimpinan puncak, serta keaktifannya untuk mempromosikan penggunaan inovasi ke seluruh unit organisasi. Secara umum, komitmen pimpinan puncak, merupakan faktor penting agar implementasi inovasi berhasil (Schillawaert, et al., 2001). Komitmen implementasi merupakan salah satu faktor kritis keberhasilan.

Pada konteks organisasi pemerintahan, sosialisasi ini berlangsung secara hierarkis oleh instansi vertikal, yaitu dari institusi yang ada di pemerintah pusat,



atau institusi level di atasnya. Dalam teori kontingensi Luder (Oliorilanto, 2008) persuasi sosial, seperti diidentifikasi Frambach dan Schillewaert (1999), merupakan bagian dari strategi implementasi oleh institusi pemerintah dalam program reformasi manajemen birokrasi.

Semua upaya yang dilakukan organisasi tersebut di atas, tidak lain adalah untuk membentuk sikap positif target pemakai inovasi. Berdasarkan penjelasan teoritis dari TAM dan TRA, maka peneliti menghipotesiskan bahwa faktor organisasional berpengaruh secara tidak langsung terhadap penerimaan inovasi melalui persepsi kemudahan dan persepsi manfaat.

#### **2.2.4.4.2. Faktor Karakteristik Individual**

Karakteristik individual target pemakai, meliputi demografis, masa kerja (tenure), pengalaman terhadap inovasi (product experience), dan nilai pribadi (personal values). Peneliti lain memasukkan tingkat pendidikan formal target pemakai sebagai unsur faktor individual.

Pada konteks penerimaan inovasi level individual, karakteristik personal menentukan tingkat keinovatifan seseorang (personal innovativeness) (Frambach dan Schillewaert, 1999), “tingkat dimana seseorang memakai ide baru lebih awal dibanding anggota masyarakat lainnya.” Ini berarti, setiap individu memiliki keinovatifan yang berbeda. Semakin inovatif seseorang, ada kecenderungan bersikap lebih terbuka dan mudah menerima ide-ide baru.

Pada konteks penerimaan inovasi oleh individu dalam organisasi, belum tentu individu yang lebih inovatif, lebih awal menerima inovasi, karena ada faktor

eksternal yang mengintervensi. Misal, pada konteks penerimaan aplikasi penyusunan LKPD berbasis SAP di SKPD di Pemprov Jawa Timur, individu yang menjadi target pemakai, ditentukan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, antara lain pengetahuan, kompetensi dan ketrampilan penyusunan LKPD berdasarkan ketentuan sebelumnya (Kepmendagri 29/2002). Pejabat yang telah ditunjuk sebagai target pemakai penyusunan LKPD berbasis SAP, ada keharusan menerima tugas yang diberikan pimpinan unit kerja. Lebih lanjut, keinovatifan individu merupakan variabel watak (*trait*) yang tidak tampak (*unobservable*), meskipun cenderung stabil melekat pada diri seseorang, akan tetapi relatif sulit teramati (Schillawaert, et al., 2001), sehingga sulit bagi pimpinan unit kerja untuk menilai tingkat keinovatifan seseorang. Oleh karena itu, dalam studi ini dipilih variabel pengalaman produk sebelumnya (*product experience*) yang lebih *observable*, sebagai representasi faktor karakteristik individual.

#### 2.2.4.4.3. Faktor Lingkungan Sosial

Faktor ketiga adalah *social usage* atau lingkungan sosial, yaitu penggunaan inovasi sejenis di lingkungan sekitar individu. Semakin banyak inovasi sejenis digunakan oleh orang-orang yang ada di lingkungan individu, maka kecenderungan individu untuk menerima inovasi semakin tinggi. Contoh, jika di lingkungan kerja telah banyak menggunakan teknologi internet, maka individu lain akan lebih mudah menerima inovasi teknologi internet.

Lingkungan sosial, dalam arti sempit adalah lingkungan kerja meliputi atasan dan rekan kerja dalam suatu unit kerja. Pada konteks penerimaan inovasi oleh individu dalam organisasi, variabel pengaruh sosial yang diidentifikasi berperan penting adalah atasan langsung dan rekan kerja (*peer usage*) (Schillawaert, et al., 2001). Hal ini sesuai dengan pemikiran dalam *theory reasoned action* bahwa minat berperilaku seseorang dipengaruhi oleh norma subyektif. Atasan langsung dan rekan kerja, merupakan sumber norma subyektif penting bagi target pemakai, karena terjadi interaksi yang intensif di dalam unit kerja. Dorongan, sikap, pendapat dari atasan langsung akan cenderung diikuti oleh bawahan yang menjadi target pemakai, karena selain ada hubungan struktural dalam organisasi, juga ada keyakinan bahwa mengikuti pendapat atasan akan lebih baik daripada menolaknya.

Lebih lanjut, rekan kerja juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap pembentukan sikap. Semakin banyak rekan kerja menggunakan inovasi, maka ada kecenderungan memperkuat sikap positif bagi rekan kerja lainnya. Hal ini dapat terjadi melalui mekanisme proses belajar dan komunikasi antar rekan kerja di lingkungan pekerjaan. Akan tetapi, pada studi ini peneliti memfokuskan pada pengaruh atasan langsung yaitu pimpinan unit kerja terhadap pembentukan sikap target pemakai. Hal ini sesuai dengan konteks studi ini, bahwa target pemakai inovasi penyusunan LKPD berbasis SAP adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) / Pembantu PPK-SKPD, pada masing-masing SKPD yang memiliki jumlah personalia terbatas, yaitu 2 – 3 orang. Sementara itu, interaksi antar PPK-SKPD dari unit kerja berbeda relatif rendah, sehingga dampaknya

terhadap pembentukan sikap bagi PPK-SKPD di unit kerja lain terbatas. Mengikuti pemikiran dalam model TRA, peneliti menghipotesiskan bahwa pimpinan unit kerja berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat inovasi penyusunan LKPD berbasis SAP. Peneliti tidak menghipotesiskan pimpinan unit kerja berpengaruh terhadap pembentukan persepsi kemudahan, karena secara faktual pimpinan unit kerja tidak mampu mempengaruhi kemudahan penggunaan aplikasi penyusunan LKPD berbasis SAP, hanya memberikan motivasi dan dorongan pegawai PPK-SKPD dalam penggunaan SAP dalam penyusunan LKPD.

## BAB 3

### KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

#### 3.1. Kerangka Konseptual

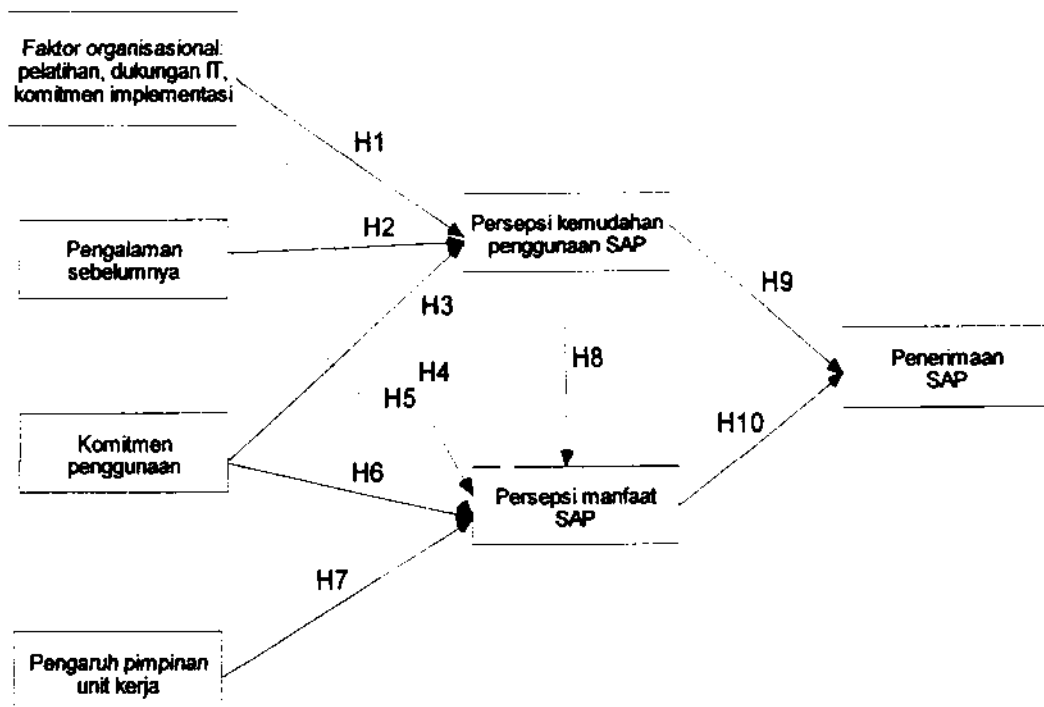
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor atau determinan yang mempengaruhi penerimaan SAP oleh target pemakai di SKPD Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Penyusunan LKPD berbasis SAP, adalah hal baru sehingga dapat digunakan perspektif inovasi dalam studi ini. Agar penerapan SAP dalam aktivitas pembukuan dan penyusunan LKPD berhasil, maka pemakai terlebih dahulu perlu memiliki sikap positif dan termotivasi untuk menerapkannya. Pemakai secara emosional harus menerima penerapan SAP tersebut.

Berdasarkan kajian teoritis dan hasil studi sebelumnya, penerimaan terhadap inovasi dipengaruhi oleh sikap berupa keyakinan (belief) dan afektif terhadap penggunaan inovasi tersebut (Frambach dan Schillewaert, 1999; Davis, 1989). Variabel teori TAM dan penerimaan inovasi oleh individu (Frambach dan Schillewaert, 1999), sikap terhadap inovasi adalah variabel penyalur (intervening) terhadap penerimaan individu (individual acceptance).

Terdapat dua variabel sikap penting, yaitu persepsi kemudahan penggunaan (ease of use) dan persepsi manfaat/kegunaan inovasi (perceived of usefulness). Dengan demikian, keberhasilan implementasi penyusunan laporan keuangan yang sesuai SAP sangat ditentukan bagaimana sikap target pemakai (end user), yaitu apakah hal tersebut mudah diterapkan dan memberikan manfaat lebih dibanding cara sebelumnya, yaitu sesuai Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002.

Berdasarkan berbagai kerangka teoritis dan temuan-temuan tersebut di atas, maka akan diuji faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan inovasi SAP di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Mengacu temuan studi sebelumnya, diidentifikasi tiga faktor yang diduga berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan penerimaan inovasi, yaitu faktor organisasional (internal marketing), faktor karakteristik individual dan pengaruh lingkungan sosial. Ditambah dengan teori Kelman, dimana komitmen pemakai berperan penting dalam proses terbentuknya sikap dan kecenderungan perilaku penggunaan, maka model konseptual penelitian ini diilustrasikan seperti pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1.  
Model Konseptual Penelitian



Sumber: Frambach dan Schillewaert (1999), Malhotra dan Galletta (2005), Sumiyama (2007)

Dari model konseptual dikonstruksi terdapat 10 jalur pengaruh langsung (path), sehingga secara keseluruhan ada 10 hipotesis jalur pengaruh langsung.

Penerimaan SAP sebagai variabel konsekuensi (outcome), yang dipengaruhi faktor organisasional, individual, dan lingkungan sosial melalui dua variabel sikap, yaitu persepsi kemudahan dan persepsi manfaat. Penjelasan bagaimana mekanisme pengaruh antar variabel dalam model konseptual adalah sebagai berikut:

*Pertama;* faktor organisasional, yaitu semua upaya organisasi untuk meningkatkan penguasaan dan mempromosikan inovasi ke semua unit organisasi. Upaya-upaya ini meliputi pelatihan, dukungan teknis, dan komitmen pimpinan organisasi dalam implementasi inovasi. Pelatihan terutama ditujukan untuk meningkatkan penguasaan dan ketrampilan menggunakan inovasi. Adapun dukungan teknis, meliputi antara lain pembentukan unit khusus yang diisi tenaga-tenaga ahli yang siap setiap saat memberikan layanan asistensi bagi pemakai inovasi. Dukungan teknis juga dapat dilihat dari ketersediaan peralatan-peralatan pendukung yang memadai untuk mengimplementasikan inovasi. Organisasi juga perlu memiliki komitmen yang kuat dan jelas terhadap keberhasilan implementasi inovasi. Semua upaya organisasi tersebut perlu dilakukan secara konsisten, baik sebelum implementasi ataupun ketika implementasi telah berlangsung. Melalui pelatihan, dukungan teknis, dan komitmen implementasi yang kuat, diharapkan ada perubahan sikap dan persepsi pemakai terhadap inovasi. Misal melalui pelatihan yang intensif, akan mempermudah penggunaan inovasi bagi pemakai, karena menyediakan bekal pengetahuan dan ketrampilan yang memadai untuk menggunakan inovasi tersebut. Tersedianya asistensi dan peralatan pendukung yang memadai, juga akan memperlancar dan mempermudah penggunaan inovasi, karena ketika terjadi kendala dalam implementasi dapat segera diatasi. Lebih

lanjut, promosi atau sosialisasi yang konsisten, akan memperkuat keyakinan pemakai terhadap nilai penting dan manfaat inovasi. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa upaya-upaya yang dilakukan organisasi tersebut di atas, secara langsung akan mempermudah penggunaan inovasi dan memperkuat keyakinan atas manfaat inovasi, sehingga dapat dihipotesiskan bahwa faktor organisasional berpengaruh positif terhadap persepsi kemudahan (ease of use) dan persepsi manfaat (perceived usefulness) (Frambach dan Schilawaert, 1999). Pada model konseptual, pengaruh faktor organisasional tersebut ditunjukkan jalur H1 dan H4.

**Kedua;** faktor individual, yaitu karakteristik personal anggota organisasi, meliputi demografis, masa kerja (tenure), pengalaman terhadap inovasi (product experience), dan nilai pribadi (personal values). Dalam studi ini difokuskan kepada dimensi *product experience*, yaitu pengalaman target pemakai terhadap praktek penyusunan laporan keuangan sebelumnya, berdasarkan Kepemdagri Nomer 29 tahun 2002 serta komitmen pegawai. Pengalaman sebelumnya berpengaruh terhadap sikap positif pemakai SAP, karena dua hal, yaitu (1) memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan serupa, sehingga mempermudah target pemakai dalam mempelajari inovasi baru, dan (2) memberikan dasar dalam membandingkan dengan inovasi baru, apakah lebih mudah dan lebih bermanfaat. Dengan demikian, pengalaman sebelumnya berpengaruh positif terhadap persepsi kemudahan dan persepsi manfaat SAP (Frambach dan Schilawaert, 1999). Pada model konseptual, pengaruh tersebut ditunjukkan dengan jalur H2 dan H5.

Lebih lanjut, menurut teori pengaruh sosial dari Kelman (Malhotra dan Galletta, 2005), dapat dijustifikasi bahwa komitmen pemakai terhadap pencapaian



tujuan penerapan inovasi SAP dalam penyusunan LKPD, merupakan variabel individual yang juga berpengaruh terhadap sikap penggunaan inovasi. Melalui mekanisme internalisasi dan identifikasi pemakai terhadap penggunaan SAP, akan memperkuat keikatan secara psikologis terhadap penggunaan SAP tersebut. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa semakin kuat internalisasi dan identifikasi pemakai terhadap penggunaan SAP, maka semakin kuat pula persepsi kemudahan dan persepsi manfaat penggunaan SAP (Malhotra dan Galletta, 2005; Sumiyama, 2007). Pada model konseptual pengaruh tersebut ditunjukkan oleh jalur H3 dan H6.

*Ketiga*, faktor pengaruh lingkungan sosial, yaitu orang-orang atau pihak-pihak yang berinteraksi intensif dan dijadikan kelompok acuan (*reference group*) bagi target pemakai. Dalam arti luas, lingkungan sosial ini bersumber dari pihak internal dan eksternal organisasi, namun dalam studi ini dibatasi pada lingkungan sosial yang berasal dari internal organisasi. Ada dua sumber referensi penting bagi target pemakai yang bersumber dari internal, yaitu rekan kerja dan atasan langsung, dan pada konteks penerimaan inovasi SAP, peneliti mengidentifikasi atasan langsung (pimpinan unit kerja), sebagai representasi faktor lingkungan sosial. Jika pimpinan unit kerja menilai bahwa SAP adalah penting dan bermanfaat, maka pegawai akan cenderung mengikutinya, sehingga dapat dihipotesis bahwa pimpinan unit kerja berpengaruh terhadap persepsi manfaat inovasi bagi target pemakai (Frambach dan Schilawaert, 1999). Pada model konseptual, pengaruh tersebut ditunjukkan oleh jalur H7.

**Keempat**, sikap target pemakai yang terbentuk dari pengaruh faktor organisasional, individual, dan lingkungan sosial, adalah persepsi kemudahan dan persepsi manfaat penggunaan SAP. Inovasi yang mudah dipelajari dan diterapkan, umumnya juga dipersepsi memberikan manfaat lebih besar, karena dinilai lebih efektif dan efisien (Schillawaert, et al., 2001). Dengan demikian, dapat dihipotesiskan bahwa semakin positif persepsi kemudahan SAP, maka semakin positif pula persepsi manfaat penggunaan SAP, dan pada model konseptual ditunjukkan pada jalur H8. Lebih lanjut, kedua variabel sikap tersebut akan mempengaruhi tingkat penerimaan target pemakai dalam penggunaan SAP. Semakin mudah SAP dipelajari dan digunakan (diterapkan), maka semakin tinggi pula kecenderungan penerimaannya. Pada model konseptual, pengaruh tersebut ditunjukkan oleh jalur H9 dan H10.

### **3.2. Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah dan penjelasan kerangka konseptual penelitian, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Faktor organisasional berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan SAP dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
2. Pengalaman dalam penyusunan laporan keuangan sebelumnya berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan SAP dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

3. Komitmen pegawai berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan SAP dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
4. Faktor organisasional berpengaruh terhadap persepsi manfaat SAP dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
5. Pengalaman dalam penyusunan laporan keuangan sebelumnya berpengaruh terhadap persepsi manfaat SAP dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
6. Komitmen pegawai berpengaruh terhadap persepsi manfaat SAP dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
7. Peran pimpinan unit kerja berpengaruh terhadap persepsi manfaat SAP dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
8. Persepsi kemudahan berpengaruh terhadap persepsi manfaat SAP dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
9. Persepsi kemudahan berpengaruh terhadap penerimaan SAP dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
10. Persepsi manfaat berpengaruh terhadap penerimaan SAP dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

## **BAB 4**

### **METODE PENELITIAN**

#### **4.1. Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data variabel diukur secara kuantitatif, melalui konversi data kualitatif menjadi skala angka. Penelitian ini termasuk *explanatory research*, karena bertujuan menguji hipotesis asosiatif yang diturunkan dari teori penerimaan inovasi oleh individu dalam organisasi melalui teknik statistik. Penelitian dirancang dengan metode *survey sample*, yang dimaksudkan untuk menggali informasi-informasi dari sebagian populasi untuk mewakili seluruh populasi. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel, sosiologi maupun psikologis (Sugiono, 2001:7).

Penelitian dilakukan dengan desain *cross section*, yaitu kegiatan penelitian dilakukan pada satu saat tertentu untuk menjelaskan kondisi responden pada saat dilakukan penelitian. Unit analisis penelitian ini adalah individu, karena nilai variabel penelitian mencerminkan respon dari subyek penelitian secara individual.

#### **4.2. Identifikasi Variabel**

Variabel penelitian terdiri dari variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen adalah faktor organisasional, faktor individual, dan lingkungan sosial. Adapun variabel endogen adalah persepsi karakteristik inovasi atau

variabel motivasional dan penerimaan inovasi. Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian, maka variabel-variabel penelitian ini adalah:

1. Variabel eksogen, meliputi:
  - a. Faktor organisasional (X1), terdiri dari tiga dimensi, yaitu: pelatihan, dukungan teknis, dan komitmen implementasi.
  - b. Komitmen pemakai (X2)
  - c. Pengalaman sebelumnya (X3)
  - d. Pengaruh pimpinan unit kerja (X4).
2. Variabel endogen, meliputi:
  - a. Persepsi kemudahan (*ease of use*) (Y1)
  - b. Persepsi manfaat (*usefulness*) (Y2)
  - c. Penerimaan inovasi (*acceptance*) (Y3)

#### 4.3. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel adalah sebagai berikut:

1. Faktor organisasional (X1) adalah upaya-upaya yang dilakukan organisasi (Pemerintah Provinsi Jawa Timur) untuk mendukung implementasi penyusunan LKPD sesuai SAP. Faktor organisasional ini meliputi dimensi pelatihan dan dukungan teknis. Operasionalisasi dan pengukuran faktor organisasional adalah sebagai berikut:
  - a. Pelatihan adalah upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kompetensi pegawai PPK-SKPD dalam pelaksanaan tugas-tugas akuntansi untuk penyusunan LKPD sesuai SAP. Indikator-indikator pelatihan diukur dalam skala Likert 5 interval.

- 1) Pelatihan intensif tentang SAP.
  - 2) Pelatihan intensif tentang penyusunan LKPD.
  - 3) Materi pelatihan penyusunan LKPD sesuai SAP meliputi:
    - a. Materi pelatihan SAP dan penyusunan LKPD tersedia lengkap dan mudah dipelajari.
    - b. Modul atau buku manual bahan ajar pelatihan berisi lengkap petunjuk penyusunan LKPD dan penerapan SAP.
    - c. Modul atau buku manual bahan ajar pelatihan mudah dipelajari.
  - 4) Instruktur pelatihan penyusunan LKPD sesuai SAP kompeten, meliputi:
    - a. Instruktur pelatihan LKPD dan SAP memiliki penguasaan yang baik terhadap materi.
    - b. Instruktur pelatihan LKPD dan SAP mampu menyampaikan materi dengan baik.
  - 5) Materi pelatihan penyusunan LKPD dan SAP sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas pekerjaan.
- b. Dukungan teknis, yaitu upaya-upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan sumber daya guna mendukung implementasi SAP. Variabel dukungan teknis diukur menurut persepsi terhadap 4 indikator berikut dalam skala Likert 5 interval.
- 1) Petugas tahu pasti kepada siapa harus bertanya manakala membutuhkan asistensi/bantuan dalam menyusun LKPD berbasis SAP.
  - 2) Tersedia unit yang siap setiap saat untuk memberikan asistensi dalam memecahkan kesulitan penyusunan LKPD berbasis SAP.
  - 3) Teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan penyusunan KPD.

- 4) Tersedia buku manual dan pedoman secara lengkap tentang bagaimana penyusunan LKPD sesuai SAP.
  - 5) Peralatan pendukung yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.
- c. Komitmen implementasi, diukur dalam empat indikator pada skala Likert 5 interval, yaitu:
- 1) Keinginan kuat untuk sukses dalam implementasi SAP.
  - 2) Upaya untuk mewujudkan keberhasilan implementasi SAP.
  - 3) Promosi intensif SAP ke semua unit kerja.
  - 4) Komitmen yang jelas untuk mencapai tujuan implementasi teknologi informasi umumnya dan SAP khususnya.
2. Pengalaman sebelumnya (X2) adalah pengalaman pemakai dalam pelaksanaan tugas-tugas akuntansi/pembukuan dan penyusunan LKPD dengan metode sebelumnya. Diukur dengan tiga indikator pada skala Likert 5 interval.
- a. Pengalaman pelaksanaan tugas-tugas akuntansi.
  - b. Pengalaman penyusunan LKPD sesuai ketentuan sebelumnya.
  - c. Penguasaan terhadap penggunaan komputer.
3. Komitmen pengguna (X3) adalah keikatan psikologis dan kepatuhan pemakai terhadap tujuan penyusunan LKPD berdasarkan SAP. Pada penelitian ini, komitmen pengguna diukur melalui komitmen afeksi yang terdiri dari internalisasi dan identifikasi pengguna terhadap tujuan penerapan SAP. Indikator untuk mengukur komitmen pengguna adalah:
- a. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak SAP dalam penyusunan SAP.
  - b. Saya merasa bersalah, jika hasil audit LKPD mendapat nilai jelek.

- c. Saya ikut bertanggung jawab untuk menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan berlaku.
  - d. Tujuan yang diinginkan dari penyusunan LKPD berbasis SAP, menurut saya adalah sesuatu penting.
  - e. Saya mendukung tujuan memenuhi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, maka LKPD harus disusun sesuai SAP.
  - f. Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang tercermin pada LKPD, sesuai dengan prinsip-prinsip yang saya yakini.
  - g. Saya bangga menerapkan SAP dalam penyusunan LKPD.
4. Pengaruh pimpinan unit kerja (X3) adalah intensitas pimpinan unit kerja dalam memotivasi, sikap kesetujuan, dan keyakinan terhadap manfaat SAP untuk penyusunan LKPD. Diukur dalam 4 indikator dalam skala Likert 5 interval.
- a. Pemotivasian pimpinan unit kerja dalam menggunakan SAP untuk menyusun LKPD.
  - b. Secara eksplisit mendukung terhadap implementasi SAP untuk menyusun LKPD untuk penyusunan anggaran.
  - c. Secara berulang-ulang menekankan pentingnya SAP untuk menyusun LKPD.
  - d. Pimpinan di unit kerja yakin terhadap manfaat SAP untuk menyusun LKPD.
5. Persepsi kemudahan (Y1), yaitu keyakinan bahwa SAP mudah diterapkan dalam penyusunan LKPD Diukur dengan 4 indikator pada skala Likert 5 interval.



- a. Tidak mengalami kesulitan dalam mempelajari SAP.
  - b. SAP mudah dipahami untuk penyusunan LKPD
  - c. Dengan berpedoman SAP, penyusunan LKPD menjadi mudah dilakukan.
  - d. Kesulitan penyusunan LKPD di unit kerja berkurang dengan menggunakan dasar SAP.
6. Persepsi manfaat (Y2), yaitu keyakinan pemakai bahwa SAP memiliki keunggulan guna menyusun LKPD dibanding ketentuan sebelumnya. Persepsi manfaat diukur dengan 5 indikator pada skala Likert 5 interval.
- a. SAP mempercepat penyelesaian penyusunan LKPD.
  - b. SAP meningkatkan kualitas informasi yang terkandung dalam LKPD.
  - c. SAP meningkatkan transparansi dan akuntabilitas LKPD.
  - d. SAP menghasilkan kualitas LKPD lebih baik.
  - e. SAP mengurangi potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
  - f. Penerapan SAP meningkatkan rasa aman bagi penyusun laporan keuangan.
7. Penerimaan SAP (Y3) adalah kondisi mental dalam rutinitas pelaksanaan tugas penatausahaan dan hasil kerja dari penggunaan SAP untuk menyusun LKPD. Diukur dengan 9 indikator pada skala Likert 5 interval.
- a. Dengan penerapan SAP, penyusunan LKPD menjadi lebih menyenangkan.
  - b. Dengan penerapan SAP untuk penatausahaan dan penyusunan LKPD, rasa enggan untuk melakukan tugas-tugas tersebut semakin berkurang.
  - c. Dengan penerapan SAP untuk penatausahaan dan penyusunan LKPD, semakin memotivasi pegawai untuk menjalankan tugas dengan lebih baik.
  - d. Dengan penerapan SAP untuk penatausahaan dan penyusunan LKPD, semakin memotivasi pegawai untuk meningkatkan kompetensinya.

- e. Dengan penerapan SAP untuk penatausahaan dan penyusunan LKPD, saya semakin memotivasi pegawai untuk memperdalam penguasaan dalam bidang akuntansi pemerintahan.
- f. Kesulitan penyusunan LKPD semakin berkurang.
- g. Kepuasan kerja pegawai meningkat sejak penerapan SAP.
- h. Produktivitas pelaksanaan tugas-tugas penatausahaan semakin baik.
- i. Kinerja pegawai dalam penyusunan LKPD semakin baik.

#### 4.4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian melalui kuesioner.

#### 4.5. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi penelitian adalah Pegawai Bagian Keuangan SKPD, pemakai SAP dan membantu penyusunan Laporan Keuangan SKPD yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan pembantunya.. PPK-SKPD dibantu oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran. Pembantu Bendahara Pengeluaran meliputi Pencatat Pembukuan, Pembuat Dokumen dan Pengurus Gaji. Tupoksi PPK-SKPD dan pembantunya yang berhubungan tugas akuntansi dan penatausahaan keuangan adalah:

Tabel 4.1.

#### Tupoksi PPK-SKPD dan Pembantunya

##### PPK-SKPD

1. Melaksanakan akuntansi SKPD.
2. Membuat Laporan Keuangan SKPD.
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan penatausahaan keuangan.

**Bendahara Pengeluaran**

1. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku Bendahara Pengeluaran.
2. Membuat Laporan Penyerapan Pengeluaran Bendahara Pengeluaran.
3. Memungut dan menyetorkan pajak.
4. Mencatat transaksi yang belum di-SPJ-kan ke dalam buku panjar.
5. Menandatangani SPP

**Bendahara Pengeluaran Pembantu**

1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh KPA
2. Mengajukan nota permintaan pembayaran kepada PA/KPA
3. Mengumpulkan bukti transaksi per hari
4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama KPA
5. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU
6. Memungut dan menyetor pajak serta mencatatnya ke dalam BKU
7. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ-kan ke dalam Buku Panjar
8. Membuat SPJ untuk kegiatan yang berada di bawah kewenangan KPA
9. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran
10. Membuat Laporan Penyerapan Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu

**Pencatat Pembukuan**

1. Mencatat semua transaksi yang dikelola Bendahara Pengeluaran di Buku Kas Umum termasuk Penerimaan dan Penyetoran Pajak.
2. Membuat SPJ untuk kegiatan yang dikelola Bendahara Pengeluaran.
3. Merekap laporan-laporan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

**Pembuat Dokumen**

1. Menyiapkan dan mengajukan SPP, baik SPP-UP/GU/TU, LS, dan Gaji.
2. Meneliti kelengkapan pengajuan SPP.
3. Meminta otorisasi SPP/SPJ kepada Bendahara Pengeluaran.
4. Melaksanakan pencatatan di Buku Register

**Pengurus Gaji**

1. Membuat daftar gaji
2. Mencatat seluruh transaksi gaji di BKU-Gaji
3. Mengumpulkan dan mengadministrasikan bukti pembayaran gaji
4. Membuat SPJ gaji
5. Menyetor kelebihan gaji ke Kantor Kas Daerah melalui Bank Jatim

Sumber: Biro Keuangan Setda Pemprop Jawa Timur (2008)

Selain itu PPK-SKPD juga dibantu oleh fungsi akuntansi dalam Jumlah PPK-SKPD dan pembantunya, tidak sama antar SKPD, dan pada penelitian ini, pada masing-masing SKPD akan diambil 3 orang, dengan metode non random sampel, sehingga jumlah sampel yang diharapkan adalah 132 orang. Jumlah ini sudah mencukupi untuk penggunaan alat analisis jalur. Dalam analisis jalur, jumlah sampel minimal yang disyaratkan adalah 5-10 jumlah parameter yang diestimasi (Ferdinand, 2002). Dari model konseptual dapat diketahui jumlah

parameter ada 19, yaitu 10 jalur, 6 kovarians, dan 3 residual ( $\epsilon_i$ ). Dengan demikian jumlah sampel minimal adalah 95 orang.

#### 4.6. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Survei, yaitu dengan mengirimkan kuesioner kepada responden terpilih.
2. Dokumentasi, data yang dikumpulkan melalui instrumen ini meliputi struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Buku Materi Pelatihan, publikasi media massa, Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penerapan SAP dan LKPD, dll.

#### 4.7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur adalah bentuk spesifik dari model persamaan struktural, dimana semua konstruk yang ada dalam model diukur sebagai *observed variable* (Garson, 2002). Langkah-langkah dari analisis jalur adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan model konseptual berbasis teori, seperti diilustrasikan pada kerangka konseptual.
2. Uji pengukuran variabel, meliputi uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan metode korelasi item-total, dan uji reliabilitas dilakukan dengan koefisien *alpha Cronbach*. Sesuai operasionalisasi konstruk penelitian ini, dimana masing-masing konstruk diukur secara multi item, maka jika item-item memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, dapat digunakan jumlah skor total item (*total aggregation approach*) untuk mewakili nilai konstruk.

### 3. Memeriksa asumsi model analisis jalur.

Garson (2002) menyebutkan bahwa secara umum analisis jalur memerlukan asumsi yang berlaku dalam analisis regresi. Lebih lanjut, Garson (2002) menyebutkan asumsi penting dari analisis jalur adalah:

- a) Linieritas hubungan kausal konstruk yang diuji, jika tidak memenuhi asumsi linieritas, maka variabel perlu ditransformasi terlebih dahulu.
  - b) Data berdistribusi normal.
  - c) Rekursif (panah satu arah) atau tidak ada hubungan *reciprocal* antar variabel endogen.
  - d) *Additivity*, yaitu tidak ada pengaruh interaksi antar konstruk.
  - e) Variabel berskala interval, jika digunakan regresi dalam analisis jalur.
  - f) Variabel *residual (unmeasured)* tidak berkorelasi dengan semua variabel yang menjadi penyebabnya.
  - g) Residual variabel endogen tidak berkorelasi dengan variabel endogen lain.
  - h) Multikolinieritas yang rendah.
  - i) Jumlah sampel yang cukup, yaitu tergantung jumlah parameter yang diestimasi, pedomannya adalah 5 – 10 kali parameter yang diestimasi.
- ### 4. Uji *good of fit index*
- ### 5. Uji signifikan koefisien jalur (koefisien beta) dan interpretasi hasil.

Untuk menguji hipotesis dilakukan pengujian signifikansi koefisien jalur (koefisien beta). Pengujian dilakukan pada  $\alpha$  5%, sehingga  $H_0$  ditolak jika diperoleh probabilitas (p) nilai  $t_{hitung} \leq 5\%$ . Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh terhadap masing-masing variabel endogen dilihat dari *squared multiple correlation ( $R^2$ )*.

## BAB 5

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### 5.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

##### 5.1.1. Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi

SAP merupakan metode baru dalam praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia. Meskipun telah diamanatkan dalam paket UU keuangan negara (UU Nomor 17/2003, UU Nomor 1/2004, UU Nomor 15/2004), PP 58/2005, dan Permendagri 13/2006, namun di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, implementasi SAP untuk penyusunan LKPD baru efektif dilaksanakan untuk tahun anggaran 2007. Hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Jawa Timur tahun 2007 oleh BPK memperoleh pendapat *disclaimer*, yang mengindikasikan penyusunan LKPD belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan SAP.

Berdasarkan Permendagri 13/2006, yang menjadi pemakai SAP adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD). Pejabat PPKD berada pada level pemerintah daerah, yaitu di Sekretariat Pemerintah Daerah, yang juga menjadi Bendahara Umum Daerah, dan di level SKPD yang disebut juga PPK-SKPD. Laporan keuangan pemerintah daerah, sesuai Permendagri 13/2006, yang menjadi aturan pelaksanaan PP No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di lingkungan Departemen Dalam negeri, disusun Pejabat SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) yang berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah

(SEKDA). LKPD merupakan laporan rekonsialisasi dari Laporan Keuangan dari masing-masing SKPD (LK-SKPD).

Seperti diamanatkan dalam Permendagri 13/2006, setiap pemerintah daerah diwajibkan menyusun sistem penatausahaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemprov Jawa Timur, melalui Biro Keuangan menerbitkan buku manual tentang Penatausahaan Keuangan Daerah bagi Pengelola Dana APBD di Lingkungan Pemerintah Jawa Timur pada setiap tahun anggaran. Misal untuk tahun anggaran 2008, diatur periodisasi pelaporan laporan keuangan bagi SKPD. Menurut ketentuan tersebut, periode pelaporan keuangan pemerintah daerah dibedakan menjadi laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran, dan laporan tahunan.

#### 1. Laporan Bulanan

Laporan Realisasi Pendapatan wajib di sampaikan oleh SKPD yang mempunyai pendapatan kepada SKPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan anggaran berkenaan berakhir.

#### 2. Laporan Triwulan

SKPD wajib menyampaikan Laporan Realisasi APBD dan Neraca Saldo kepada SKPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan anggaran berkenaan berakhir.

#### 3. Laporan Semesteran

SKPD wajib menyampaikan Laporan Realisasi APBD dan Prognosis 6 bulan berikutnya kepada SKPKD maksimal 7 hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir. SKPKD diwajibkan untuk menyusun

Laporan Realisasi APBD Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Prognosis 6 bulan berikutnya atas dasar Laporan Realisasi APBD dan Prognosis 6 bulan berikutnya dari masing-masing SKPD. Untuk SKPKD batas maksimal penyelesaian Laporan Realisasi APBD dan Prognosis 6 bulan berikutnya ini adalah 15 hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

#### 4. Laporan Tahunan

SKPD diwajibkan menyerahkan laporan keuangan berupa:

- Neraca
- Laporan Realisasi APBD
- Catatan atas Laporan Keuangan

kepada SKPKD paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir. Apabila batas akhir tanggal penyampaian laporan keuangan dari SKPD kepada SKPKD jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan keuangan tersebut dimajukan satu hari sebelum batas waktu penyampaian laporan keuangan. Selanjutnya SKPKD diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah Propinsi Jawa Timur berupa ;

- Neraca
- Laporan realisasi APBD
- Laporan Arus Kas
- Catatan atas Laporan Keuangan

atas dasar laporan keuangan dari masing-masing SKPD. Batas maksimal penyusunan laporan keuangan oleh SKPKD adalah 3 bulan setelah tahun



anggaran berkenaan berakhir. Batas maksimal penyampaian laporan keuangan oleh SKPKD kepada BPK 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dokumen sumber merupakan dokumen yang di gunakan sebagai dasar untuk pencatatan transaksi pada jurnal akuntansi.

1. Dokumen sumber untuk penerimaan kas dari pendapatan adalah ;
    - Surat Tanda Setoran/STS
    - Nota Kredit
    - Bukti Lainnya yang Sah
  2. Dokumen sumber untuk pengeluaran kas untuk belanja dan pembiayaan adalah ;
    - Surat Perintah Pencairan Dana Langsung [SP2D-LS]
    - Persetujuan Penggunaan SP2D UP/GU/TU
  3. Dokumen sumber untuk pengeluaran kas non belanja adalah SP2D UP/GU/TU.
- Dokumen sumber untuk transaksi selain kas adalah Pengesahan Bukti Memorial [PBM]

### **5.1.2. Karakteristik Responden**

Penelitian ini menggunakan teknik sampel. Jumlah sampel yang digunakan adalah 102 orang pegawai bagian keuangan di 37 SKPD di Pemerintah Propinsi Jawa Timur berlokasi di Surabaya, meliputi 22 Dinas, 12 Badan dan 2 Kantor dan 1 Sekretariat DPRD. Tabel berikut menyajikan distribusi sampel penelitian.

Tabel 5.1.  
Distribusi Sampel per SKPD

INSTANSI/SKPD	Jumlah	%	INSTANSI/SKPD	Jumlah	%
Badan Arsip	2	2.0	Dinas Pariwisata	3	2.9
Badan Kesatuan Bangsa	2	2.0	Dinas Pemuda Dan Olahraga	3	2.9
Badan Ketahanan Pangan	3	2.9	Dinas Pendapatan	3	2.9
Badan Penanaman Modal	2	2.0	Dinas Pengairan	3	2.9
Badan Pengawasan	2	2.0	Dinas Perhubungan	3	2.9
Badan Perpustakaan	2	2.0	Dinas Perikanan & Kelautan	3	2.9
Balitbang	3	2.9	Dinas PERINDAG	3	2.9
Bandiklat	3	2.9	Dinas Perkebunan	3	2.9
Bapedal	2	2.0	Dinas Permukiman	3	2.9
Bapemas	3	2.9	Dinas Pertanian	3	2.9
Bappeprop	2	2.0	Dinas Peternakan	3	2.9
BPDE	3	2.9	Dinas Pu Bina Marga	3	2.9
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	3	2.9	Dinas Sosial	3	2.9
Dinas Infokom	3	2.9	Dinas Tenaga Kerja	3	2.9
Dinas Kehutanan	3	2.9	DLLAJ	3	2.9
Dinas Kependudukan	3	2.9	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2	2.0
Dinas Kesehatan	3	2.9	KASDA	2	2.0
Dinas Koperasi	3	2.9	SEKRETARIAT DPRD	3	2.9
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	2.9	Total	102	100.0

Sumber: Tabulasi Jawaban responden

Selanjutnya tabel berikut menyajikan jabatan yang menjadi responden penelitian.

Tabel 5.2.  
Jabatan Responden

Jabatan	Jumlah	%
PPK-SKPD/KASUBAG KEU	30	29.5
BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	28	27.4
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU / STAF	1	1
FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	28	27.4
PENCATAT PEMBUKUAN/STAF KEU	10	9.8
PEMBUAT DOKUMEN/STAF KEU	5	4.9
Total	102	100

Sumber: Jawaban Responden

## 5.2. Validitas dan Reliabilitas

Sebelum data dianalisis, baik secara deskriptif maupun inferens, perlu dilakukan pengujian kualitas instrumen, yaitu melalui uji validitas dan reliabilitas. Valid berarti alat ukur (instrumen) yang digunakan mengumpulkan data dapat secara tepat merekam apa yang sesungguhnya diukur atau dengan kata lain, instrumen yang digunakan mampu menghasilkan data sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Adapun reliabilitas mencerminkan keajegan atau konsistensi dari alat ukur, ketika digunakan secara berulang-ulang untuk kelompok subyek yang sama. Jika hasilnya konsisten, maka alat ukur tersebut dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi.

Banyak metode untuk uji validitas (Malhotra, 1996), dan pada penelitian ini digunakan pendekatan uji validitas konstruk. Pada pendekatan ini, pertanyaan pokoknya adalah “apakah instrumen yang digunakan secara tepat mengukur makna konsep dari konstruk yang diukur”. Misal, jika yang diuji adalah konstruk kemudahan penggunaan (ease of usage) SAP, maka pertanyaan pokoknya adalah “apakah instrumen (item-item kuesioner) yang digunakan mengukur konstruk kemudahan penggunaan SAP, secara tepat mengukur makna konstruk tersebut”. Teknik untuk uji validitas konstruk, antara lain dengan melihat signifikansi korelasi item-total dan signifikansi korelasi item total terkorelasi (*corrected item-total correlation*). Pada penelitian ini digunakan teknik *corrected item-total correlation*, karena dinilai lebih ketat (*rigid*) dalam melihat validitas suatu instrumen, dibanding korelasi item-total. *Corrected item-total correlation*, yaitu korelasi skor item dengan skor total item-item yang lain yang digunakan mengukur konstruk. Kriteria uji validitas konstruk adalah jika  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$  dengan

*degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-1$ . Jika pada penelitian ini digunakan sampel ( $n$ ) = 102, maka  $df = 101$ . Karena dalam tabel statistik tidak tersedia informasi  $r_{tabel}$  pada  $df = 101$ , maka digunakan  $df$  lebih kecil yaitu = 100, dan diperoleh  $r_{(0,05;100)} = 0,195$ . Hasil uji validitas kuesioner untuk masing-masing kategori konstruk disajikan pada Tabel 5.3 dan Tabel 5.4.

Tabel 5.3.  
Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel bebas

Konstruk/indikator	Simpulan	r
<b>Faktor organisasional (X1)</b>		
1. Saya mendapat pelatihan intensif dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.	PLT1	0,654
2. Saya mendapat pelatihan intensif tentang penyusunan LKPD.	PLT2	0,665
3. Tersedia buku-buku teks, kumpulan peraturan atau petunjuk teknis yang lengkap dan mudah dipelajari dalam pelatihan tugas penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan SKPD dan SAP.	PLT3	0,707
4. Modul atau buku manual sebagai bahan ajar pelatihan berisi lengkap petunjuk penyusunan LKPD dan penerapan SAP.	PLT4	0,581
5. Modul atau buku manual sebagai bahan ajar pelatihan mudah dipelajari.	PLT5	0,697
6. Instruktur pelatihan LKPD dan SAP adalah memiliki penguasaan yang baik terhadap materi.	PLT6	0,716
7. Instruktur pelatihan LKPD dan SAP mampu menyampaikan materi dengan baik.	PLT7	0,708
8. Sebagian besar materi pelatihan penyusunan LKPD dan SAP dapat saya terapkan dalam pekerjaan saya.	PLT8	0,512
9. Petugas tahu pasti kepada siapa harus bertanya manakala membutuhkan asistensi/bantuan dalam menyusun LKPD berbasis SAP.	DKT1	0,438
10. Tersedia unit yang siap setiap saat untuk memberikan asistensi dalam memecahkan kesulitan penyusunan LKPD berbasis SAP.	DKT2	0,439
11. Teknologi informasi saat ini, memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan penyusunan LKPD dan SAP.	DKT3	0,508
12. Tersedia buku manual dan pedoman secara lengkap tentang bagaimana penyusunan LKPD sesuai SAP.	DKT4	0,697
13. Jika diperlukan peralatan pendukung yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, segera dipenuhi.	DKT5	0,465
14. Jajaran pimpinan Pemerintah Propinsi Jawa Timur memiliki keinginan yang kuat terhadap keberhasilan implementasi SAP.	KI1	0,529
15. Secara konsisten, Pemerintah Propinsi Jawa Timur berupaya keras untuk mewujudkan keberhasilan implementasi SAP.	KI2	0,304
16. Jajaran pimpinan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, mempromosikan secara intensif SAP ke semua unit kerja.	KI3	0,562
17. Pemerintah Propinsi Jawa Timur menunjukkan komitmen yang jelas dalam mencapai tujuan implementasi SAP untuk penyusunan laporan keuangan.	KI4	0,264
<b>Pengalaman pelaksanaan tugas sejenis sebelumnya (X2)</b>		
18. Sebelum menempati posisi yang sekarang, saya telah sering mengerjakan tugas-tugas penatausahaan atau akuntansi di tempat kerja saya.	PGL1	0,704

19. Sebelum menempati posisi yang sekarang, saya sering mengerjakan tugas penyusunan laporan keuangan, misal membuat neraca dan laporan realisasi anggaran di SKPD saya.	PGL2	0,719
20. Sebelum menempati posisi yang sekarang, saya cukup memahami prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan.	PGL3	0,701
21. Sebelum menempati posisi yang sekarang, saya sudah terbiasa bekerja dengan menggunakan komputer.	PGL4	0,539
<b>Komitmen pengguna (X3)</b>		
22. Saya merasa cocok dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam SAP.	KPG1	0,580
23. Saya merasa bersalah, jika hasil audit laporan keuangan dinilai kurang baik.	KPG2	0,444
24. Saya ikut bertanggung jawab dalam penyusunan LKPD yang sesuai SAP.	KPG3	0,694
25. Secara pribadi, saya mendukung tujuan penyusunan LKPD berbasis SAP, menurut saya adalah sesuatu penting.	KPG4	0,625
26. Saya mendukung tujuan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, maka LKPD harus disusun sesuai SAP.	KPG5	0,682
27. Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang tercermin pada LKPD, sesuai dengan prinsip-prinsip yang saya yakini.	KPG6	0,447
28. Saya bangga, jika mampu penyusunan LKPD sesuai SAP.	KPG7	0,552
<b>Pengaruh pimpinan unit kerja (X4)</b>		
29. Pimpinan di unit kerja saya, senantiasa memotivasi saya untuk melaksanakan tugas pembuatan laporan keuangan sesuai ketentuan SAP.	PUK1	0,827
30. Secara eksplisit, pimpinan unit kerja saya mendukung penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan.	PUK2	0,888
31. Secara eksplisit, pimpinan unit kerja saya menunjukkan pentingnya penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP.	PUK3	0,927
32. Secara eksplisit, pimpinan unit kerja saya menunjukkan keyakinannya bahwa SAP memiliki manfaat yang lebih baik untuk penyusunan laporan keuangan dibanding ketentuan sebelumnya.	PUK4	0,890

Sumber: Output SPSS (Lampiran 3)

Keterangan:  $r = \text{corrected item-total correlation}$

Dari Tabel 5.3 diketahui bahwa *corrected item-total correlation* masing-masing item untuk mengukur variabel penelitian  $> r_{\text{tabel}} = 0,195$ . Berdasarkan hasil korelasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap item yang digunakan untuk mengukur konstruk Propinsi Jawa Timur memiliki validitas yang baik, dalam arti secara tepat mengukur makna konstruk pada masing-masing variabel. Selanjutnya untuk validitas konstruk validitas terikat (endogen), meliputi persepsi kemudahan, persepsi manfaat dan penerimaan SAP oleh pegawai/pengguna disajikan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4.  
Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Terikat

Variabel / indikator	Kode	r
<b>Kemudahan</b>		
1. Saya tidak mengalami kesulitan dalam mempelajari SAP.	EOU10	0,552
2. Ketentuan-ketentuan SAP mudah diterapkan.	EOU20	0,644
3. Dengan berpedoman pada SAP, penyusunan laporan LKPD lebih mudah dilakukan.	EOU30	0,687
4. Dengan berpedoman pada SAP, tugas penatausahaan di SKPD saya lebih mudah dilaksanakan.	EOU40	0,632
<b>Manfaat SAP</b>		
5. SAP mempercepat penyelesaian penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.	PU1	0,513
6. LKPD berbasis SAP meningkatkan kualitas informasi LKPD.	PU2	0,723
7. LKPD berbasis SAP meningkatkan transparansi pemerintahan daerah.	PU3	0,753
8. LKPD berbasis SAP meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.	PU4	0,788
9. Penerapan SAP dalam penatausahaan dan penyusunan LKPD mengurangi potensi penyimpangan penggunaan anggaran.	PU5	0,393
10. Penerapan SAP dalam penatausahaan dan penyusunan LKPD meningkatkan rasa aman bagi penyusun laporan keuangan.	PU6	0,616
<b>Penerimaan SAP</b>		
11. Dengan penerapan SAP, membuat penyusunan LKPD menjadi lebih menyenangkan.	ACC10	0,635
12. Dengan penerapan SAP untuk penatausahaan dan penyusunan LKPD, rasa enggan untuk melakukan tugas-tugas tersebut semakin berkurang.	ACC20	0,666
13. Dengan penerapan SAP untuk penatausahaan dan penyusunan LKPD, saya semakin termotivasi untuk dapat menjalankan tugas tersebut dengan lebih baik.	ACC30	0,602
14. Dengan penerapan SAP untuk penatausahaan dan penyusunan LKPD, saya semakin termotivasi untuk meningkatkan kompetensi saya dalam tugas tersebut.	ACC40	0,611
15. Dengan penerapan SAP untuk penatausahaan dan penyusunan LKPD, saya semakin termotivasi untuk memperdalam penguasaan dalam bidang akuntansi pemerintahan.	ACC50	0,734
16. Kesulitan dalam penyusunan LKPD semakin berkurang, sejak digunakannya SAP.	ACC60	0,610
17. Saya merasa kepuasan kerja saya semakin meningkat sejak penerapan SAP dalam penyusunan LKPD.	ACC70	0,742
18. Saya merasa produktivitas pelaksanaan tugas-tugas penatausahaan semakin baik sejak penerapan.	ACC80	0,710
19. Saya merasa kinerja saya dalam penyusunan LKPD menjadi semakin baik sejak penerapan SAP.	ACC90	0,735

Sumber: Output SPSS (Lampiran 3)

Keterangan:  $r = \text{corrected item-total correlation}$

Tampak bahwa *corrected item-total correlation* masing-masing item/indikator pada masing-masing variable bernilai  $> r_{\text{tabel}}$ . Untuk variable persepsi kemudahan, nilai terendah 0,552, sehingga 4 item yang digunakan untuk

mengukur persepsi kemudahan adalah valid. Untuk variabel persepsi manfaat, 6 item yang digunakan terbukti valid, dengan nilai korelasi terendah sebesar 0.393. Demikian pula untuk variable penerimaan SAP, 9 item yang digunakan mengukur variabel tersebut juga terbukti valid, dengan nilai korelasi item-total terendah sebesar 0,602. Dengan demikian, tidak dilakukan eliminasi item, dalam arti semua item digunakan dalam menentukan skor rata-rata untuk analisis lebih lanjut. Adapun hasil uji reliabilitas item disajikan pada Tabel 5.5 berikut.

Tabel 5.5.  
Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner

Variabel	Alpha
Faktor organisasional	0,899
Pengalaman sebelumnya	0,833
Komitmen pengguna	0,823
Pengaruh pimpinan	0,952
Persepsi kemudahan	0,811
Persepsi manfaat	0,842
Penerimaan	0,900

Sumber: Output SPSS (Lampiran 3).

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui keandalan / konsistensi instrumen (kuesioner) yang digunakan. Secara teoritis, hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam berapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelas subyek yang sama diperoleh jawaban yang relatif sama. Pendekatan yang digunakan menguji reliabilitas instrumen pada penelitian ini adalah metode konsistensi internal (internal consistency). Metode ini didasarkan pada koefisien Alpha Cronbach ( $\alpha$ ). Nilai  $\alpha > 0,60$  merupakan *cut off value* untuk menilai derajat reliabilitas instrumen. Pendekatan alpha Cronbach, mengasumsikan bahwa pengulangan pengukuran diwakili oleh penggunaan multi item, artinya item-item tersebut mencerminkan pengulangan pengukuran.

Berdasarkan uji reliabilitas, diketahui bahwa item-item tiap variabel mempunyai tingkat reliabilitas yang tinggi. Sehubungan dengan terpenuhi kriteria validitas dan reliabilitas item, maka dalam analisis lebih lanjut untuk pengujian model konseptual, masing-masing variabel akan diwakili oleh skor total variabel atau *total aggregation approach* dapat digunakan.

### 5.3. Deskripsi Variabel Penelitian

Selanjutnya berdasarkan jawaban tersebut diringkas dalam ukuran statistik *tendency central* rata-rata hitung dan standar deviasi untuk setiap item pertanyaan. Mengacu pada model analisis penelitian, maka uraian deskripsi variabel penelitian dikelompokkan berdasarkan klasifikasi variabel eksogen dan variabel endogen. Untuk memberikan interpretasi terhadap nilai rata-rata pada masing-masing item/indikator atau variabel, terlebih dahulu ditentukan batasan rentang skala. Seperti dijelaskan dalam pengukuran variabel, pada ini setiap indikator/variabel diukur dengan skala Likert 5 interval. Nilai 1 mencerminkan derajat terendah dan nilai 5 menunjukkan derajat tertinggi. Penentuan batas rentang skala ini diperlukan agar data variabel dapat interpretasi secara kualitatif. Batasan rentang skala dapat diperoleh dengan formula: Rentang Skala =  $n(m-1)/m$  (Umar, 1998:132), yang mana  $n$  = jumlah sampel dan  $m$  = jumlah alternatif jawaban. Pada skala 1-5, jika membobot  $n = 1$ , maka diperoleh rentang skala sebesar 0,80, sehingga diperoleh lima interval dan interpretasi sebagai berikut:  $1 \leq X \leq 1,80$  (sangat rendah);  $1,80 < X \leq 2,60$  (rendah);  $2,60 < X \leq 3,40$  (sedang);  $3,40 < X \leq 4,20$  (tinggi);  $4,20 < X \leq 5,00$  (sangat tinggi). Statistik deskriptif untuk variabel



penelitian disajikan pada Tabel 5.6, dan hasil lebih rinci per item kuesioner disajikan pada Lampiran 4.

Tabel 5.6.

## Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
1. Faktor organisasional (X1)	102	2,53	4,88	3,85	0,47
2. Pengalaman sebelumnya (X2)	102	2,00	5,00	3,57	0,67
3. Komitmen pengguna (X3)	102	3,00	5,00	3,90	0,48
4. Pengaruh pimpinan (X4)	102	2,00	5,00	3,70	0,83
5. Persepsi kemudahan (Y1)	102	2,50	5,00	3,63	0,59
6. Persepsi manfaat (Y2)	102	2,67	5,00	3,79	0,50
7. Penerimaan SAP (Y3)	102	2,44	4,78	3,67	0,50

Sumber: Jawaban Responden (Lampiran 4)

### 1. Faktor organisasional

Memperhatikan statistik deskriptif pada tabel di atas, dapat diinterpretasi bahwa persepsi responden terhadap faktor organisasional (pelatihan, dukungan teknis, komitmen implementasi) termasuk tinggi, yang ditunjukkan dengan skor rata-rata 3,85. Untuk dimensi pelatihan, item yang mendapat penilaian terendah adalah "modul atau buku manual sebagai bahan ajar pelatihan mudah dipelajari", dengan skor rata-rata 3,65, dan yang tertinggi adalah indikator intensitas pelatihan SAP, dengan skor rata-rata 4,09. Selanjutnya untuk dimensi dukungan teknis, nilai terendah adalah tersedianya tim teknis yang tersedia setiap saat untuk memberikan asistensi kepada pegawai ketika menghadapi masalah dalam penggunaan SAP (rata-rata 3,71) dan tertinggi adalah indikator penggunaan teknologi informasi untuk mendukung implementasi SAP (rata-rata 3,78). Adapun untuk dimensi komitmen implementasi, nilai tertinggi adalah "keinginan yang kuat dari jajaran pimpinan Pemerintah Propinsi Jawa Timur terhadap keberhasilan implementasi SAP" (rata-rata 4,07) dan terendah adalah komitmen yang jelas dalam mencapai

tujuan implementasi SAP untuk penyusunan laporan keuangan (skor rata-rata 3,89). Berdasarkan jawaban responden atas faktor organisasional tersebut, menunjukkan bahwa upaya *internal marketing* yang dilakukan Pemprov Jawa Timur dalam rangka implementasi SAP, sudah baik dalam arti telah memberikan pelatihan, dukungan sumber daya, serta komitmen untuk mendorong keberhasilan implementasi SAP.

## **2. Pengalaman pelaksanaan tugas sejenis sebelumnya**

Variabel kedua adalah pengalaman pelaksanaan tugas sejenis oleh pemakai SAP sebelumnya. Secara umum, pegawai yang saat ini menjadi pemakai SAP di SKPD Pemprop Jawa Timur telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas sejenis sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata 3,57. Tampak bahwa dari 4 item yang digunakan, 3 item menunjukkan nilai yang tinggi. Adapun satu item, yaitu pemahaman atas memahami prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan termasuk pada kategori sedang (rata-rata 3,31). Skor tertinggi dari variabel pengalaman pelaksanaan tugas sejenis sebelumnya adalah dalam hal penggunaan komputer (rata-rata 3,89). Namun demikian, jika dibandingkan dengan skor rata-rata variabel yang tampak bahwa variabel pengalaman ini memiliki nilai terendah.

## **3. Komitmen pengguna**

Komitmen pengguna berperan penting untuk mendukung keberhasilan implementasi suatu inovasi baru dalam organisasi. Pada penelitian ini, komitmen

pengguna mencerminkan keikatan pemakai terhadap tujuan-tujuan yang diharapkan dari implementasi SAP. Tampak bahwa secara umum, pegawai yang menjadi pemakai SAP untuk penyusunan LKPD di SKPD-nya menunjukkan komitmen yang kuat, seperti ditunjukkan oleh skor rata-rata 3,90. Dari 7 item variable komitmen pengguna, semuanya memperoleh nilai yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki internalisasi dan identifikasi yang kuat dengan tujuan penerapan SAP, yaitu menciptakan transparansi dan akuntabilitas birokrasi, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh rata-rata jawaban responden yang tinggi untuk item "Secara pribadi, saya mendukung tujuan penyusunan LKPD berbasis SAP" dan "dukungan atas tujuan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, melalui penyusunan LKPD yang sesuai SAP" dengan skor rata-rata 4,11.

#### **4. Pengaruh pimpinan di unit kerja**

Pada konteks implementasi inovasi di organisasi, lingkungan sosial di tempat kerja turut berperan penting, antara lain yang ditunjukkan oleh peran pimpinan unit kerja atau atasan langsungnya. Dari statistik deskriptif, tampak bahwa variabel pengaruh pimpinan tersebut mendapat penilaian yang tinggi, yaitu dengan skor rata-rata 3,70. Empat indikator yang digunakan mendapat skor rata-rata 3,64-3,73 ( $> 3,40$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa pimpinan unit kerja senantiasa memotivasi bawahannya dalam penyusunan LKPD yang sesuai dengan SAP, secara eksplisit setuju dan mendukung implementasi SAP, konsisten

menekankan pentingnya SAP, dan yakin terhadap SAP memiliki manfaat lebih untuk penyusunan LKPD di SKPD-nya.

### **5. Persepsi kemudahan (ease of use)**

Persepsi kemudahan menunjukkan sampai seberapa SAP mudah digunakan dengan usaha-usaha yang minimal. Berdasarkan statistik deskriptif, secara umum responden “setuju” bahwa SAP mudah digunakan, seperti tercermin dari nilai rata-rata masing-masing indikator pada kisaran 3,45-3,78 ( $>3,40$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa responden “setuju” terhadap 4 item variabel persepsi kemudahan, dalam arti setuju bahwa program SAP mudah dipahami, mudah dipelajari, dan kelengkapan item-item anggaran.

### **6. Persepsi manfaat**

Persepsi manfaat mencerminkan seberapa besar implementasi SAP memiliki manfaat lebih baik dalam penyusunan LKPD, dibanding dengan ketentuan sebelumnya. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, secara umum responden menyatakan “setuju” bahwa program SAP memiliki manfaat lebih baik. Hal ini ditunjukkan oleh skor rata-rata dari 6 indikator pada kisaran 3,60-3,97 ( $> 3,40$ ). Ini berarti responden “setuju” bahwa implementasi SAP dapat mempercepat penyelesaian penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas informasi yang terkandung dalam LKPD, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas LKPD, menghasilkan kualitas LKPD lebih baik, dan mengurangi potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

## **7. Penerimaan SAP oleh pegawai (acceptance)**

Penerimaan (acceptance) suatu inovasi baru diawali oleh ketersediaan individu menerima secara mental, tidak adanya keengganan menggunakan, perasaan senang, penguasaan penggunaan inovasi, dan peningkatan hasil kerja dari menggunakan inovasi tersebut. Ini terjadi, jika inovasi dinilai mudah digunakan dan memberikan manfaat lebih baik dibanding dengan cara, ketentuan, atau metode kerja sebelumnya. Berdasarkan statistik deskriptif, tampak bahwa pegawai penatausahaan SKPD memiliki tingkat penerimaan SAP yang tinggi, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata 3,67. Dari 9 item yang digunakan mengukur penerimaan SAP oleh pegawai, semuanya memiliki nilai rata-rata yang tinggi ( $> 3,40$ ). Nilai rata-rata tertinggi adalah pegawai semakin termotivasi untuk memperdalam penguasaan bidang akuntansi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas penatausahaan dan penyusunan LKPD (3,80). Adapun nilai rata-rata terendah adalah berkurangnya keengganan melaksanakan tugas penatausahaan dan penyusunan LKPD (rata-rata 3,40). Berdasarkan jawaban responden tersebut, maka dapat diinterpretasi (1) penggunaan SAP untuk penyusunan LKPD berdampak positif bagi pegawai, yaitu meningkatnya motivasi dan kepuasan kerja, dan (2) penggunaan SAP meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja pegawai.

## 5.4. Analisis Model dan Uji Hipotesis

### 5.4.1. Asumsi Normalitas

Langkah lebih lanjut sebelum dilakukan uji hipotesis adalah memeriksa asumsi-asumsi yang disyaratkan analisis jalur, yaitu asumsi normalitas sebaran data dan hubungan linieritas antar konstruk/variabel yang akan diuji. Uji normalitas data, dilakukan secara *univariate* (masing-masing konstruk individual) dan *multivariate* (kombinasi semua konstruk dalam model). Uji normalitas data menggunakan statistik Z ( $Z_{hitung}$ ) dari nilai kemencengan (*skewness*) pada alpha 5% dan 1% (Ferdinand, 2002). Nilai kritis Z, sebagai *cut-off value* pada alpha 5% dan 1% adalah 1,96 dan 2,58 (harga absolut, nilai negatif dianggap positif). Dalam output program Amos, nilai  $Z_{hitung}$  direpresentasikan oleh nilai *c.r* (*critical ratio*). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jika nilai *c.r* (*critical ratio*) tidak signifikan pada alpha 5% atau 1%, maka disimpulkan bahwa data konstruk penelitian berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data disajikan pada Tabel 5.7 berikut.

Tabel 5.7.  
Uji Normalitas Data

Variabel	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
<b>1. Univariate</b>						
Faktor organisasional (X1)	2	5	-0,434	-1,79	-0,298	-0,613
Pengalaman (X2)	3	5	0,088	0,364	-0,433	-0,893
Komitmen pengguna (X3)	2	5	-0,26	-1,074	-0,295	-0,608
Pimpinan langsung (X4)	2,53	4,88	-0,469	-1,935	0,003	0,006
Kemudahan (Y1)	2,5	5	-0,125	-0,515	-0,744	-1,533
Manfaat (Y2)	2,67	5	0,034	0,14	-0,472	-0,973
Penerimaan (Y3)	2,44	4,78	-0,343	-1,412	-0,305	-0,629
<b>2. Multivariate</b>					4,197	1,788

Sumber: Lampiran 6

Berdasarkan hasil pengujian normalitas data, diketahui bahwa secara *univariate*, distribusi data (skor rata-rata) 7 variabel penelitian memiliki nilai *c.r.*

*skewness* yang tidak signifikan pada alpha 5%, dimana nilai *c.r* terletak antara -1,96 dengan 1,96 ( $-1,96 < c.r < 1,96$ ). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi distribusi normal terpenuhi. Selanjutnya, untuk uji normalitas secara *multivariate*, yaitu kombinasi data dari ketujuh variabel diperoleh  $c.r. = 1,78 < 1,96$ , sehingga disimpulkan secara *multivariate* distribusi data adalah berdistribusi normal.

#### 5.4.2. Asumsi Linieritas

Aplikasi analisis jalur juga mensyaratkan asumsi linieritas, yaitu bahwa hubungan kausal antara variabel bebas dengan variabel terikat merupakan fungsi linier, bukan non linier. Untuk menguji linieritas data, dilakukan teknik estimasi *curvefit* pada opsi *linear*. Teknik ini pada dasarnya sama dengan regresi linier sederhana. Jika fungsi linier antar dua variabel yang diestimasi signifikan pada alpha 5%, maka disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan linieritas. Pada uji ini, data diolah dengan SPSS 11.01, yang disajikan pada Lampiran 5, dan hasilnya diringkas pada tabel berikut.

Tabel 5.8.  
Uji Asumsi Linieritas

Variabel terikat	Variabel bebas	R <sup>2</sup>	F	Sigf	Simpulan
Persepsi kemudahan (Y1)	Faktor organisasional (X1)	0,343	52,270	0,000	Linier
	Pengalaman (X2)	0,153	18,010	0,000	Linier
	Komitmen pengguna (X3)	0,273	37,530	0,000	Linier
Persepsi manfaat (Y2)	Faktor organisasional (X1)	0,214	27,190	0,000	Linier
	Pengalaman (X2)	0,113	12,720	0,001	Linier
	Komitmen pengguna (X3)	0,506	102,470	0,000	Linier
	Kemudahan (Y1)	0,158	18,800	0,000	Linier
	Pimpinan langsung (X4)	0,351	54,020	0,000	Linier
Penerimaan SAP (Y3)	Kemudahan (Y1)	0,558	126,110	0,000	Linier
	Manfaat (Y2)	0,576	136,000	0,000	Linier

Sumber: Lampiran 5

Berdasarkan hasil uji linieritas, kausalitas antar variable yang akan diuji, tampak bahwa semua kausalitas memiliki hubungan linier. Hal ini ditunjukkan oleh nilai persamaan linier yang terbukti signifikan pada alpha 5%. Dengan demikian syarat linieritas hubungan antar konstruk yang akan dianalisis terpenuhi.

#### **5.4.3. Pengujian Multikolinieritas**

Secara deskriptif, derajat multikolinieritas, dapat dilihat dari matriks korelasi antar variabel bebas. Namun demikian, untuk melihat multikolinieritas secara keseluruhan yang terjadi pada model analisis jalur, digunakan koefisien determinan *sample covariance matrix*. Jika nilainya sama dengan atau mendekati 0, maka model disifati multikolinieritas (Ferdinand, 2002). Dari output Amos, diperoleh determinan *sample covariance matrix* = 7.5128e+001 atau 75,5128. Nilai ini lebih besar nol, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model tidak disifati multikolinieritas, sehingga dapat diinterpretasi lebih lanjut.

#### **5.4.4. Analisis Jalur**

Analisis jalur (path analysis) merupakan bentuk spesifik model persamaan struktural (SEM) (Garson, 2002). Terdapat dua langkah dalam pengujian model analisis jalur, yaitu (1) uji kelayakan model dan (2) uji signifikansi koefisien jalur.

##### **1. Validasi Model (Uji goodness of fit)**

Seperti dijelaskan oleh Garson (2002) bahwa analisis jalur merupakan bentuk spesifik dari model persamaan struktural, atau disebut jika SEM dengan *observed/manifest variable*. Oleh karena itu, model analisis jalur juga perlu diuji



seberapa kelayakan (*goodness of fit*) model dengan data. Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji kesesuaian model hipotetis (model yang diajukan) dengan data yang dikumpulkan. Hipotesis statistik yang diuji pada uji *goodness of fit* dinyatakan sebagai berikut:

Ho : Tidak ada perbedaan matriks kovarians sampel dengan matriks kovarians populasi yang diestimasi.

Hi : Ada perbedaan matriks kovarians sampel dengan matriks kovarians populasi yang diestimasi.

Dalam uji *goodness of fit*, yang diharapkan adalah tidak ditolaknya hipotesis nol. Artinya, jika hipotesis nol gagal ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa ada kesesuaian antara model penelitian berbasis teoritis dengan data penelitian yang berbasis empiris. Tidak ada alat uji statistik tunggal untuk mengukur atau menguji hipotesis mengenai model (Ferdinand, 2002:61). Hasil uji kelayakan model disajikan pada table berikut.

Tabel 5.9.

*Goodness-of-Fit Index* Model awal dan Model Modifikasi

<i>Goodness-of-fit statistic</i>	<i>Cut-off value</i>	Model awal		Model modifikasi	
		Nilai	Keterangan	Nilai	Keterangan
CMIN	Kecil	31,354 (df=5)	Jelek	7,385 (df=4)	Baik
P	$\geq 0,05$	0,000		0,117	
CMINDF	$\leq 2$	6,271	Jelek	1,846	Baik
GFI	$\geq 0,90$	0,933	Baik	0,98	Baik
AGFI	$\geq 0,90$	0,623	Jelek	0,857	Marginal
RMSEA	$\leq 0,08$	0,228	Jelek	0,092	Marginal
TLI	$\geq 0,95$	0,691	Jelek	0,95	Baik
CFI	$\geq 0,95$	0,926	Marginal	0,991	Baik

Sumber: Ferdinand (2002:167) dan *Output* AMOS (Lampiran 6 dan Lampiran 7)

Hasil *goodness-of-fit* model konseptual (Gambar 3.1) menunjukkan bahwa model belum memenuhi kriteria kelayakan. Nilai CMIN atau  $\chi^2$  signifikan dengan *p-value* = 0,000, yang mengindikasikan ada perbedaan antara matrik

kovarians populasi dengan matrik kovarians sample. Dari indeks *goodness-of-fit* yang digunakan, hanya GFI yang diterima. Oleh karena itu, model awal ini belum dapat diinterpretasi. Solusinya adalah melakukan modifikasi model.

Untuk tujuan modifikasi, digunakan bantuan indeks modifikasi. Nilai indeks modifikasi (MI) yang besar ( $> 4$ ), memberi indikasi bahwa bila koefisien tersebut diestimasi, maka akan terjadi pengecilan *chi-square* yang signifikan (Ferdinand, 2002). Berdasarkan hasil *output* AMOS model awal (Tabel 5.8), diperoleh informasi tidak diterimanya model awal, karena terdapat korelasi yang tinggi antara X4 (pengaruh pimpinan unit kerja) dengan variabel penerimaan (Y3) atau pengaruh yang signifikan X4 terhadap Y3. Ada dua strategi yang dapat dilakukan, yaitu menambah konstrain korelasi antara X4 (pengaruh pimpinan) dengan variabel penerimaan (Y3) atau menambah jalur X4 ke Y3.

Tabel 5.10.

*Modification Indices Model Awal*

Covariances:	M. I.	Par Change
z3 <---> x4	15.584	0.075
Variances:	M. I.	Par Change
Regression Weights:	M. I.	Par Change
Y3 <---- X4	16.764	0.141

Sumber: Lampiran 6

Pada penelitian ini, ditempuh cara menambah jalur (regresi) X4 ke Y3, berarti pimpinan unit kerja berpengaruh secara langsung terhadap penerimaan SAP oleh pegawai. Hasil modifikasi model, seperti tampak pada Tabel 5.7,

diperoleh perbaikan terhadap indeks kelayakan model. Dengan demikian, untuk interpretasi hasil penelitian, akan didasarkan pada model modifikasi.

Penambahan jalur untuk modifikasi model, menurut Ferdinant (2002) perlu didukung oleh teori. Dalam hal ini penambahan jalur pengaruh pimpinan unit kerja (X4) ke penerimaan SAP oleh pegawai (Y3) dilandasi teori bahwa keputusan menerima atau menolak oleh individu terhadap inovasi pada konteks organisasi pemerintahan bersifat mandat (kewajiban), bukan sepenuhnya sukarela (voluntary) (Rogers, 1995). Artinya, mau tidak mau, pegawai yang karena sudah menjadi tugasnya, harus menerima dan menggunakan ketentuan baru yang berlaku di organisasi pemerintahan. Hal ini juga didukung budaya birokratis yang berlaku dalam organisasi pemerintahan. Akibatnya, relasi atasan-bawahan cenderung berbasis kekuasaan (power). Bawahan akan cenderung menerima, apa yang dikerjakan sebagai bagian dari perintah atasan, yang harus dilaksanakan. Pada kondisi demikian, pengaruh pimpinan unit kerja (atasan langsung) menjadi tereduksi dalam pembentukan sikap (persepsi kemudahan dan persepsi manfaat) dari menggunakan inovasi (cara, ketentuan baru), tetapi lebih berperan dalam kesiapsediaan pegawai dalam penggunaan inovasi baru tersebut.

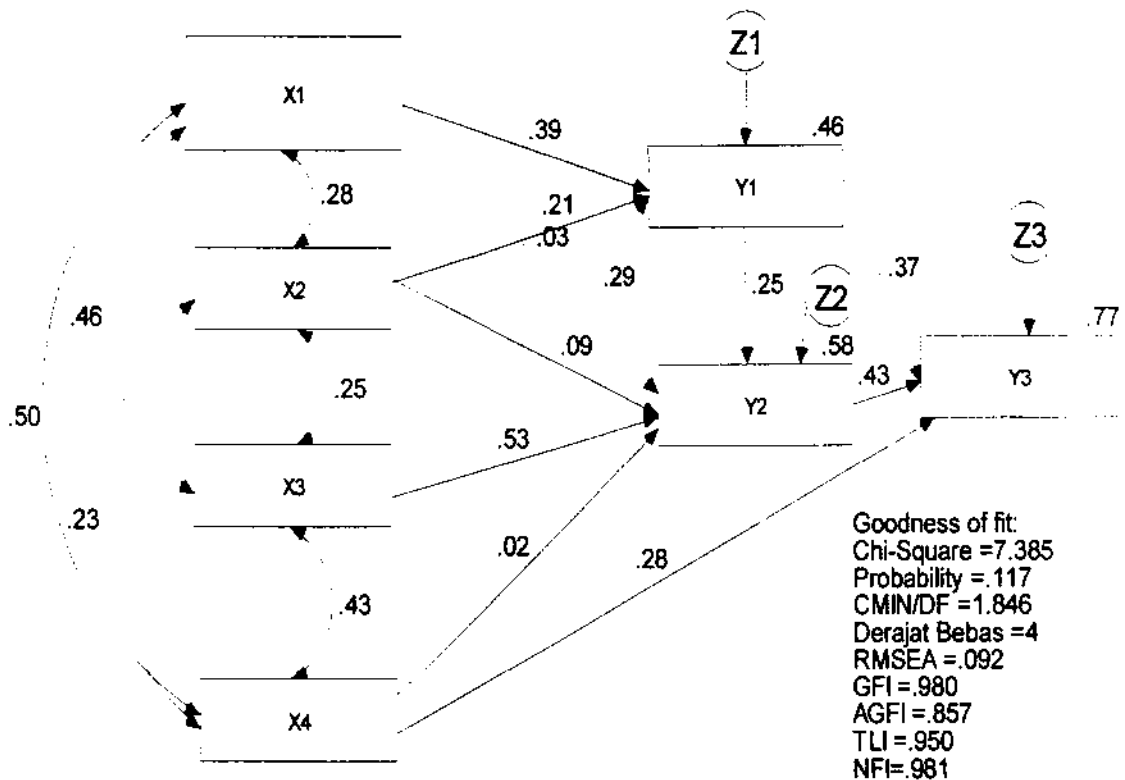
#### **5.4.4.1. Pengujian Hipotesis**

Hasil pengujian diilustrasikan pada *path diagram* Gambar 5.1. Dari Gambar 5.1 diketahui ada 11 jalur (path), yang mencerminkan 11 hipotesis pengaruh langsung yang akan diuji. Jumlah jalur menjadi 11, karena ada tambahan 1 jalur pada model modifikasi. Nilai-nilai yang melekat pada setiap

jalur adalah koefisien jalur, yang identik dengan koefisien beta pada analisis regresi, sedangkan nilai-nilai yang melekat pada anak panah dua arah merupakan nilai koefisien korelasi.

Gambar 5.1.

*Path Diagram* Hasil Pengujian Model Struktural yang Dimodifikasi  
*Standardized Estimate*



Sumber: *Output* AMOS (Lampiran 7)

Berdasarkan hasil estimasi persamaan struktural seperti tersaji pada Gambar 5.1, dapat disusun 3 persamaan, karena terdapat 3 variabel endogen (Y1, Y2, Y3) sebagai berikut:

1. Persamaan 1, variabel endogen persepsi kemudahan (Y1)

$$Y1 = 0,39X1 + 0,21X2 + 0,29X3$$

2. Persamaan 2, variabel endogen persepsi manfaat (Y2)

$$Y2 = 0,03X1 + 0,09X2 + 0,53X3 + 0,02X4 + 0,25Y1$$

3. Persamaan 3, variabel endogen penerimaan SAP (Y3)

$$Y3 = 0,37Y1 + 0,43Y2 + 0,28X4$$

Dilihat dari tanda koefisien beta, semua koefisien beta pada ketiga persamaan bertanda positif. Tanda positif memperlihatkan adanya pengaruh positif variabel bebas terhadap variabel terikat, yang berarti semakin semakin tinggi nilai variabel bebas, maka semakin tinggi pula nilai variabel terikat. Hasil tersebut mengindikasikan adanya kesesuaian dengan kajian teoritik yang mendasari pengembangan model. Selanjutnya, apakah nilai koefisien jalur adalah signifikan atau tidak, maka perlu diuji secara statistic. Pengujian dilakukan dengan uji t, satu sisi pada alpha 5%. Dengan demikian, diputuskan  $H_0$  ditolak jika diperoleh nilai  $p \leq 5\%$ , berarti hipotesis penelitian (hipotesis alternatif) terbukti. Hipotesis statistik yang diuji pada uji signifikansi koefisien jalur dapat dirumuskan sebagai berikut:

$H_0$  :  $\beta = 0$ , Tidak ada pengaruh  $X_i$  terhadap  $Y_i$

$H_i$  :  $\beta > 0$ , Ada pengaruh positif  $X_i$  terhadap  $Y_i$ ,

dimana  $X_i$  adalah variabel bebas (bisa eksogen atau endogen), dan  $Y_i$  adalah variabel terikat (selalu variabel endogen). Hasil pengujian hipotesis terhadap model penelitian, yang menjelaskan pengaruh antar variabel dalam model penerimaan inovasi disajikan pada Tabel 5.9.

Tabel 5.11.  
Ikhtisar Uji Hipotesis

No	Jalur	Koef regresi	Beta	t <sub>hitung</sub>	P	Keterangan
1	Kemudahan (Y1) ← Faktor organisasional (X1)	0,495	0,395	4,714	0,000	Signifikan
2	Kemudahan (Y1) ← Pengalaman (X2)	0,184	0,207	2,697	0,007	Signifikan
3	Kemudahan (Y1) ← Komitmen pengguna (X3)	0,360	0,289	3,479	0,000	Signifikan
4	Manfaat (Y2) ← Faktor organisasional (X1)	0,037	0,035	0,401	0,688	Tidak Signifikan
5	Manfaat (Y2) ← Pengalaman (X2)	0,067	0,090	1,282	0,200	Tidak Signifikan
6	Manfaat (Y2) ← Komitmen pengguna (X3)	0,557	0,534	6,700	0,000	Signifikan
7	Manfaat (Y2) ← Pimpinan langsung (X4)	0,013	0,022	0,289	0,772	Tidak Signifikan
8	Manfaat (Y2) ← Kemudahan (Y1)	0,208	0,248	2,825	0,005	Signifikan
9	Penerimaan (Y3) ← Kemudahan (Y1)	0,314	0,373	6,164	0,000	Signifikan
10	Penerimaan (Y3) ← Manfaat (Y2)	0,435	0,433	7,131	0,000	Signifikan
11	Penerimaan (Y3) ← Pimpinan langsung (X4)	0,171	0,283	5,357	0,000	Signifikan
Variabel endogen (Yi)		<i>(R<sup>2</sup>)</i>			<i>Beta Error (ei)</i>	
Kemudahan (Y1)		0,46			0,73	
Manfaat (Y2)		0,58			0,65	
Penerimaan (Y3)		0,77			0,48	

Sumber: *Output AMOS (Lampiran 7)*

Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur, seperti tampak pada Tabel 5.9 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persamaan 1: variable endogen persepsi kemudahan (Y1)

Pada persamaan ini, diuji pengaruh factor organisasional (X1), pengalaman pelaksanaan tugas sejenis sebelumnya (X2), dan komitmen pengguna (X3) terhadap persepsi kemudahan (Y1) penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Masing-masing jalur yang diuji adalah H1, H2, dan H3 pada model konseptual. Hasil pengujian menunjukkan bahwa factor organisasional (X1), pengalaman pelaksanaan tugas sejenis sebelumnya (X2), dan komitmen pengguna (X3) terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi kemudahan (Y1) penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di SKPD Pemprov Jawa Timur. Ketiga variable bebas tersebut, secara bersama-sama

memberikan kontribusi 46% dalam menjelaskan persepsi kemudahan penggunaan SAP untuk penyusunan laporan keuangan SKPD. Berdasarkan besaran koefisien beta, diketahui factor organisasional (pelatihan, dukungan teknis, dan komitmen implementasi/sosialisasi) memiliki pengaruh terbesar, berikutnya komitmen pengguna dan pengalaman sebelumnya.

## 2. Persamaan 2, variabel endogen persepsi manfaat (Y2)

Pada persamaan ini, diuji pengaruh factor organisasional (X1), pengalaman pelaksanaan tugas sejenis sebelumnya (X2), komitmen pengguna (X3), pengaruh pimpinan unit kerja (X4) dan persepsi kemudahan (Y1) terhadap persepsi manfaat (Y2) penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Masing-masing jalur yang diuji adalah H4, H5, H6, H7, dan H8 pada model konseptual. Hasil pengujian menunjukkan, hanya dua jalur yang terbukti signifikan, yaitu H6 (komitmen pengguna) dan H8 (persepsi kemudahan). Adapun factor organisasional, pengalaman sebelumnya, dan pimpinan unit kerja tidak berpengaruh terhadap persepsi manfaat penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di SKPD Pemprov Jawa Timur. Kelima variable bebas tersebut, secara bersama-sama memberikan kontribusi 58% dalam menjelaskan persepsi manfaat penggunaan SAP untuk penyusunan laporan keuangan SKPD. Berdasarkan besaran koefisien beta, diketahui komitmen pengguna memiliki pengaruh terbesar.

## 3. Persamaan 3, variabel endogen penerimaan SAP (Y3)

Pada persamaan ini, diuji pengaruh persepsi kemudahan (Y1) persepsi manfaat (Y2) dan pengaruh pimpinan unit kerja (X4) terhadap penerimaan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Masing-masing jalur yang diuji adalah H9 dan H10 pada model konseptual, dan jalur pengaruh pimpinan unit kerja terhadap penerimaan SAP, pada model modifikasi. Hasil pengujian menunjukkan, ketiga jalur terbukti signifikan. Persepsi kemudahan, persepsi manfaat dan pimpinan unit kerja berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan SAP di SKPD Pemprov Jawa Timur. Ketiga variable secara bersama-sama memberikan kontribusi 77% dalam menjelaskan penerimaan SAP untuk penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Berdasarkan besaran koefisien beta, diketahui persepsi manfaat memiliki pengaruh terbesar terhadap penerimaan SAP, berikutnya persepsi kemudahan dan pengaruh pimpinan unit kerja.

#### **5.4.4.2. Analisis Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total**

Selain diketahui besaran pengaruh langsung melalui koefisien jalur, dari model persamaan struktural juga dapat diketahui pengaruh tidak langsung (indirect effect) dan pengaruh total (total effects). Pengaruh tidak langsung adalah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tertentu melalui suatu variabel mediator (mediating variable) tertentu yang ada pada jalur. Pada penelitian ini ada dua variabel mediator dalam model struktural, yaitu persepsi kemudahan dan persepsi manfaat, yang diderivasi dari teori *technology acceptance model* dan hasil studi empiris sebelumnya. Dengan demikian, pengaruh tidak langsung dari 4 variabel eksogen (anteseden) terhadap variabel penerimaan inovasi adalah melalui



persepsi kemudahan dan atau persepsi manfaat penerapan SAP, mengikuti jalur pada model struktural. Adapun pengaruh total (*total effects*) adalah pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung. Tabel 5.12 berikut menyajikan pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total hubungan kausalitas antar konstruk.

Tabel 5.12.

*Standardized Direct Effect, Indirect Effect, dan Total Effect*

Effect		X1	X2	X3	X4	Y1	Y2
Direct effect	Y1	0,395	0,207	0,289	0	0	0
	Y2	0,035	0,09	0,534	0,022	0,248	0
	Y3	0	0	0	0,283	0,373	0,433
Indirect Effect	Y1	0	0	0	0	0	0
	Y2	0,008	0,051	0,072	0	0	0
	Y3	0,205	0,139	0,370	0,01	0,108	0
Total Effect	Y1	0,395	0,207	0,289	0	0	0
	Y2	0,133	0,142	0,606	0,022	0,248	0
	Y3	0,205	0,139	0,370	0,292	0,481	0,433

Sumber: *Output AMOS (Lampiran 7)*

Penjelasan terhadap pengaruh langsung telah dilakukan ketika menginterpretasi koefisien beta pada model struktural. Adapun penjelasan terhadap pengaruh tidak langsung dan pengaruh total adalah sebagai berikut:

### 1. Pengaruh tidak langsung

Pengaruh tidak langsung merupakan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat melalui suatu variabel mediator tertentu yang ada pada jalur. Untuk persamaan struktural 1 (variabel endogen Y1), pengaruh tidak langsung dari X1 dan X2 adalah 0 (tidak ada), karena hubungan kausalitas tersebut tidak melalui variabel mediator, jadi hanya ada pengaruh langsung. Sedangkan pengaruh tidak langsung dari X3, Y2, dan Y3 juga 0, karena tidak ada jalur yang meaghubungkan variabel-variabel tersebut ke Y1.

Pada persamaan struktural 2 (variabel endogen Y2), pengaruh tidak langsung terbesar adalah X3 (komitmen pengguna), demikian pula untuk persamaan struktural 3 (variabel endogen Y3). Hasil ini mengindikasikan komitmen pengguna merupakan variable anteseden penting dalam proses penerimaan SAP di lingkungan Pemprov Jawa Timur, yaitu melalui mediasi persepsi kemudahan dan persepsi manfaat.

## **2. Pengaruh total**

Pengaruh total adalah penjumlahan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung (jika ada). Berdasarkan informasi pada Tabel 5.12, diketahui bahwa untuk persamaan struktural 1, pengaruh total terbesar adalah faktor organisasional, yang sama dengan pengaruh langsungnya, karena tidak ada pengaruh tidak langsung. Untuk persamaan struktural 2, pengaruh total terbesar adalah komitmen pengguna, yaitu penjumlahan dari pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsungnya. Sedangkan untuk persamaan struktural 3, pengaruh total terbesar adalah persepsi kemudahan. Berdasarkan analisis pengaruh tidak langsung dan pengaruh total, diketahui bahwa persepsi kemudahan penggunaan SAP untuk penyusunan LKPD memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan implementasi SAP untuk penyusunan LKPD, melalui penguatan upaya-upaya Pemprov Jawa Timur, pengalaman pegawai sebelumnya dan komitmen pegawai pada penggunaan SAP.

## **BAB 6**

### **PEMBAHASAN**

Setelah dilakukan analisis statistik untuk menguji hipotesis, pada bagian ini dilakukan pembahasan. Pertama, pembahasan difokuskan pada penerimaan inovasi oleh individu, dalam proses implementasi SAP sebagai inovasi dalam praktek penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan daerah di Pemprop Jawa Timur. Selanjutnya, dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan inovasi, guna mengidentifikasi implikasi teoritis bagi pengembangan penelitian lebih lanjut, dan implementasi praktis bagi organisasi Pemprop Jawa Timur, dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan di Pemerintah Daerah. Pada bab ini juga diuraikan keterbatasan penelitian dan *research gap* yang perlu mendapat telaah lebih dalam penelitian berikutnya.

#### **6.1. Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Manfaat terhadap Penerimaan SAP**

Problem pokok yang dihadapi organisasi pemerintahan, ketika menerapkan sistem, pendekatan, ataupun cara baru dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, misal dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah terletak pada perubahan sikap yang menjadi prasyarat penerimaan pegawai terhadap perubahan yang diharapkan. Studi sebelumnya, seperti pada konteks implementasi anggaran berbasis kinerja, mengalami kendala, karena sulitnya merubah paradigma dan kebiasaan lama dan juga sering berubahnya peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyusunan anggaran pemerintah daerah (Rahayu dkk., 2007).

Pada konteks implementasi SAP, perubahan sikap yang dimaksud adalah adanya pembentukan persepsi oleh target pemakai (Pejabat Pengelola Keuangan/PPK) satuan kerja beserta bawahannya yang melaksanakan tugas penatausahaan keuangan daerah. Seperti disampaikan sebelumnya, penerimaan oleh pegawai merupakan tahap kritis untuk mencapai keberhasilan implementasi inovasi. Adapun penerimaan pegawai, hanya terjadi jika, terbentuk sikap positif terhadap inovasi, yaitu target pemakai menilai inovasi mudah dilaksanakan dan memberikan manfaat lebih baik, dibanding cara sebelumnya.

Hasil studi ini membuktikan bahwa variabel sikap target pemakai sangat penting dalam proses penerimaan inovasi pada konteks organisasional. Hal ini terlihat dari pengaruh positif signifikan persepsi kemudahan dan manfaat terhadap penerimaan SAP. Lebih lanjut, berdasarkan analisis pengaruh totalnya terhadap penerimaan SAP, diketahui bahwa persepsi kemudahan memiliki pengaruh terbesar, yang menunjukkan peran penting kompetensi pegawai dalam bidang SAP dan penyusunan laporan keuangan untuk mendukung keberhasilan implementasi SAP di pemerintah daerah.

Hasil studi ini mendukung studi Schillawaert, et al. (2001), Frambach dan Schillewaert (1999), dan Ramayah, et al. (2002) meskipun berada pada jenis organisasi yang berbeda. Temuan tersebut, juga mendukung studi Sumiyama (2007) serta Malhotra dan Galleta (2005), yang juga menyimpulkan bahwa kemudahan dan manfaat penggunaan berpengaruh terhadap perilaku penggunaan sistem informasi akuntansi pada konteks organisasi bisnis. Implikasi teoritis studi ini adalah memperkuat generalisasi teori model TAM, yang secara spesifik

dikonstruksi untuk menjelaskan penerimaan inovasi teknologi informasi oleh individu dalam organisasi, akan tetapi juga terbukti pada studi ini yang mengkaji implementasi SAP, sebagai inovasi yang lebih bersifat *intangible*. Persepsi kemudahan, persepsi manfaat dan penerimaan inovasi merupakan inti dari Model TAM.

Temuan yang berbeda dari model TAM pada penelitian ini adalah bahwa pimpinan unit kerja atau atasan langsung, juga berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan SAP. Seperti disebutkan di Bab 4, pengujian tersebut adalah hasil modifikasi dari model awal yang diajukan dalam model konseptual. Jalur pimpinan unit kerja (X4), yang merupakan representasi dari faktor lingkungan sosial, ternyata tidak berpengaruh secara langsung terhadap pembentukan sikap persepsi kemudahan dan manfaat SAP, melainkan berpengaruh langsung terhadap penerimaan SAP. Hasil tersebut mencerminkan kuatnya dampak dari pimpinan langsung, lebih berdampak langsung terhadap kesiapsediaan bawahannya untuk menjalankan tugas (penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan) sesuai dengan SAP, tanpa melalui terbentuknya adanya kesadaran bahwa dengan implementasi SAP, akan lebih bermanfaat bagi pegawai, pemerintah dan masyarakat. Pengaruh langsung pimpinan terhadap penerimaan kemungkinan disebabkan anggapan bahwa apapun yang diharapkan pimpinan dianggap sebagai perintah yang harus ditaati dan dijalankan, meskipun bawahan kurang memahami tujuan dari perintah tersebut. Pada konteks organisasi pemerintahan, hal tersebut memang mungkin terjadi, karena sebenarnya pegawai dalam mengambil keputusan menerima atau menolak implementasi SAP adalah bersifat *mandatory*

atau melaksanakan kewajiban. Akan tetapi, meskipun demikian pra kondisi pembentukan sikap positif, yaitu bahwa SAP itu tidak sulit, justru memudahkan dan akan memberikan manfaat lebih besar, baik bagi pegawai, organisasi, maupun masyarakat luas, karena meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah adalah sangat penting.

## **6.2. Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Proses Penerimaan SAP**

Pemahaman umum dalam teori penerimaan inovasi oleh individu dalam organisasi, dinyatakan bahwa sikap target pemakai terhadap implementasi inovasi tertentu, dipengaruhi oleh factor eksternal dan internal. Factor eksternal meliputi factor organisasional dan lingkungan social, adapun factor internal meliputi pengalaman sebelumnya, karakteristik demografis, dan kepribadian. Lebih lanjut, dalam teori pengaruh social Kelman, disebutkan komitmen pengguna turut berpengaruh terhadap sikap target pemakai, yang mana pada penelitian ini komitmen pengguna termasuk dalam factor internal, yang diposisikan sebagai variable tersendiri. Penjelasan dari hasil pengujian factor-faktor yang mempengaruhi sikap, yaitu persepsi kemudahan dan persepsi manfaat diuraikan berikut ini.

### **6.2.1. Pengaruh Faktor Organisasional (*Internal Marketing*)**

Faktor organisasional dalam studi ini dihipotesiskan berpengaruh positif terhadap persepsi kemudahan dan persepsi manfaat. Pelatihan, dukungan teknis dan sosialisasi yang SAP yang intensif kepada semua SKPD, terutama pada

bagian keuangan, diharapkan dapat membentuk sikap positif dalam hal adanya anggapan bahwa, SAP itu mudah diterapkan/dilaksanakan dan memberikan manfaat lebih baik dibanding cara sebelumnya. Hasil pengujian hipotesis, membuktikan bahwa factor organisasional, terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi kemudahan, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap persepsi manfaat SAP. Terhadap persepsi kemudahan, faktor organisasional menunjukkan pengaruh yang terbesar.

Faktor organisasional tidak berpengaruh terhadap persepsi manfaat penggunaan SAP untuk penyusunan laporan keuangan, kemungkinan disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, pengaruh upaya-upaya atau *internal marketing* yang dilakukan Pemprop Jawa Timur dalam menanamkan pemahaman pentingnya manfaat SAP untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel adalah bersifat tidak langsung, yaitu melalui terbentuknya persepsi kemudahan. Hal ini didukung oleh hasil pengujian bahwa kemudahan penggunaan SAP terbukti berpengaruh signifikan terhadap persepsi manfaat. *Kedua*, pengaruh langsung *internal marketing* Pemprop Jawa Timur, tereduksi oleh pengaruh langsung variable lain yaitu komitmen pegawai pengguna dan persepsi kemudahan. Artinya, ketika dikontrol oleh variable bebas lainnya, pengaruh langsung factor organisasional (*internal marketing*) menjadi kurang kelihatan. Hal ini didukung hasil uji linieritas yang menunjukkan factor organisasional berhubungan signifikan dengan persepsi manfaat dan hasil uji koefisien jalur komitmen pengguna dan persepsi kemudahan terhadap persepsi manfaat yang terbukti signifikan.

Walaupun factor organisasional secara langsung tidak berpengaruh terhadap persepsi manfaat, akan tetapi eksistensinya tetap penting dalam proses implementasi SAP di pemerintah daerah. Faktor organisasional terbukti berpengaruh terhadap persepsi kemudahan dan selanjutnya berpengaruh terhadap penerimaan SAP oleh pegawai melalui persepsi manfaat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelatihan, dukungan dan komitmen pemerintah daerah sangat penting dalam pembentukan sikap positif terhadap inovasi. Simpulan tersebut mendukung studi Schillawaert. et al. (2001) yang menyimpulkan bahwa upaya organisasi (*organizational facilitators*) merupakan *driver* utama terhadap terbentuknya keyakinan atas manfaat implementasi inovasi. Kultur organisasi pemerintahan yang bercorak hierarkis-struktural, secara tidak langsung juga memperkuat peran organisasi, karena nyaris tidak ada ruang bagi pegawai untuk tidak mengikuti kebijakan pimpinan, termasuk pada konteks implementasi SAP.

Memperhatikan hubungan kausalitas antara faktor organisasional dengan variabel sikap, seperti hasil pengujian, tampak bahwa kemudahan penggunaan SAP, secara tepat menjadi mediator bagi kesadaran atas manfaat. Lebih lanjut, karena pengujian hipotesis juga membuktikan bahwa persepsi kemudahan dan persepsi manfaat terbukti berpengaruh signifikan terhadap penerimaan implementasi SAP, maka dengan jelas memperlihatkan bahwa variabel sikap merupakan *mediating variable* yang tepat bagi faktor organisasional dalam proses implementasi inovasi SAP. Hasil ini memberikan implikasi bahwa program pelatihan, perlu secara konsisten dibarengi oleh penyediaan sumber daya (tenaga



asistensi dan kapasitas teknologi informasi yang memadai) dan sosialisasi ke seluruh unit kerja organisasi.

Temuan tersebut juga menjustifikasi studi sebelumnya pada konteks implementasi standar akuntansi di organisasi pemerintahan, seperti diidentifikasi Ouda (2005) dan Olorilanto (2007). Sebagaimana diidentifikasi Ouda (2005) bahwa kurangnya pendidikan mengenai proses reformasi pemerintahan, budaya birokrasi, kapasitas teknologi informasi yang terbatas, dan resistensi terhadap transparansi dan akuntabilitas, merupakan kendala dalam masa transisi implementasi standar akuntansi di organisasi pemerintahan. Demikian pula studi Olorilanto (2007) yang menggunakan pendekatan *theory contingency*, menyimpulkan bahwa lemahnya komitmen pejabat pemerintah, merupakan kendala implementasi standar akuntansi baru dalam organisasi pemerintahan. Dengan demikian, peningkatan *knowledge and skill* akuntansi melalui proses pelatihan dan membangkitkan kesadaran bersama pada stakeholder pemakai standar akuntansi pemerintahan merupakan dimensi yang tidak dapat ditawar lagi, dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **6.2.2. Pengaruh Pengalaman Sebelumnya**

Faktor pengalaman sebelumnya yang dimiliki pegawai yang menjadi target pemakai suatu inovasi juga turut berpengaruh dalam proses penerimaan inovasi, karena individu yang menjadi target pemakai secara aktual merupakan pelaku dalam implementasi inovasi. Pada studi ini, variable pengalaman sebelumnya merupakan faktor individual, yang direpresentasikan oleh

pengalaman pegawai dalam pelaksanaan tugas penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan berbadaskan ketentuan sebelumnya (Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002). Pengalaman sebelumnya, dihipotesiskan berpengaruh langsung terhadap persepsi kemudahan dan persepsi manfaat.

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa pengalaman sebelumnya berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi kemudahan, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap persepsi manfaat. Temuan ini mengindikasikan bahwa pegawai yang telah terbiasa atau setidaknya pernah menunaikan tugas sejenis, meskipun dengan dasar aturan yang berbeda, terbukti lebih mudah dalam menguasai dan menggunakan SAP. Hasil dari statistic deskriptif, jelas menunjukkan bahwa responden telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan di SKPD-nya, walaupun untuk indicator pengetahuan bidang akuntansi mendapat penilaian terendah (Lampiran 3). Temuan tersebut berimplikasi kepada kebijakan penempatan pegawai (*job placement*), yaitu menentukan personalia yang tepat sesuai kompetensinya. Pimpinan unit kerja dalam hal ini memegang peran penting, sebagai pejabat yang memiliki kewenangan mengusulkan pegawai yang akan diposisikan sebagai pemakai SAP.

Adapun pengalaman sebelumnya tidak berpengaruh terhadap persepsi manfaat, dapat diinterpretasi bahwa pengaruh tersebut bersifat tidak langsung. Hal ini dibuktikan oleh hasil pengujian bahwa pengalaman pegawai dalam tugas penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan SKPD terbukti terhadap persepsi kemudahan, dan persepsi kemudahan berpengaruh terhadap persepsi

manfaat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terbentuknya pengetahuan dan ketrampilan yang menjadi syarat bagi pegawai agar mudah dalam melaksanakan tugas penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai SAP, merupakan mediasi penting dalam membentuk kesadaran mengenai pentingnya SAP.

Temuan bahwa pengalaman sebelumnya berpengaruh positif terhadap kemudahan penggunaan SAP, secara teoritis membuktikan model penerimaan inovasi oleh individu dalam organisasi (Frambach dan Schillewaert, 1999). Menurut Frambach dan Schillewaert (1999), salah satu karakteristik individual penting dalam mekanisme *individual acceptance* adalah pengalaman penggunaan produk sejenis sebelumnya (*product experience*). Lebih lanjut, hasil pengujian tersebut juga mengkonfirmasi hasil studi Ouda (2005) bahwa kurangnya kualifikasi tenaga akunting menjadi salah kendala dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, dengan menempatkan tenaga di bagian keuangan yang melaksanakan tugas penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kompetensinya, akan mendukung keberhasilan implementasi SAP di pemerintah daerah.

### **6.2.3. Pengaruh Komitmen Pengguna**

Menurut *Kelman social influence theory*, perilaku penggunaan suatu inovasi ditentukan oleh komitmen spesifik pemakai. Komitmen spesifik tersebut dapat beragam, tergantung obyeknya. Pada studi ini sebagai obyek komitmen adalah penggunaan dan tujuan-tujuan penggunaan SAP tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan teori pengaruh sosial Kelman, dapat

diprediksi bahwa penerimaan inovasi oleh target pemakai, ditentukan komitmen pemakai terhadap penggunaan SAP. Komitmen atau keikatan individu terhadap penggunaan inovasi, mempengaruhi persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan sikap pada penggunaan inovasi. Pada studi variable sikap (*emotional state*) yang dimaksud pada model teori Kelman, sudah tercakup dalam variable persepsi kemudahan dan persepsi manfaat penggunaan, karena sesuai teori TAM, kedua variable tersebut juga didefinisikan sebagai variable sikap.

Komitmen pengguna atau komitmen pegawai pada penggunaan SAP, yang diukur dari identifikasi dan internalisasi individu terhadap tujuan penggunaan SAP, terbukti berpengaruh positif signifikan baik terhadap persepsi kemudahan maupun persepsi manfaat. Hasil ini menunjukkan bahwa komitmen pengguna merupakan satu-satunya variable bebas yang terbukti berpengaruh secara langsung terhadap persepsi kemudahan dan manfaat penggunaan SAP. Lebih lanjut, komitmen pengguna juga memiliki pengaruh total terbesar terhadap penerimaan SAP, dibanding variable bebas lainnya. Hasil tersebut jelas menunjukkan pentingnya komitmen pegawai untuk mendukung keberhasilan implementasi SAP di SKPD pemerintah propinsi Jawa Timur.

Hasil pengujian pengaruh komitmen pengguna di atas, mendukung studi sebelumnya yang dilakukan Sumiyama (2007) dan Malhotra dan Galleta (2005). Kedua studi sebelumnya membuktikan bahwa komitmen pengguna merupakan faktor penting bagi penerimaan dan perilaku penggunaan sistem. Komitmen afektif yang terukur melalui internalisasi dan identifikasi berpengaruh positif

terhadap persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan sistem baru dalam organisasi.

#### **6.2.4. Pengaruh Pimpinan Unit Kerja**

Pimpinan unit kerja atau atasan langsung dari target pemakai inovasi, merupakan representasi dari pengaruh lingkungan social di tempat kerja. Secara teoritik, atasan langsung adalah level pimpinan yang paling intensif interaksinya dengan bawahan, sehingga pendapat dan harapannya atas penggunaan sistem atau inovasi baru dalam unit kerjanya akan menjadi acuan atau panutan bawahannya. Pada model konseptual, dihipotesiskan bahwa pimpinan unit kerja berpengaruh terhadap terbentuknya persepsi manfaat, atau dengan kata lain pengaruhnya terhadap penerimaan SAP adalah bersifat tidak langsung.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pimpinan unit kerja tidak berpengaruh terhadap persepsi manfaat implementasi SAP. Akan tetapi, melalui modifikasi model, diketahui bahwa pimpinan unit kerja berpengaruh terhadap langsung terhadap penerimaan inovasi.

Temuan ini tetap mendukung teori TRA yang menyatakan bahwa kecenderungan perilaku individu juga dipengaruhi oleh norma subyektif, hanya saja proses terjadinya pengaruh atas perilaku tersebut dalam studi ini terjadi secara langsung, tanpa melalui variable sikap (persepsi manfaat). Penjelasan logic dari temuan tersebut adalah bahwa keputusan menerima atau menolak oleh individu terhadap inovasi pada konteks organisasi pemerintahan bersifat mandat (kewajiban), bukan sepenuhnya sukarela (*voluntary*) (Rogers, 1995). Artinya, mau

tidak mau, pegawai yang karena sudah menjadi tugasnya, harus menerima dan menggunakan ketentuan baru yang berlaku di organisasi pemerintahan. Hal ini juga didukung budaya birokratis yang berlaku dalam organisasi pemerintahan. Akibatnya, relasi atasan-bawahan cenderung berbasis kekuasaan (*power*). Bawahan akan cenderung menerima, apa yang dikerjakan sebagai bagian dari perintah atasan, yang harus dilaksanakan. Pada kondisi demikian, pengaruh pimpinan unit kerja (atasan langsung) menjadi tereduksi dalam pembentukan sikap (persepsi kemudahan dan persepsi manfaat) dari menggunakan inovasi (cara, ketentuan baru), tetapi lebih berperan dalam kesiapsediaan pegawai dalam penggunaan inovasi baru tersebut.

### **6.3. Implikasi, Keterbatasan dan Arah Penelitian Selanjutnya**

Hasil ini memberikan implikasi penting bagi organisasi pemerintah daerah dalam setiap kebijakan implementasi teknologi informasi. Perlu kesadaran mendalam bahwa dalam setiap proses implementasi inovasi baru, termasuk SAP dan penyusunan laporan keuangan daerah diperlukan perubahan sikap bagi pemakai. Organisasi perlu menjadi *internal marketing* yang efektif, dengan melakukan upaya-upaya agar inovasi yang akan dilakukan menjadi mudah digunakan dan meyakinkan kepada aparat pemerintah mengenai manfaat positif dari implementasi inovasi. Manfaat tersebut bukan hanya bagi kepentingan umum, akan tetapi juga manfaat bagi pegawai sendiri dalam menjalankan tugas-tugasnya. Melalui implementasi SAP, pekerjaan penyusunan laporan keuangan daerah, menjadi mudah dilakukan dan semakin memperkuat praktek *good governance*

dalam organisasi pemerintahan. Penanaman sikap positif kepada pegawai menjadi semakin urgen, karena sudah tak terelakkan lagi pentingnya implementasi standar akuntansi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.

Seperti halnya penelitian lain, penelitian tetap memiliki keterbatasan-keterbatasan yang perlu mendapat telaah lebih lanjut dalam studi berikutnya. **Pertama**, Pengukuran konstruk penerimaan inovasi menggunakan persepsi (*perceptual measure*), bukan perilaku aktual, mungkin memberikan peluang jawaban yang subyektif dalam mengisi kuesioner (Schillawaert, et al., 2001). Untuk mengeliminasi kemungkinan subyektifitas, indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur *acceptance*, merupakan kombinasi dari aspek perilaku (konatif) dan aspek emosional (afektif), sehingga ada kontrol antara perilaku dan perasaan, mengikuti mekanisme konsistensi seperti dijelaskan dalam teori sikap. Pendekatan ini dilakukan, karena implementasi telah berlangsung, sehingga responden sudah dapat melakukan evaluasi terhadap hasil dari penggunaan SAP. Dalam literatur adopsi inovasi, hasil dari evaluasi implementasi inovasi dapat berupa perilaku, yaitu keputusan untuk terus menggunakan (*continue to use*) atau sikap afektif (perasaan puas atau senang). Namun demikian, penggunaan ukuran perilaku aktual, misal tingkat kesalahan dalam melaksanakan tugas penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan disadari mampu memberikan penggambaran realitas dengan lebih baik, tetapi dalam praktek pendekatan ini relatif sulit dijalankan di lapangan.

*Kedua*, penggunaan desain *cross-sectional*, dimana data variabel dilakukan dalam waktu yang sama, berpotensi bias dalam menjelaskan hubungan kausalitas antar konstruk eksogen dan endogen. Oleh karena itu, untuk studi selanjutnya disarankan menggunakan desain eksperimental (memberikan perlakuan yang berbeda) atau studi longitudinal (data variabel eksogen dan data variabel endogen dikumpulkan dalam waktu berbeda).



## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin, 1997, *Reliabilitas dan Validitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifuddin, 2000, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*, Edisi Kedua, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Blanchard, P. Nick and James W. Thacker, 2003, *Effective Training: System, Strategies, and Practices*, Second Edition, New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Davis, F. 1989, "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology." *MIS Quarterly*, Volume 13, pp. 319-340.
- Ferdinand, Augusty, 2002, *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen: Aplikasi Model-model Rumit dalam Penelitian untuk Tesis Magister dan Disertasi Doktor*, Edisi 2, Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Fichman, R. G., 1992, "Information Technology Diffusion: A review of Empirical Research", *Proceedings of the 13<sup>th</sup> International Conference on IS*, Dallas, 1992.
- Frambach, Rudd T. and Niels Schillewaert, 1999, "Organizational Innovation Adoption: A Multi-Level Framework of Determinants and Opportunities for Future Research." *Working Papers*, ISBM Report 29-1999, The Pennsylvania State University,
- Garson, David, 2002, *Structural Equation Modeling*,
- Malhotra, Yogesh, and Dennis Galletta, 2005, "A Multidimensional Commitment Model of Volitional Systems Adoption and Usage Behavior" *Journal of Management Information Systems* / Summer 2005, Vol. 22, No. 1, pp. 117-151.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Nasution, Anwar, 2008, "Membangun Sistem Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel", Seminar Membangun Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Pekanbaru, 14 Mei 2008,

- OECD, 2002, "Models of Public Budgeting and Accounting Reform", *OECD JOURNAL ON BUDGETING* Volume 2/Supplement 1
- Oliorilanto, Rakoto Harimino, 2008, "Contingency Factors Affecting the Adoption of Accrual Accounting in Malagasy Municipalities", *International Journal on Governmental Financial Management*, Vol. VIII, No. 1, 2008.
- Ouda, Hassan A. G., 2005, "Additional Transition Problems of Accrual Accounting in the Public Sector of Developing Countries", *The International Consortium on Governmental Financial Management: Public Fund Digest*, Volume V, No. 1.
- Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Rahayu, S., U. Ludigdo dan D. Affandy, 2007, Studi Fenomenologis terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah: Bukti Empiris dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Jambi, *Simposium Akuntansi Nasional X*, Unhas Makasar 26-28 Juli 2007.
- Ramayah, T., Rusinah Siron, Noornina Dahlan, and Osman Mohamad, 2002, "Technology Usage Among Owners/Managers of SME's: The Role Of Demographic and Motivational Variables", The proceedings of The 6<sup>th</sup> Annual Asian-Pacific Forum for Small Business on *Small and Medium Enterprises Linkages, Networking and Clustering*, Kuala Lumpur, Malaysia, 16-18<sup>th</sup> October 2002.
- Robbins, Stephen P., 2001. *Perilaku Organisasi: Konsep Kontroversi Aplikasi*, Jilid 1, Alih Bahasa Pujaatmaka, Jakarta: Prenhallindo.
- Rogers, Everett, 1995, *Diffusion of Innovation*, New York: The Free Press
- Schillewaert, Niels, Michael J. Ahearne, Ruud T. Frambach, and Rudy K. Moenaert, 2001, "The Acceptance of Information Technology in the Sales Force", *Working Paper*, eBusiness Research Center, The Pennsylvania State University,
- Sekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur, 2007, *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah* Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
- Smith, J.F. 1999. The Benefits and Threats of PBB: An Assesment of Modern Reform. *Public Budgeting & Finance*, Fall: 3-14.

Solikin, Akhmad, 2006, "Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Perkembangan dan Permasalahan", *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2, No. 2, November 2006 Hal 1 – 15

Sugiono, 2001. *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi Ketiga, Bandung: CV Alfabeta

Sumiyana, 2006, "Model Komitmen Multidimensional atas Pilihan Adopsi Sistem dan Perilaku Pemraktikan (Studi Empiris di Yogyakarta)", *Simposium Akuntansi Nasional IX*, Padang: 23-26 Agustus 2006.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, *Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia*.

Syakhroza, A. 2003, "Reformasi Profesi Akuntansi Sektor Publik dan Good Government Governance", *USAHAWAN* NO. 02 TH XXXII FEBRUARI 2003, hal 13-19.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999. tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang RI No. 25 Tahun 1999. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004. tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

**Lampiran 1: Daftar kuesioner**

No: .....(diisi peneliti)

**Bapak/Ibu yang terhormat,**

Di tengah kesibukan Anda, perkenankanlah kami memohon kesediaannya untuk mengisi kuisisioner berikut, berkaitan dengan penelitian tentang penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk penatausahaan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah, dan tidak mempengaruhi status dan posisi Anda di organisasi. Oleh karena itu, dimohon memberikan jawaban sesuai kondisi dan pendapat Anda. Sebelum memberikan jawaban, mohon memahami petunjuk pengisiannya.

Terima kasih  
Ttd

Peneliti

**BAGIAN I: Identitas Responden**

Nama : .....

Umur : .....

Jenis kelamin : .....

Pendidikan terakhir : .....

SKPD : .....

Jabatan saat ini : .....

Jabatan sebelumnya : .....

Lama menempati jabatan saat ini: ..... tahun

Pangkat/Golongan : .....

**BAGIAN II**

Berikutnya untuk kuesioner-kuesioner berikut, Anda diminta memberikan skor terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan. Caranya isilah kotak jawaban dari skor 1 sampai 5, dengan ketentuan:

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju

Pernyataan-pernyataan	Skor
<b>A. Pelatihan</b>	
1. Saya mendapat pelatihan intensif dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.	1 2 3 4 5
2. Saya mendapat pelatihan intensif tentang penyusunan LKPD.	1 2 3 4 5
3. Materi pelatihan SAP dan penyusunan LKPD tersedia lengkap dan mudah dipelajari.	1 2 3 4 5
4. Modul atau buku manual sebagai bahan ajar pelatihan berisi lengkap petunjuk penyusunan LKPD dan penerapan SAP.	1 2 3 4 5
5. Modul atau buku manual sebagai bahan ajar pelatihan mudah dipelajari.	1 2 3 4 5
6. Instruktur pelatihan LKPD dan SAP adalah memiliki penguasaan yang baik terhadap materi.	1 2 3 4 5
7. Instruktur pelatihan LKPD dan SAP mampu menyampaikan materi dengan baik.	1 2 3 4 5
8. Sebagian besar materi pelatihan penyusunan LKPD dan SAP dapat saya terapkan dalam pekerjaan saya.	1 2 3 4 5
<b>B. Dukungan teknis</b>	
9. Petugas tahu pasti kepada siapa harus bertanya manakala membutuhkan asistensi/bantuan dalam menyusun LKPD berbasis SAP.	1 2 3 4 5
10. Tersedia unit yang siap setiap saat untuk memberikan asistensi dalam memecahkan kesulitan penyusunan LKPD berbasis SAP.	1 2 3 4 5
11. Teknologi informasi saat ini, memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan penyusunan LKPD dan SAP.	1 2 3 4 5
12. Tersedia buku manual dan pedoman secara lengkap tentang bagaimana penyusunan LKPD sesuai SAP.	1 2 3 4 5
13. Jika diperlukan peralatan pendukung yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, segera dipenuhi.	1 2 3 4 5
<b>C. Komitmen implementasi</b>	
14. Jajaran pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki keinginan yang kuat terhadap keberhasilan implementasi SAP.	1 2 3 4 5
15. Secara konsisten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya keras untuk mewujudkan keberhasilan implementasi SAP.	1 2 3 4 5
16. Jajaran pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mempromosikan secara intensif SAP ke semua unit kerja.	1 2 3 4 5
17. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan komitmen yang jelas dalam mencapai tujuan implementasi SAP untuk penyusunan laporan keuangan.	1 2 3 4 5

<b>D. Pengalaman pelaksanaan tugas sejenis sebelumnya</b>	
18. Sebelum menempati posisi yang sekarang, saya telah sering mengerjakan tugas-tugas penatausahaan atau akuntansi di tempat kerja saya.	1 2 3 4 5
19. Sebelum menempati posisi yang sekarang, saya sering mengerjakan tugas penyusunan laporan keuangan, misal membuat neraca dan laporan realisasi anggaran di SKPD saya.	1 2 3 4 5
20. Sebelum menempati posisi yang sekarang, saya cukup memahami prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan.	1 2 3 4 5
21. Sebelum menempati posisi yang sekarang, saya sudah terbiasa bekerja dengan menggunakan komputer.	1 2 3 4 5
<b>E. Komitmen penggunaa:</b>	
22. Saya merasa cocok dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam SAP.	1 2 3 4 5
23. Saya merasa bersalah, jika hasil audit laporan keuangan dinilai kurang baik.	1 2 3 4 5
24. Saya ikut bertanggung jawab dalam penyusunan LKPD yang sesuai SAP.	1 2 3 4 5
25. Secara pribadi, saya mendukung tujuan penyusunan LKPD berbasis SAP, menurut saya adalah sesuatu penting.	1 2 3 4 5
26. Saya mendukung tujuan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, maka LKPD harus disusun sesuai SAP.	1 2 3 4 5
27. Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang tercermin pada LKPD, sesuai dengan prinsip-prinsip yang saya yakini.	1 2 3 4 5
28. Saya bangga, jika mampu penyusunan LKPD sesuai SAP.	1 2 3 4 5
<b>F. Pengaruh pimpinan unit kerja</b>	
29. Pimpinan di unit kerja saya, senantiasa memotivasi saya untuk melaksanakan tugas pembuatan laporan keuangan sesuai ketentuan SAP.	1 2 3 4 5
30. Secara eksplisit, pimpinan unit kerja saya mendukung penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan.	1 2 3 4 5
31. Secara eksplisit, pimpinan unit kerja saya menunjukkan pentingnya penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP.	1 2 3 4 5
32. Secara eksplisit, pimpinan unit kerja saya menunjukkan keyakinannya bahwa SAP memiliki manfaat yang lebih baik untuk penyusunan laporan keuangan dibanding ketentuan sebelumnya.	1 2 3 4 5
<b>G. Kemudahan</b>	
33. Saya tidak mengalami kesulitan dalam mempelajari SAP.	1 2 3 4 5
34. Ketentuan-ketentuan SAP mudah diterapkan.	1 2 3 4 5
35. Dengan berpedoman pada SAP, penyusunan laporan LKPD lebih mudah dilakukan.	1 2 3 4 5
36. Dengan berpedoman pada SAP, tugas penatausahaan di SKPD saya lebih mudah dilaksanakan.	1 2 3 4 5
<b>H. Manfaat SAP</b>	
37. SAP mempercepat penyelesaian penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.	1 2 3 4 5
38. LKPD berbasis SAP meningkatkan kualitas informasi LKPD.	1 2 3 4 5
39. LKPD berbasis SAP meningkatkan transparansi pemerintahan daerah.	1 2 3 4 5
40. LKPD berbasis SAP meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.	1 2 3 4 5
41. Penerapan SAP dalam penatausahaan dan penyusunan LKPD mengurangi potensi penyimpangan penggunaan anggaran.	1 2 3 4 5
42. Penerapan SAP dalam penatausahaan dan penyusunan LKPD meningkatkan rasa aman bagi penyusun laporan keuangan.	1 2 3 4 5

<b>I. Penerimaan SAP</b>	
43. Dengan penerapan SAP, membuat penyusunan LKPD menjadi lebih menyenangkan.	1   2   3   4   5
44. Dengan penerapan SAP untuk penatausahaan dan penyusunan LKPD, rasa enggan untuk melakukan tugas-tugas tersebut semakin berkurang.	1   2   3   4   5
45. Dengan penerapan SAP untuk penatausahaan dan penyusunan LKPD, saya semakin termotivasi untuk dapat menjalankan tugas tersebut dengan lebih baik.	1   2   3   4   5
46. Dengan penerapan SAP untuk penatausahaan dan penyusunan LKPD, saya semakin termotivasi untuk meningkatkan kompetensi saya dalam tugas tersebut.	1   2   3   4   5
47. Dengan penerapan SAP untuk penatausahaan dan penyusunan LKPD, saya semakin termotivasi untuk memperdalam penguasaan dalam bidang akuntansi pemerintahan.	1   2   3   4   5
48. Kesulitan dalam penyusunan LKPD semakin berkurang, sejak digunakannya SAP.	1   2   3   4   5
49. Saya merasa kepuasan kerja saya semakin meningkat sejak penerapan SAP dalam penyusunan LKPD.	1   2   3   4   5
50. Saya merasa produktivitas pelaksanaan tugas-tugas penatausahaan semakin baik sejak penerapan.	1   2   3   4   5
51. Saya merasa kinerja saya dalam penyusunan LKPD menjadi semakin baik sejak penerapan SAP.	1   2   3   4   5

Terima kasih  
Peneliti

Ttd

Ira Indriyanti

## Empiran 2: Data Penelitian

INSTANSI/SKPD	JABATAN	Pelatihan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
BADAN KETAHANAN PANGAN	PPK/KASUBAG KEU	5	4	4	3	3	4	4	4
BADAN KETAHANAN PANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	4	4	4	4	4	4	4	4
BADAN KETAHANAN PANGAN	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	5	5	4	4	4	4	4	4
DINAS PARIWISATA	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	3	3	4	3	4	3	3	4
DINAS PARIWISATA	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	3	3	4	3	3	3	3	3
DINAS PARIWISATA	PPK/KASUBAG KEU	4	4	4	4	4	4	4	3
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	PPK/KASUBAG KEU	4	5	4	4	5	5	4	5
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	4	3	5	5	4	4	3	4
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	3	3	3	3	3	3	3	3
DINAS PENDAPATAN	PPK/KASUBAG KEU	5	4	5	4	4	3	4	5
DINAS PENDAPATAN	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	5	5	5	4	4	3	3	4
DINAS PENDAPATAN	PENCATAT PEMBUKUAN/STAF KEU	4	5	5	3	5	4	5	5
SEKRETARIAT DPRD	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	3	3	3	3	3	3	3	3
SEKRETARIAT DPRD	PPK/KASUBAG KEU	4	4	4	4	4	4	3	3
SEKRETARIAT DPRD	PENCATAT PEMBUKUAN/STAF KEU	4	5	4	4	4	4	5	4
DINAS KEPENDUDUKAN	PPK/KASUBAG KEU	5	4	4	4	4	5	4	3
DINAS KEPENDUDUKAN	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	4	4	5	4	4	4	5	4
DINAS KEPENDUDUKAN	PENCATAT PEMBUKUAN/STAF KEU	5	5	4	4	4	5	5	4
BAPEDAL	PPK/KASUBAG KEU	5	4	5	4	4	5	5	5
BAPEDAL	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	4	3	4	5	4	5	5	4
BALITBANG	PPK/KASUBAG KEU	5	5	5	3	5	5	5	5
BALITBANG	PEMBAUT DOKUMEN/STAF KEU	2	2	4	2	3	3	3	4
BALITBANG	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	5	5	5	4	4	5	4	3
DINAS PERKEBUNAN	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	4	5	4	4	4	5	4	4
DINAS PERKEBUNAN	PENCATAT PEMBUKUAN/STAF KEU	4	4	4	4	5	4	4	4
DINAS PERKEBUNAN	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	3	3	3	3	3	3	4	4
DINAS PERHUBUNGAN	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	4	4	4	3	3	4	4	4
DINAS PERHUBUNGAN	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	5	4	4	4	4	4	4	4
DINAS PERHUBUNGAN	PEMBAUT DOKUMEN/STAF KEU	5	5	4	4	4	4	4	4
DINAS PERINDAG	PPK/KASUBAG KEU	4	4	4	4	4	4	3	3
DINAS PERINDAG	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	4	4	4	4	4	4	4	4
DINAS PERINDAG	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	2	2	2	3	3	3	3	3
DINAS KOPERASI	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	3	2	3	3	3	3	2	3
DINAS KOPERASI	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	3	3	3	3	2	3	2	3
DINAS KOPERASI	PPK/KASUBAG KEU	3	2	3	3	3	3	2	3
DINAS KESEHATAN	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	5	5	3	5	3	4	4	4
DINAS KESEHATAN	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	5	4	4	4	4	4	4	4
DINAS KESEHATAN	PEMBAUT DOKUMEN/STAF KEU	4	3	4	5	3	4	5	3
DINAS SOSIAL	PPK/KASUBAG KEU	5	5	4	4	4	4	4	4
DINAS SOSIAL	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	4	2	2	3	2	2	3	2
DINAS SOSIAL	PEMBAUT DOKUMEN/STAF KEU	2	2	3	3	2	3	3	2
KASDA	PPK SKPD /KASI PROGRAM	5	4	5	5	3	3	3	5
KASDA	PEMBAUT DOKUMEN/STAF KEU	4	3	2	2	2	3	3	4
Kantor Satpol PP	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	4	3	4	5	3	4	5	3
Kantor Satpol PP	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	3	2	3	2	3	3	2	4
Dinas ESDM	PPK/KASUBAG KEU	4	3	5	4	3	2	3	2
Dinas ESDM	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	4	4	4	4	3	5	5	4
Dinas ESDM	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	2	2	3	2	2	3	2	2
DINAS TENAGA KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	4	4	4	4	4	4	4	4
DINAS TENAGA KERJA	FUNGSI AKUNTANSI/STAF	5	4	5	5	4	5	4	4
DINAS TENAGA KERJA	PPK / KASUBAG KEU	4	4	5	5	4	4	4	4





NO	Manfaat						Penerimaan SAP										Nilai Rata-rata					
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	x1	x2	x3	x4	y1	y2	y3
1	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3.71	3.50	3.71	4.00	4.00	3.67	3.78
2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.82	4.50	3.86	3.75	4.00	3.83	4.00
3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4.00	4.50	3.86	4.00	4.00	3.50	3.89
4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	3.65	4.00	4.71	5.00	4.50	4.50	4.33
5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3.12	3.25	4.00	4.00	3.50	4.00	3.78
6	4	4	4	3	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3	4	3.41	3.50	3.43	3.25	3.00	3.33	2.78
7	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	3	4	4	3	3	4.29	2.75	4.57	3.25	3.25	4.67	3.78
8	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4.35	2.00	4.57	3.75	4.25	4.17	4.22
9	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	2	3	3	3.41	2.25	4.29	2.75	2.50	3.17	3.11
10	4	5	5	4	5	4	5	4	4	3	4	3	4	5	4	4.00	3.50	3.86	3.00	4.25	4.50	4.00
11	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3.94	3.50	4.29	2.50	4.00	4.67	3.89
12	5	4	3	5	4	4	5	4	5	3	4	5	4	4	4	4.47	4.50	4.43	3.50	3.75	4.17	4.22
13	4	4	5	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3.47	4.00	4.14	3.75	4.00	3.83	3.78
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.82	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
15	5	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4.29	4.75	4.71	4.00	4.50	4.67	4.78
16	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.12	3.25	4.29	5.00	3.75	4.00	4.00
17	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4.35	3.25	4.00	4.25	3.75	4.00	4.22
18	5	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4.41	3.25	5.00	5.00	4.00	4.67	4.78
19	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4.18	3.00	4.43	4.00	4.50	3.33	3.11
20	4	5	5	5	5	3	3	4	4	5	5	4	4	5	4	4.12	3.25	4.43	5.00	4.00	4.50	4.22
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.88	4.00	4.00	5.00	3.75	4.00	4.00
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.35	2.75	3.43	2.00	3.00	3.00	3.00
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.41	3.50	4.43	5.00	3.25	4.00	4.00
24	4	4	4	4	4	4	3	2	4	3	4	2	4	4	4	4.24	4.00	3.29	4.50	3.50	4.00	3.33
25	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4.18	3.25	3.43	3.25	3.75	3.33	3.67
26	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3.41	3.50	3.71	4.00	3.25	4.00	3.78
27	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3.65	3.50	3.14	3.75	3.50	3.50	3.56
28	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3.88	3.50	3.14	3.75	3.50	3.50	3.67
29	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4.12	4.50	4.14	3.75	4.00	3.67	3.89
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.82	3.25	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
31	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3.47	2.75	3.71	3.00	3.00	3.67	3.11
32	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	2	3	3	3.24	2.75	4.29	2.50	2.50	3.17	3.11
33	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3.18	4.00	3.71	4.00	2.75	3.50	3.67
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.18	3.50	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00
35	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3.12	2.75	3.71	4.00	2.75	3.83	3.56
36	4	3	4	4	1	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	4.06	2.25	3.29	3.75	3.00	3.17	3.00
37	4	4	5	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4.00	4.00	4.14	3.75	4.00	3.83	3.78
38	3	3	4	4	3	3	3	5	4	4	3	4	4	4	4	3.94	3.50	3.43	4.00	5.00	3.33	3.89
39	3	4	4	4	4	3	3	3	4	5	4	3	4	4	4	3.94	4.75	3.57	4.00	4.00	3.67	3.78
40	4	3	2	3	2	3	3	2	3	2	2	3	3	3	2	2.59	3.00	3.29	2.00	2.75	2.83	2.56
41	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	2	2	2.53	2.25	3.00	2.50	2.50	3.83	3.22
42	4	5	5	5	3	4	3	2	5	5	5	3	5	4	4	3.88	5.00	4.57	4.25	4.25	4.33	4.00
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2.88	4.00	3.00	3.00	2.75	3.00	3.00
44	5	3	4	3	4	3	3	5	4	3	4	4	4	3	5	3.82	3.25	3.57	4.00	4.25	3.67	3.89
45	2	4	2	2	4	2	2	2	4	1	1	3	4	3	3	2.82	2.00	3.29	4.00	2.75	2.67	2.56
46	4	3	4	4	3	3	3	2	3	4	4	4	4	4	3	3.53	4.50	3.71	3.50	3.25	3.50	3.44
47	4	3	3	3	4	4	4	4	5	5	4	4	3	3	4	4.06	3.50	4.00	4.00	3.75	3.50	4.00
48	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	3.18	4.25	4.14	4.00	4.00	4.67	4.56
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3.82	3.50	4.00	2.00	4.00	4.00	3.78
50	4	5	5	4	5	4	4	2	4	4	5	4	4	5	5	4.41	4.00	3.71	4.50	4.75	4.50	4.11
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.06	3.75	4.14	4.75	4.00	4.00	4.00

0	INSTANSI/SKPD	JABATAN	Pelatihan							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	Badan Penanaman Modal	PPK / KASUBAG KEU	3	4	4	4	5	3	3	3
3	Badan Penanaman Modal	FUNGSI AKUNTANSI/STAF	5	5	5	4	4	5	5	4
4	Bappeprop	FUNGSI AKUNTANSI / STAF	4	4	5	4	4	4	4	4
5	Bappeprop	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU / STAF	4	4	4	4	4	4	4	4
6	BADAN ARSIP	PPK/KASUBAG KEU	5	5	4	4	4	4	4	4
7	BADAN ARSIP	PENCATAT PEMBUKUAN/STAF KEU	4	4	4	4	4	4	4	4
8	BANDIKLAT	PENCATAT PEMBUKUAN/STAF KEU	2	4	3	3	3	4	3	4
9	BANDIKLAT	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	4	2	2	3	3	3	3	4
0	BANDIKLAT	PPK/KASUBAG KEU	2	4	3	2	2	2	3	3
1	DINAS PU BINA MARGA	PPK/KASUBAG KEU	5	5	4	4	4	4	4	4
2	DINAS PU BINA MARGA	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	4	4	4	3	3	4	4	4
3	DINAS PU BINA MARGA	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	2	2	3	3	3	3	3	3
4	DINAS P & K	PPK/KASUBAG KEU	5	5	5	3	3	4	4	5
5	DINAS P & K	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	5	5	5	4	4	5	4	3
6	DINAS P & K	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	2	2	4	4	3	3	3	4
7	DINAS PETERNAKAN	PPK/KASUBAG KEU	5	5	5	5	5	5	5	4
8	DINAS PETERNAKAN	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	5	4	5	5	5	5	5	4
9	DINAS PETERNAKAN	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	5	4	4	5	4	4	5	5
0	DINAS PERTANIAN	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	5	5	5	4	4	5	5	4
1	DINAS PERTANIAN	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	5	5	5	4	4	5	5	4
2	DINAS PERTANIAN	PPK/KASUBAG KEU	3	3	4	4	4	3	3	4
3	BPDE	PPK/KASUBAG KEU	4	4	4	4	4	4	4	4
4	BPDE	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	4	4	4	4	4	4	3	4
5	BPDE	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	4	4	4	4	4	4	3	4
6	DINAS PENGAIRAN	PPK/KASUBAG KEU	3	3	4	4	4	4	4	4
7	DINAS PENGAIRAN	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	5	4	4	4	4	3	4	4
8	DINAS PENGAIRAN	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	4	4	4	4	4	4	4	3
9	DINAS PEMUKIMAN	PPK/KASUBAG KEU	4	4	4	4	4	4	3	3
0	DINAS PEMUKIMAN	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	5	4	4	4	4	4	4	3
1	DINAS PEMUKIMAN	PENCATAT PEMBUKUAN/STAF KEU	5	5	4	4	4	4	5	4
2	DINAS KEHUTANAN	PPK/KASUBAG KEU	4	4	4	3	3	4	4	4
3	DINAS KEHUTANAN	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	4	4	4	4	4	4	4	4
4	DINAS KEHUTANAN	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	5	4	4	4	4	4	4	4
5	DINAS PERIKANAN & KELAUTAN	PPK/KASUBAG KEU	5	5	5	3	3	4	4	5
6	DINAS PERIKANAN & KELAUTAN	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	4	4	4	4	3	3	3	3
7	DINAS PERIKANAN & KELAUTAN	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	5	5	5	4	4	5	4	3
8	BAPEMAS	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	3	4	3	3	3	4	3	4
9	BAPEMAS	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	4	3	3	3	3	3	3	4
0	BAPEMAS	PPK/KASUBAG KEU	4	4	4	4	4	4	3	3
1	DLLAJ	PPK/KASUBAG KEU	5	4	5	4	4	3	4	5
2	DLLAJ	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	5	5	5	4	4	3	3	4
3	DLLAJ	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	5	4	4	4	4	5	4	3
4	DINAS INFOKOM	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	3	3	3	3	3	3	3	3
5	DINAS INFOKOM	PENCATAT PEMBUKUAN/STAF KEU	4	4	3	3	2	3	2	3
6	DINAS INFOKOM	PPK/KASUBAG KEU	4	4	3	3	3	3	3	3
7	Badan Pengawasan	BENDAHARA PENGELUARAN / STAF KEU	5	4	5	4	5	5	4	4
8	Badan Pengawasan	FUNGSI AKUNTANSI/STAF KEU	5	4	5	5	4	5	5	4
9	Badan Perpustakaan	PENCATAT PEMBUKUAN/STAF KEU	5	5	4	4	4	4	5	4
0	Badan Perpustakaan	PENCATAT PEMBUKUAN/STAF KEU	4	5	4	4	4	4	5	4
1	Badan Kesatuan Bangsa	PPK/KASUBAG KEU	5	5	4	4	4	4	4	4
2	Badan Kesatuan Bangsa	FUNGSI AKUNTANSI/STAF	4	4	4	4	4	4	4	4

Dukungan teknis					Sosialisasi				Pengalaman				Komitmen pengguna							Pimpinan UK				Kemudahan			
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
3	3	2	3	4	5	5	3	4	4	4	3	5	3	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	2	3	3	4
4	4	3	4	5	5	5	4	4	2	2	2	2	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5	4	3	3	4	4
4	4	4	5	5	4	5	4	4	2	2	2	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	3	4	4	3	4	4	4	2	2	2	2	3	3	3	3
4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	3
3	4	4	4	4	2	2	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	5	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	3	5	5	4	4	5	5	5	5	5	3	4	4	4
4	4	4	5	4	4	4	4	3	2	3	2	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5
4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	5	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	3	2	3	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4
4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	2	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	2	2	3
4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4
4	2	2	3	4	3	3	3	3	4	4	4	5	4	2	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	5	4	4	3	4	5	4	3	3	3	3	4	4	3	4	5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	5	5	3	5	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5
3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3
3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3
3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	5	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3
5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2
5	5	4	4	5	5	3	5	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5
5	5	4	4	5	5	3	5	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5
3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	5	4	4
4	4	3	4	5	4	3	3	3	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	2	2	2	2	4	3	4	4

NO	Manfaat						Penermaan SAP									Nilai Rata-rata						
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	x1	x2	x3	x4	y1	y2	y3
52	4	4	5	5	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3.59	4.00	4.43	4.00	3.00	4.33	3.44
53	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4.41	2.00	4.00	4.75	3.50	4.00	3.67
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4.24	2.50	3.71	4.00	4.00	4.00	3.89
55	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3.94	4.00	3.86	3.75	4.00	3.83	3.78
56	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4.06	4.50	4.00	4.00	4.00	3.67	3.89
57	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.76	4.25	3.86	3.75	4.00	3.50	4.00
58	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3.59	4.00	3.71	2.00	3.00	4.00	3.11
59	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	2	3	3	4	3.41	3.00	4.00	2.00	3.75	3.50	3.33
60	4	3	3	3	3	3	3	2	4	3	1	3	3	3	2	2.82	3.25	3.86	2.00	3.00	3.17	2.67
61	3	4	4	4	4	3	2	2	4	4	4	3	4	4	4	4.06	4.00	4.14	4.00	4.00	3.67	3.44
62	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3.88	4.00	4.00	4.00	3.75	4.00	3.89
63	3	4	4	4	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3.24	3.50	3.43	3.00	3.00	3.83	2.89
64	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.29	3.75	4.00	4.00	3.75	3.67	4.00
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.29	4.25	4.43	5.00	3.75	4.00	4.00
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.41	2.75	3.29	3.00	3.00	3.00	3.00
67	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.53	4.00	4.14	4.25	4.00	4.17	4.00
68	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4.88	4.75	4.43	5.00	4.50	5.00	4.11
69	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4.59	4.00	4.57	4.50	5.00	4.50	4.11
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4.47	3.50	3.14	3.00	3.00	3.00	3.00
71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4.29	3.25	3.14	3.00	3.00	3.00	3.00
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.76	2.50	3.14	3.00	3.00	3.00	3.00
73	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4.06	2.75	4.29	4.00	4.00	4.00	3.89
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.88	3.25	3.86	3.75	3.75	4.00	4.00
75	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3.88	3.25	3.71	4.00	3.50	4.00	3.89
76	2	4	4	4	4	3	2	2	3	3	4	2	3	3	3	3.65	2.75	3.57	3.00	2.75	3.50	2.78
77	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4.18	4.75	4.29	3.75	3.50	4.00	3.67
78	4	4	4	4	3	3	1	1	3	3	3	3	2	3	3	3.41	4.25	3.43	3.00	3.00	3.67	2.44
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.82	3.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
80	4	4	5	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3.94	3.25	4.14	3.75	4.00	3.83	3.78
81	5	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4.35	4.25	5.00	5.00	4.00	4.67	4.78
82	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3.65	3.25	3.71	4.00	4.00	3.67	3.78
83	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.82	4.00	3.86	3.75	4.00	3.83	4.00
84	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3.94	4.50	3.86	4.00	4.00	3.50	3.89
85	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.29	4.00	4.00	4.00	3.75	3.67	4.00
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.59	2.75	3.29	3.00	3.00	3.00	3.00
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.29	4.00	4.43	5.00	3.75	4.00	4.00
88	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3.65	4.00	3.71	2.00	3.00	4.00	3.11
89	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	2	3	3	4	3.53	3.50	4.00	2.00	3.75	3.50	3.33
90	4	3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	3.35	3.25	3.86	3.00	2.50	3.17	3.00
91	4	5	5	4	5	4	5	4	4	3	4	3	4	5	4	4.00	3.50	3.86	3.00	4.50	4.50	4.00
92	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3.94	3.50	4.29	2.50	4.00	4.67	3.89
93	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.18	3.50	4.29	5.00	4.00	4.00	4.00
94	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3.29	3.00	3.71	4.00	2.75	3.50	3.67
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3.29	3.50	3.00	4.00	3.00	3.00	3.22
96	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3.35	4.00	3.71	4.00	2.75	3.83	3.56
97	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4.29	4.00	3.43	3.00	3.25	3.17	3.22
98	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4.41	3.50	3.14	3.25	2.75	3.17	3.22
99	5	3	5	5	3	4	4	5	5	3	5	4	4	5	4	4.35	3.50	5.00	5.00	4.00	4.17	4.33
100	5	4	5	5	3	4	4	5	5	3	5	4	5	4	5	4.29	4.25	4.71	4.25	4.50	4.33	4.44
101	3	4	4	4	4	3	3	3	4	5	4	3	4	4	4	3.94	3.75	3.57	3.75	4.25	3.67	3.78
102	3	4	4	4	5	4	4	4	4	5	3	4	3	5	5	3.82	4.25	3.86	2.00	3.75	4.00	3.89

## Lampiran 3: Validitas dan Reliabilitas

### Reliability

#### RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

##### Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
PLT1	61,3431	55,1385	,6541	,8902
PLT2	61,5392	54,9044	,6653	,8898
PLT3	61,4314	56,0893	,7067	,8886
PLT4	61,6765	57,9240	,5806	,8930
PLT5	61,7843	56,6857	,6974	,8893
PLT6	61,5882	56,0268	,7160	,8883
PLT7	61,6667	55,3531	,7080	,8882
PLT8	61,6863	58,9897	,5117	,8951
DKT1	61,7157	59,0174	,4383	,8976
DKT2	61,7255	58,2209	,4390	,8983
DKT3	61,6471	59,1613	,5081	,8952
DKT4	61,6863	56,5343	,6969	,8892
DKT5	61,6765	58,4983	,4650	,8968
KI1	61,3529	58,6861	,5290	,8946
KI2	61,4706	60,9249	,3043	,9014
KI3	61,3725	58,7509	,5615	,8938
KI4	61,5392	61,6767	,2640	,9020

##### Reliability Coefficients

N of Cases = 102,0

N of Items = 17

Alpha = ,8994

### Reliability

#### RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

##### Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
PGL1	10,6569	4,3266	,7041	,8696
PGL2	10,8431	4,1732	,7186	,8621
PGL3	10,9804	4,8115	,7009	,8757
PGL4	10,4020	5,0150	,5393	,8402

## Reliability Coefficients

N of Cases = 102,0

N of Items = 4

Alpha = ,8326

**Reliability**

## R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   ( A L P H A )

## Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
KPG1	23,5294	8,4694	,5802	,7970
KPG2	23,6275	8,1767	,4435	,8290
KPG3	23,4216	8,0482	,6935	,7780
KPG4	23,1569	8,4108	,6253	,7903
KPG5	23,1569	8,0940	,6815	,7801
KPG6	23,4412	9,0213	,4469	,8174
KPG7	23,3137	8,6135	,5517	,8016

## Reliability Coefficients

N of Cases = 102,0

N of Items = 7

Alpha = ,8230

**Reliability**

## R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   ( A L P H A )

## Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
PUK1	11,1471	6,5227	,8266	,9530
PUK2	11,0588	6,2935	,8883	,9348
PUK3	11,0784	5,9344	,9266	,9228
PUK4	11,0686	6,2230	,8899	,9342

## Reliability Coefficients

N of Cases = 102,0

N of Items = 4

Alpha = ,9516

**Reliability**

## R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   ( A L P H A )

## Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
EOU1	11,0490	3,5916	,5522	,7972
EOU2	11,0196	3,3858	,6437	,7553
EOU3	10,7157	3,1362	,6874	,7330
EOU4	10,7157	3,3738	,6322	,7606

## Reliability Coefficients

N of Cases = 102,0

N of Items = 4

Alpha = ,8107

**Reliability**

## R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   ( A L P H A )

## Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
PU1	19,0098	6,4652	,5133	,8398
PU2	18,8922	6,2754	,7231	,7977
PU3	18,7745	5,9387	,7531	,7890
PU4	18,8235	6,0874	,7879	,7849
PU5	19,1471	6,9386	,3934	,8619
PU6	19,0784	6,5680	,6161	,8176



## Reliability Coefficients

N of Cases = 102,0

N of Items = 6

Alpha = ,8423

**Reliability**

## RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

## Item-total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Alpha if Item Deleted
ACC1	29,5588	16,5064	,6347	,8913
ACC2	29,6275	15,5232	,6655	,8908
ACC3	29,2451	17,3948	,6015	,8937
ACC4	29,2647	16,6718	,6110	,8931
ACC5	29,2255	15,8001	,7336	,8834
ACC6	29,5000	17,0644	,6101	,8929
ACC7	29,3431	16,4256	,7417	,8836
ACC8	29,2353	16,5381	,7095	,8858
ACC9	29,2353	16,4193	,7352	,8840

## Reliability Coefficients

N of Cases = 102,0

N of Items = 9

Alpha = ,8999

## Lampiran 4 : Statistik deskriptif

### a. Frequency

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
BADAN ARSIP	2	2.0	2.0	2.0
Badan Kesatuan Bangsa	2	2.0	2.0	3.9
Badan Ketahanan Pangan	3	2.9	2.9	6.9
Badan Penanaman Modal	2	2.0	2.0	8.8
Badan Pengawasan	2	2.0	2.0	10.8
Badan Perpustakaan	2	2.0	2.0	12.7
BALITBANG	3	2.9	2.9	15.7
BANDIKLAT	3	2.9	2.9	18.6
BAPEDAL	2	2.0	2.0	20.6
BAPEMAS	3	2.9	2.9	23.5
BAPPEPROP	2	2.0	2.0	25.5
BPDE	3	2.9	2.9	28.4
DINAS ESDM	3	2.9	2.9	31.4
DINAS INFOKOM	3	2.9	2.9	34.3
DINAS KEHUTANAN	3	2.9	2.9	37.3
DINAS KEPENDUDUKAN	3	2.9	2.9	40.2
DINAS KESEHATAN	3	2.9	2.9	43.1
DINAS KOPERASI	3	2.9	2.9	46.1
DINAS P & K	3	2.9	2.9	49.0
DINAS PARIWISATA	3	2.9	2.9	52.0
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	3	2.9	2.9	54.9
DINAS PENDAPATAN	3	2.9	2.9	57.8
DINAS PENGAIRAN	3	2.9	2.9	60.8
DINAS PERHUBUNGAN	3	2.9	2.9	63.7
DINAS PERIKANAN & KELAUTAN	3	2.9	2.9	66.7
DINAS PERINDAG	3	2.9	2.9	69.6
DINAS PERKEBUNAN	3	2.9	2.9	72.5
DINAS PERMUKIMAN	3	2.9	2.9	75.5
DINAS PERTANIAN	3	2.9	2.9	78.4
DINAS PETERNAKAN	3	2.9	2.9	81.4
DINAS PU BINA MARGA	3	2.9	2.9	84.3
DINAS SOSIAL	3	2.9	2.9	87.3
DINAS TENAGA KERJA	3	2.9	2.9	90.2
DLLAJ	3	2.9	2.9	93.1
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2	2.0	2.0	95.1
KASDA	2	2.0	2.0	97.1
SEKRETARIAT DPRD	3	2.9	2.9	100.0
Total	102	100.0	100.0	

**b. Mean****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PLT1	102	2,00	5,00	4,0882	,91308
PLT2	102	2,00	5,00	3,8922	,92176
PLT3	102	2,00	5,00	4,0000	,77075
PLT4	102	2,00	5,00	3,7549	,72353
PLT5	102	2,00	5,00	3,6471	,72641
PLT6	102	2,00	5,00	3,8431	,76747
PLT7	102	2,00	5,00	3,7647	,83480
PLT8	102	2,00	5,00	3,7451	,68486
DKT1	102	2,00	5,00	3,7157	,77559
DKT2	102	1,00	5,00	3,7059	,87414
DKT3	102	2,00	5,00	3,7843	,66938
DKT4	102	1,00	5,00	3,7451	,74043
DKT5	102	2,00	5,00	3,7549	,80144
KI1	102	2,00	5,00	4,0784	,69917
KI2	102	2,00	5,00	3,9608	,71645
KI3	102	2,00	5,00	4,0588	,65738
KI4	102	3,00	5,00	3,8922	,65863
PGL1	102	1,00	5,00	3,6373	,88764
PGL2	102	1,00	5,00	3,4510	,91875
PGL3	102	1,00	5,00	3,3137	,75754
PGL4	102	2,00	5,00	3,8922	,83140
KPG1	102	3,00	5,00	3,7451	,65531
KPG2	102	1,00	5,00	3,6471	,86342
KPG3	102	2,00	5,00	3,8529	,66596
KPG4	102	3,00	5,00	4,1176	,63393
KPG5	102	3,00	5,00	4,1176	,66443
KPG6	102	2,00	5,00	3,8333	,63063
KPG7	102	3,00	5,00	3,9608	,64365
PUK1	102	2,00	5,00	3,6373	,86504
PUK2	102	2,00	5,00	3,7255	,86924
PUK3	102	2,00	5,00	3,7059	,91833
PUK4	102	2,00	5,00	3,7157	,88304
EOU1	102	2,00	5,00	3,4510	,72614
EOU2	102	2,00	5,00	3,4804	,72754
EOU3	102	2,00	5,00	3,7843	,77877
EOU4	102	2,00	5,00	3,7843	,73965
PU1	102	2,00	5,00	3,7353	,73020
PU2	102	3,00	5,00	3,8529	,61976
PU3	102	2,00	5,00	3,9706	,68152
PU4	102	2,00	5,00	3,9216	,62436
PU5	102	1,00	5,00	3,5980	,70724
PU6	102	2,00	5,00	3,6667	,61874
ACC1	102	1,00	5,00	3,4706	,69945
ACC2	102	1,00	5,00	3,4020	,83559
ACC3	102	3,00	5,00	3,7843	,57381
ACC4	102	1,00	5,00	3,7647	,69191
ACC5	102	1,00	5,00	3,8039	,73173

## IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ACC6	102	2,00	5,00	3,5294	,62467
ACC7	102	2,00	5,00	3,6863	,62901
ACC8	102	2,00	5,00	3,7941	,63462
ACC9	102	2,00	5,00	3,7941	,63462
X1	102	2,53	4,88	3,8482	,47325
X2	102	2,00	5,00	3,5662	,66835
X3	102	3,00	5,00	3,8963	,47629
X4	102	2,00	5,00	3,6961	,82626
Y1	102	2,50	5,00	3,6250	,59364
Y2	102	2,67	5,00	3,7913	,49744
Y3	102	2,44	4,78	3,6703	,50440
Valid N (listwise)	102				

## Lampiran 5: Uji Linieritas

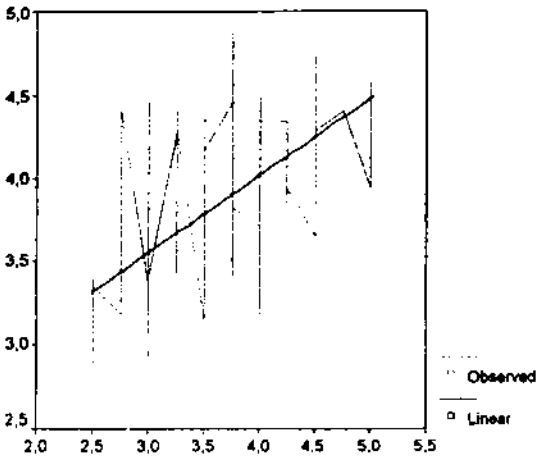
### Curve Fit

MODEL: MOD\_5.

Independent: Y1

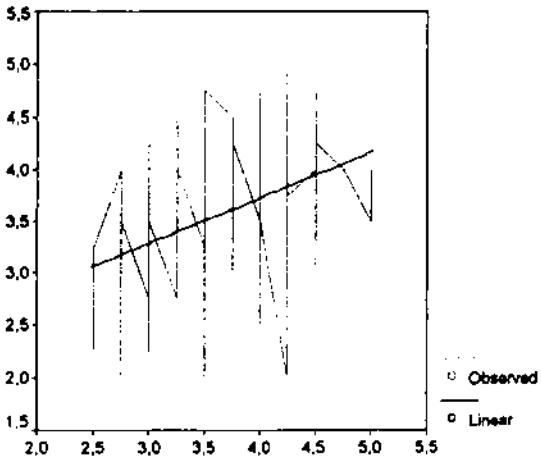
Dependent	Mth	Rsq	d.f.	F	Sigf	b0	b1
X1	LIN	,343	100	52,27	,000	2,1551	,4671
X2	LIN	,153	100	18,01	,000	1,9717	,4399
X3	LIN	,273	100	37,53	,000	2,3770	,4191

X1

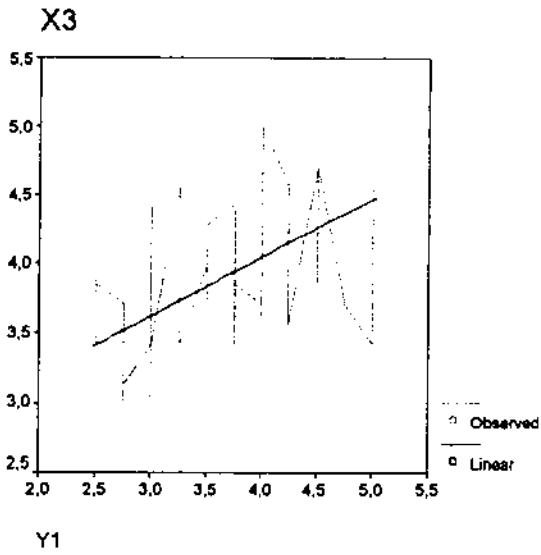


Y1

X2



Y1

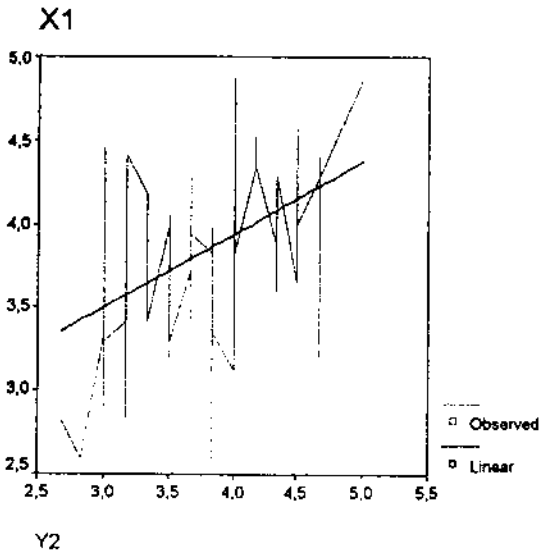


**Curve Fit**

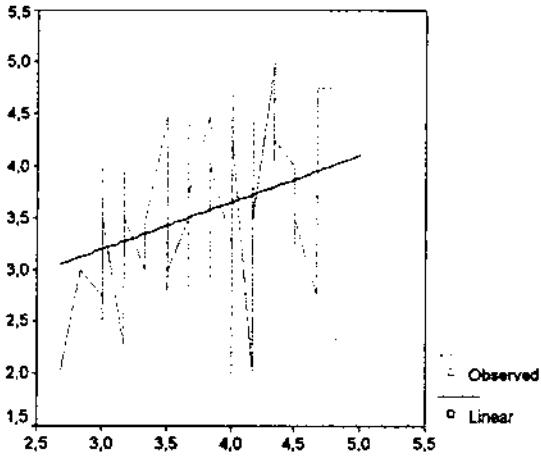
MODEL: MOD\_6.

Independent: Y2

Dependent	Mth	Rsq	d.f.	F	Sigf	b0	b1
X1	LIN	,214	100	27,19	,000	2,1805	,4399
X2	LIN	,113	100	12,72	,001	1,8552	,4513
X3	LIN	,506	100	102,47	,000	1,3138	,6812
X4	LIN	,158	100	18,80	,000	1,1909	,6608
Y1	LIN	,351	100	54,02	,000	,9455	,7068

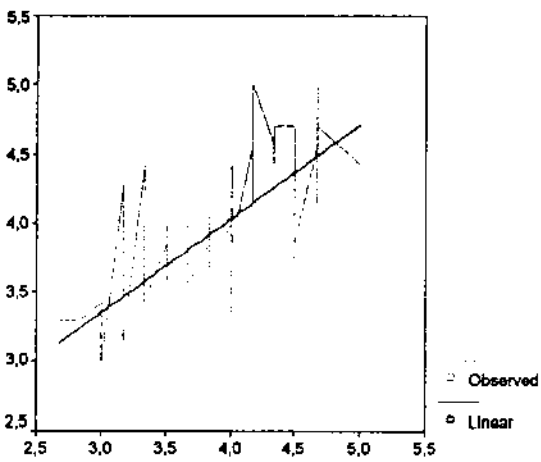


X2



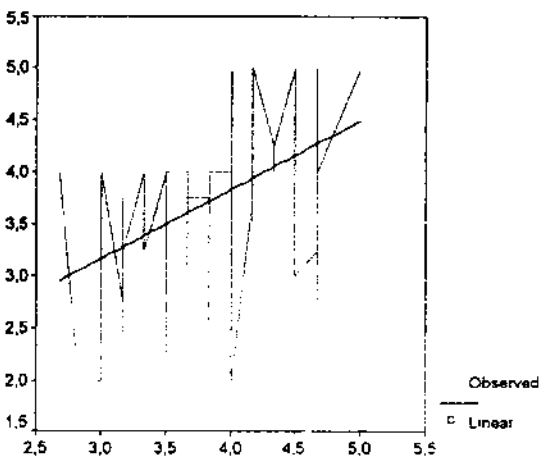
Y2

X3

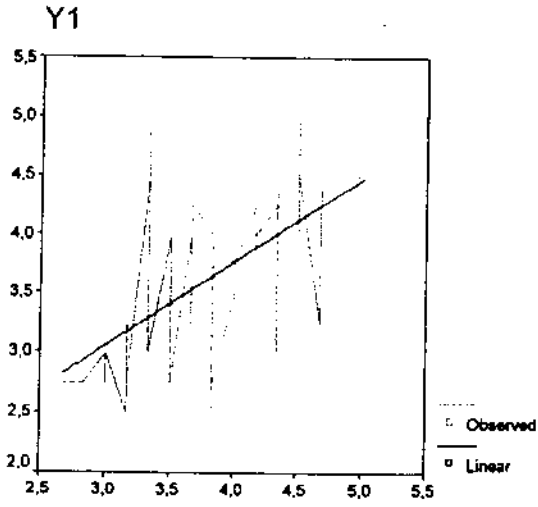


Y2

X4



Y2



Y2

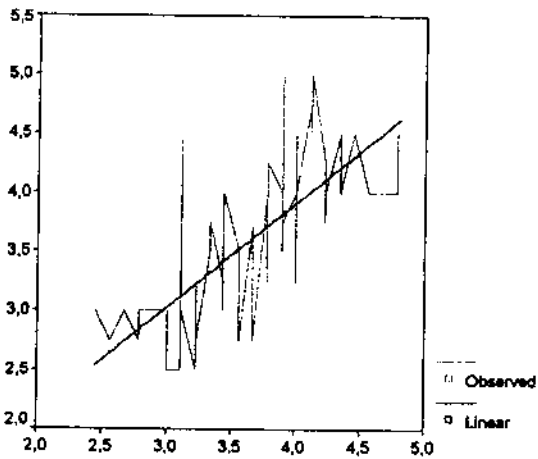
**Curve Fit**

MODEL: MOD\_7.

Independent: Y3

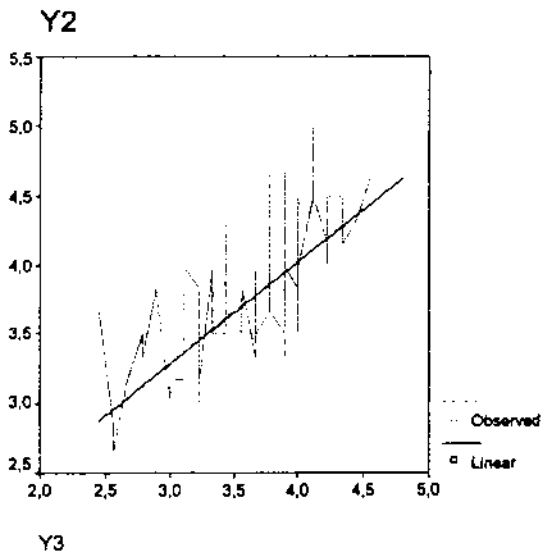
Dependent	Mth	Rsqr	d.f.	F	Sigf	b0	b1
Y1	LIN	,558	100	126,11	,000	,3990	,8790
Y2	LIN	,576	100	136,00	,000	1,0435	,7486

Y1



Y3





Lampiran 6: Output AMOS Model Awal

sap-iral  
Monday, January 12, 2009 07:54:36

Amos  
by James L. Arbuckle

Version 4.01

Copyright 1994-1999 SmallWaters Corporation  
1507 E. 53rd Street - #452  
Chicago, IL 60615 USA  
773-667-8635  
Fax: 773-955-6252  
<http://www.smallwaters.com>

\*\*\*\*\*

Title

sap-iral: Monday, January 12, 2009 07:54 PM

Your model contains the following variables

Y1	observed	endogenous
Y2	observed	endogenous
Y3	observed	endogenous
X1	observed	exogenous
X2	observed	exogenous
X3	observed	exogenous
X4	observed	exogenous

Z1 unobserved exogenous  
 Z3 unobserved exogenous  
 Z2 unobserved exogenous

Number of variables in your model: 10  
 Number of observed variables: 7  
 Number of unobserved variables: 3  
 Number of exogenous variables: 7  
 Number of endogenous variables: 3

Summary of Parameters

	Weights	Covariances	Variances	Means	Intercepts	Total
Fixed:	3	0	0	0	0	3
Labeled:	0	0	0	0	0	0
Unlabeled:	10	6	7	0	0	23
Total:	13	6	7	0	0	26

NOTE:  
 The model is recursive.

Assessment of normality

	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
X4	2.000	5.000	-0.434	-1.790	-0.298	-0.613
X3	3.000	5.000	0.088	0.364	-0.433	-0.893
X2	2.000	5.000	-0.260	-1.074	-0.295	-0.608
X1	2.530	4.880	-0.469	-1.935	0.003	0.006
Y1	2.500	5.000	-0.125	-0.515	-0.744	-1.533
Y2	2.670	5.000	0.034	0.140	-0.472	-0.973
Y3	2.440	4.780	-0.343	-1.412	-0.305	-0.629
Multivariate					4.197	1.788

Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance)

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
16	24.462	0.001	0.092
40	19.248	0.007	0.176
75	17.927	0.012	0.132
42	16.519	0.021	0.163
35	16.062	0.025	0.107
65	15.693	0.028	0.068
45	14.186	0.048	0.218
8	13.604	0.059	0.250
29	13.131	0.069	0.271
6	13.099	0.070	0.174
7	12.951	0.073	0.128
97	12.205	0.094	0.250

21	12.119	0.097	0.185
50	11.945	0.102	0.158
67	11.720	0.110	0.151
57	11.322	0.125	0.203
49	10.348	0.170	0.573
101	10.344	0.170	0.471
47	10.338	0.170	0.372
15	9.985	0.189	0.471
4	9.462	0.221	0.682
37	9.390	0.226	0.635
66	9.378	0.227	0.550
85	9.332	0.230	0.485
10	9.138	0.243	0.517
89	9.138	0.243	0.426
55	9.120	0.244	0.350
78	8.857	0.263	0.434
68	8.855	0.263	0.350
88	8.738	0.272	0.343
30	8.594	0.283	0.356
56	8.440	0.295	0.378
46	8.358	0.302	0.353
98	8.198	0.315	0.384
38	8.058	0.327	0.404
33	8.033	0.330	0.343
39	8.032	0.330	0.271
18	7.900	0.341	0.286
32	7.824	0.348	0.267
95	7.813	0.349	0.210
86	7.631	0.366	0.257
20	7.624	0.367	0.200
11	7.592	0.370	0.164
60	7.458	0.383	0.182
96	7.354	0.393	0.185
31	7.304	0.398	0.160
9	7.256	0.403	0.137
93	6.789	0.451	0.383
91	6.768	0.453	0.326
92	6.686	0.462	0.320
51	6.678	0.463	0.258
74	6.250	0.511	0.548
19	6.161	0.521	0.552
87	5.935	0.547	0.679
73	5.764	0.568	0.752
5	5.477	0.602	0.883
22	5.358	0.616	0.902
69	5.286	0.625	0.899
25	5.130	0.644	0.930
36	5.095	0.648	0.914
58	4.989	0.661	0.926
54	4.986	0.662	0.894
17	4.929	0.669	0.884
62	4.845	0.679	0.888
41	4.690	0.698	0.923
102	4.661	0.701	0.902
81	4.448	0.727	0.953
3	4.404	0.732	0.943
14	4.318	0.743	0.947
84	4.216	0.755	0.954
24	4.193	0.757	0.937
43	4.140	0.764	0.929
99	4.125	0.765	0.901

23	3.935	0.787	0.947
26	3.927	0.788	0.920
44	3.692	0.815	0.969
13	3.591	0.825	0.974
12	3.530	0.832	0.970
70	3.501	0.835	0.958
100	3.356	0.850	0.973
83	3.341	0.852	0.957
2	3.218	0.864	0.967
90	3.187	0.867	0.953
53	3.162	0.870	0.932
63	3.161	0.870	0.890
82	3.152	0.871	0.836
28	3.068	0.879	0.829
61	2.858	0.898	0.904
79	2.724	0.909	0.923
72	2.586	0.920	0.939
94	2.489	0.928	0.936
64	2.455	0.930	0.902
1	2.037	0.958	0.989
71	1.930	0.964	0.988
48	1.813	0.969	0.987
80	1.800	0.970	0.966
27	1.632	0.977	0.971
77	1.471	0.983	0.971
34	1.276	0.989	0.974
76	1.119	0.993	0.960

Sample size: 102

Sample Covariances

	X4	X3	X2	X1	Y1	Y2	Y3
X4	0.676						
X3	0.166	0.225					
X2	0.126	0.079	0.442				
X1	0.194	0.103	0.088	0.222			
Y1	0.214	0.146	0.153	0.163	0.349		
Y2	0.162	0.167	0.111	0.108	0.173	0.245	
Y3	0.253	0.164	0.128	0.136	0.221	0.189	0.252

Eigenvalues of Sample Covariances

4.182e-002    6.615e-002    1.084e-001    1.568e-001    2.938e-001    4.070e-001  
 1.337e+000

Condition number of Sample Covariances = 3.196554e+001

Sample Correlations

	X4	X3	X2	X1	Y1	Y2	Y3
X4	1.000						

X3	0.427	1.000					
X2	0.230	0.251	1.000				
X1	0.502	0.460	0.282	1.000			
Y1	0.442	0.522	0.391	0.586	1.000		
Y2	0.398	0.711	0.336	0.462	0.592	1.000	
Y3	0.613	0.690	0.384	0.575	0.747	0.759	1.000

Eigenvalues of Sample Correlations

1.560e-001 2.747e-001 4.092e-001 5.367e-001 7.346e-001 8.355e-001  
 4.053e+000

Condition number of Sample Correlations = 2.598034e+001

Determinant of sample covariance matrix = 7.5128e+001

Model: Default model

Computation of degrees of freedom

Number of distinct sample moments: 28  
 Number of distinct parameters to be estimated: 23  
 -----  
 Degrees of freedom: 5

0e	3	0.0e+000	-1.6966e-001	1.00e+004	2.89567287531e+002	0	1.00e+004
1e	0	1.6e+001	0.0000e+000	1.03e+000	8.23408127712e+001	18	9.31e-001
2e	0	1.1e+001	0.0000e+000	2.72e-001	5.45808049080e+001	4	0.00e+000
3e	0	2.3e+001	0.0000e+000	5.04e-001	4.37391751336e+001	1	4.60e-001
4e	0	3.1e+001	0.0000e+000	2.61e-001	3.26738444310e+001	1	1.18e+000
5e	0	3.7e+001	0.0000e+000	1.08e-001	3.13888756586e+001	1	1.10e+000
6e	0	3.5e+001	0.0000e+000	1.61e-002	3.13539573098e+001	1	1.02e+000
7e	0	3.7e+001	0.0000e+000	4.55e-004	3.13539081562e+001	1	1.00e+000

Minimum was achieved

Chi-square = 31.354  
 Degrees of freedom = 5  
 Probability level = 0.000

Maximum Likelihood Estimates

Regression Weights:		Estimate	S.E.	C.R.	Label
	Y1 <---- X1	0.495	0.105	4.714	
	Y1 <---- X2	0.184	0.068	2.697	
	Y1 <---- X3	0.360	0.103	3.479	
	Y2 <---- X2	0.067	0.052	1.282	
	Y2 <---- X3	0.557	0.083	6.700	
	Y2 <---- Y1	0.208	0.074	2.825	
	Y2 <---- X4	0.013	0.046	0.289	
	Y2 <---- X1	0.037	0.091	0.401	
	Y3 <---- Y1	0.389	0.056	6.921	
	Y3 <---- Y2	0.495	0.067	7.374	

Standardized Regression Weights: Estimate

Y1 <---- X1	0.395
Y1 <---- X2	0.207
Y1 <---- X3	0.289
Y2 <---- X2	0.090
Y2 <---- X3	0.534
Y2 <---- Y1	0.248
Y2 <---- X4	0.022
Y2 <---- X1	0.035
Y3 <---- Y1	0.458
Y3 <---- Y2	0.488

Covariances:

	Estimate	S.E.	C.R.	Label
X1 <----> X2	0.088	0.032	2.724	
X2 <----> X4	0.126	0.056	2.248	
X1 <----> X4	0.194	0.043	4.510	
X2 <----> X3	0.079	0.032	2.446	
X3 <----> X4	0.166	0.042	3.946	
X1 <----> X3	0.103	0.024	4.203	

Correlations:

	Estimate
X1 <----> X2	0.282
X2 <----> X4	0.230
X1 <----> X4	0.502
X2 <----> X3	0.251
X3 <----> X4	0.427
X1 <----> X3	0.460

Variances:

	Estimate	S.E.	C.R.	Label
X1	0.222	0.031	7.106	
X2	0.442	0.062	7.106	
X3	0.225	0.032	7.106	
X4	0.676	0.095	7.106	
Z1	0.187	0.026	7.106	
Z2	0.102	0.014	7.106	
Z3	0.072	0.010	7.106	

Squared Multiple Correlations:

	Estimate
Y1	0.463
Y2	0.581
Y3	0.712

Implied (for all variables) Covariances

X4	X3	X2	X1	Y1	Y2	Y3
----	----	----	----	----	----	----

X4	0.676						
X3	0.166	0.225					
X2	0.126	0.079	0.442				
X1	0.194	0.103	0.088	0.222			
Y1	0.179	0.146	0.153	0.163	0.349		
Y2	0.155	0.167	0.111	0.108	0.173	0.245	
Y3	0.146	0.139	0.114	0.117	0.221	0.188	0.252

Implied (for all variables) Correlations

	X4	X3	X2	X1	Y1	Y2	Y3
X4	1.000						
X3	0.427	1.000					
X2	0.230	0.251	1.000				
X1	0.502	0.460	0.282	1.000			
Y1	0.369	0.522	0.391	0.586	1.000		
Y2	0.380	0.712	0.336	0.463	0.591	1.000	
Y3	0.354	0.587	0.343	0.494	0.746	0.759	1.000

Implied Covariances

	X4	X3	X2	X1	Y1	Y2	Y3
X4	0.676						
X3	0.166	0.225					
X2	0.126	0.079	0.442				
X1	0.194	0.103	0.088	0.222			
Y1	0.179	0.146	0.153	0.163	0.349		
Y2	0.155	0.167	0.111	0.108	0.173	0.245	
Y3	0.146	0.139	0.114	0.117	0.221	0.188	0.252

Implied Correlations

	X4	X3	X2	X1	Y1	Y2	Y3
X4	1.000						
X3	0.427	1.000					
X2	0.230	0.251	1.000				
X1	0.502	0.460	0.282	1.000			
Y1	0.369	0.522	0.391	0.586	1.000		
Y2	0.380	0.712	0.336	0.463	0.591	1.000	
Y3	0.354	0.587	0.343	0.494	0.746	0.759	1.000

Residual Covariances

	X4	X3	X2	X1	Y1	Y2
X4	8.666e-009					
X3	4.925e-009	2.799e-009				
X2	5.046e-009	2.866e-009	2.939e-009			
X1	5.135e-009	2.918e-009	2.990e-009	3.043e-009		



Y1	3.525e-002	2.764e-009	2.892e-009	2.785e-009	3.094e-008		
Y2	7.327e-003	-7.365e-011	3.408e-009	3.745e-009	4.736e-004	1.970e-004	
Y3	1.070e-001	2.464e-002	1.374e-002	1.918e-002	2.344e-004	2.817e-004	

Y3

Y3	2.306e-004
----	------------

Standardized Residual Covariances

	X4	X3	X2	X1	Y1	Y2	Y3
X4	0.000						
X3	0.000	0.000					
X2	0.000	0.000	0.000				
X1	0.000	0.000	0.000	0.000			
Y1	0.684	0.000	0.000	0.000	0.000		
Y2	0.169	-0.000	0.000	0.000	0.014	0.006	
Y3	2.457	0.898	0.392	0.731	0.006	0.009	0.007

Total Effects

	X4	X3	X2	X1	Y1	Y2
Y1	0.000	0.360	0.184	0.495	0.000	0.000
Y2	0.013	0.632	0.105	0.139	0.208	0.000
Y3	0.007	0.453	0.124	0.262	0.492	0.495

Standardized Total Effects

	X4	X3	X2	X1	Y1	Y2
Y1	0.000	0.289	0.207	0.395	0.000	0.000
Y2	0.022	0.606	0.142	0.133	0.248	0.000
Y3	0.011	0.428	0.164	0.246	0.579	0.488

Direct Effects

	X4	X3	X2	X1	Y1	Y2
Y1	0.000	0.360	0.184	0.495	0.000	0.000
Y2	0.013	0.557	0.067	0.037	0.208	0.000
Y3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.389	0.495

Standardized Direct Effects

	X4	X3	X2	X1	Y1	Y2
Y1	0.000	0.289	0.207	0.395	0.000	0.000
Y2	0.022	0.606	0.142	0.133	0.248	0.000
Y3	0.000	0.428	0.164	0.246	0.458	0.488

Indirect Effects

	X4	X3	X2	X1	Y1	Y2
Y1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Y2	0.000	0.075	0.038	0.103	0.000	0.000
Y3	0.007	0.453	0.124	0.262	0.103	0.000

Standardized Indirect Effects

	X4	X3	X2	X1	Y1	Y2
Y1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Y2	0.000	0.072	0.051	0.098	0.000	0.000
Y3	0.011	0.428	0.164	0.246	0.121	0.000

Modification Indices

Covariances:

	M.I.	Par Change
Z3 <---> X4	12.844	0.066

Variances:

	M.I.	Par Change

Regression Weights:

	M.I.	Par Change
Y3 <---- X4	16.566	0.133

Summary of models

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	23	31.354	5	0.000	6.271
Saturated model	28	0.000	0		
Independence model	7	379.193	21	0.000	18.057

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	0.022	0.933	0.623	0.167
Saturated model	0.000	1.000		
Independence model	0.139	0.384	0.179	0.288

Model	DELTA1 NFI	RHO1 RFI	DELTA2 IFI	RHO2 TLI	CFI
Default model	0.917	0.653	0.930	0.691	0.928
Saturated model	1.000		1.000		1.000
Independence model	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Model	PRATIO	PNFI	PCFI

Model	NCP	LO 90	HI 90
Default model	0.238	0.218	0.221
Saturated model	0.000	0.000	0.000
Independence model	1.000	0.000	0.000

Model	NCP	LO 90	HI 90
Default model	26.354	12.281	47.916
Saturated model	0.000	0.000	0.000
Independence model	358.193	298.697	425.122

Model	FMIN	F0	LO 90	HI 90
Default model	0.310	0.261	0.122	0.474
Saturated model	0.000	0.000	0.000	0.000
Independence model	3.754	3.546	2.957	4.209

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	0.228	0.156	0.308	0.000
Independence model	0.411	0.375	0.448	0.000

Model	AIC	BCC	BIC	CAIC
Default model	77.354	81.311	182.484	160.728
Saturated model	56.000	60.817	183.985	157.499
Independence model	393.193	394.397	425.189	418.567

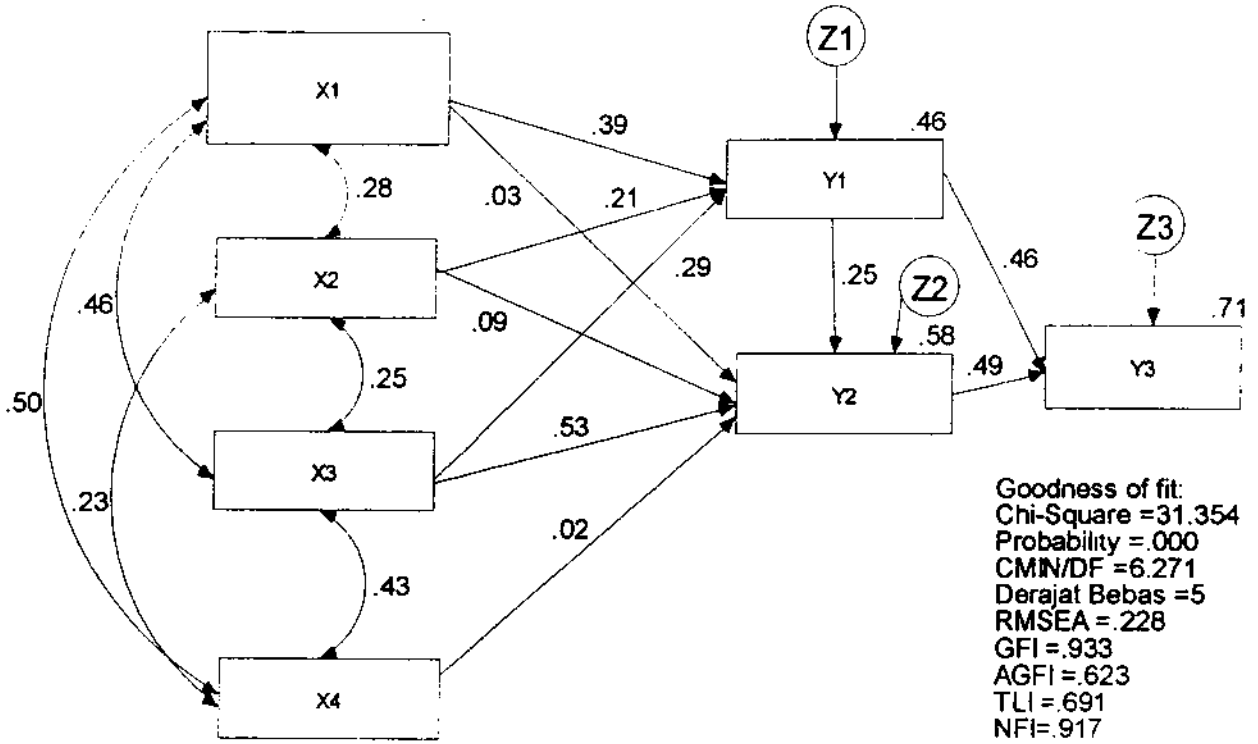
Model	ECVI	LO 90	HI 90	MECVI
Default model	0.766	0.627	0.979	0.805
Saturated model	0.554	0.554	0.554	0.602
Independence model	3.893	3.304	4.556	3.905

Model	HOELTER .05	HOELTER .01
Default model	36	49
Independence model	9	11

Execution time summary:

Minimization: 0.020  
 Miscellaneous: 0.090  
 Bootstrap: 0.000  
 Total: 0.110

**Model Penerimaan Implementasi SAP di SKPD Pemprov Jawa Timur**  
**Standardized estimates**



Goodness of fit:  
 Chi-Square = 31.354  
 Probability = .000  
 CMIN/DF = 6.271  
 Derajat Bebas = 5  
 RMSEA = .228  
 GFI = .933  
 AGFI = .623  
 TLI = .691  
 NFI = .917

Lampiran 7: Output AMOS Model Modifikasi

SAF-IRA2  
Monday, January 12, 2009 07:55:34

Amos  
by James L. Arbuckle

Version 4.01

Copyright 1994-1999 SmallWaters Corporation  
1507 E. 53rd Street - #452  
Chicago, IL 60615 USA  
773-667-8635  
Fax: 773-955-6252  
<http://www.smallwaters.com>

\*\*\*\*\*

Title

Sap-ira2: Monday, January 12, 2009 07:55 PM

Your model contains the following variables

Y1	observed	endogenous
Y2	observed	endogenous
Y3	observed	endogenous

X1	observed	exogenous
X2	observed	exogenous
X3	observed	exogenous
X4	observed	exogenous
Z1	unobserved	exogenous
Z3	unobserved	exogenous
Z2	unobserved	exogenous

Number of variables in your model: 10  
 Number of observed variables: 7  
 Number of unobserved variables: 3  
 Number of exogenous variables: 7  
 Number of endogenous variables: 3

Summary of Parameters

	Weights	Covariances	Variances	Means	Intercepts	Total
Fixed:	3	0	0	0	0	3
Labeled:	0	0	0	0	0	0
Unlabeled:	11	6	7	0	0	24
Total:	14	6	7	0	0	27

NOTE:

The model is recursive.

Assessment of normality

	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
X4	2.000	5.000	-0.434	-1.790	-0.298	-0.613
X3	3.000	5.000	0.088	0.364	-0.433	-0.893
X2	2.000	5.000	-0.260	-1.074	-0.295	-0.608
X1	2.530	4.880	-0.469	-1.935	0.003	0.006
Y1	2.500	5.000	-0.125	-0.515	-0.744	-1.533
Y2	2.670	5.000	0.034	0.140	-0.472	-0.973
Y3	2.440	4.780	-0.343	-1.412	-0.305	-0.629
Multivariate					4.197	1.788

Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance)

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
16	24.462	0.001	0.092
40	19.248	0.007	0.176

75	17.927	0.012	0.132
42	16.519	0.021	0.163
35	16.062	0.025	0.107
65	15.691	0.028	0.068
45	14.186	0.048	0.218
8	13.604	0.059	0.250
29	13.131	0.069	0.271
6	13.099	0.070	0.174
7	12.951	0.073	0.128
97	12.205	0.094	0.250
21	12.119	0.097	0.185
50	11.945	0.102	0.158
67	11.720	0.110	0.151
57	11.322	0.125	0.203
49	10.348	0.170	0.573
101	10.344	0.170	0.471
47	10.338	0.170	0.372
15	9.985	0.189	0.471
4	9.462	0.221	0.682
37	9.390	0.226	0.635
66	9.378	0.227	0.550
85	9.332	0.230	0.485
10	9.138	0.243	0.517
89	9.138	0.243	0.426
55	9.120	0.244	0.350
78	8.857	0.263	0.434
68	8.855	0.263	0.350
88	8.738	0.272	0.343
30	8.594	0.283	0.356
56	8.440	0.295	0.378
46	8.358	0.302	0.353
98	8.198	0.315	0.384
38	8.058	0.327	0.404
33	8.033	0.330	0.343
39	8.032	0.330	0.271
18	7.900	0.341	0.286
32	7.824	0.348	0.267
95	7.813	0.349	0.210
86	7.631	0.366	0.257
20	7.624	0.367	0.200
11	7.592	0.370	0.164
60	7.458	0.383	0.182
96	7.354	0.393	0.185
31	7.304	0.398	0.160
9	7.256	0.403	0.137
93	6.789	0.451	0.383
91	6.768	0.453	0.326
92	6.686	0.462	0.320
51	6.678	0.463	0.258
74	6.250	0.511	0.548
19	6.161	0.521	0.552
87	5.935	0.547	0.679
73	5.764	0.569	0.752
5	5.477	0.602	0.883
22	5.358	0.616	0.902
69	5.286	0.625	0.899

25	5.130	0.644	0.930
36	5.095	0.648	0.914
58	4.989	0.661	0.926
54	4.986	0.662	0.894
17	4.929	0.669	0.884
62	4.845	0.679	0.888
41	4.690	0.698	0.923
102	4.661	0.701	0.902
81	4.448	0.727	0.953
3	4.404	0.732	0.943
14	4.318	0.743	0.947
84	4.216	0.755	0.954
24	4.193	0.757	0.937
43	4.140	0.764	0.929
99	4.125	0.765	0.901
23	3.935	0.787	0.947
26	3.927	0.788	0.920
44	3.692	0.815	0.969
13	3.591	0.825	0.974
12	3.530	0.832	0.970
70	3.501	0.835	0.958
100	3.356	0.850	0.973
83	3.341	0.852	0.957
2	3.218	0.864	0.967
90	3.187	0.867	0.953
53	3.162	0.870	0.932
63	3.161	0.870	0.890
82	3.152	0.871	0.836
28	3.068	0.879	0.829
61	2.858	0.898	0.904
79	2.724	0.909	0.923
72	2.586	0.920	0.939
94	2.489	0.928	0.936
64	2.455	0.930	0.902
1	2.037	0.958	0.989
71	1.930	0.964	0.988
48	1.813	0.969	0.987
80	1.800	0.970	0.966
27	1.632	0.977	0.971
77	1.471	0.983	0.971
34	1.276	0.989	0.974
76	1.119	0.993	0.960

Sample size: 102

Sample Covariances

	X4	X3	X2	X1	Y1	Y2	Y3
X4	0.676						
X3	0.166	0.225					



X2	0.126	0.079	0.442				
X1	0.194	0.103	0.088	0.222			
Y1	0.214	0.146	0.153	0.163	0.349		
Y2	0.162	0.167	0.111	0.108	0.173	0.245	
Y3	0.253	0.164	0.128	0.136	0.221	0.189	0.252

Eigenvalues of Sample Covariances

4.182e-002    6.615e-002    1.084e-001    1.568e-001    2.938e-001    4.070e-001  
 1.337e+000

Condition number of Sample Covariances = 3.196554e+001

Sample Correlations

	X4	X3	X2	X1	Y1	Y2	Y3
X4	1.000						
X3	0.427	1.000					
X2	0.230	0.251	1.000				
X1	0.502	0.460	0.282	1.000			
Y1	0.442	0.522	0.391	0.586	1.000		
Y2	0.398	0.711	0.336	0.462	0.592	1.000	
Y3	0.613	0.690	0.384	0.575	0.747	0.759	1.000

Eigenvalues of Sample Correlations

1.560e-001    2.747e-001    4.092e-001    5.367e-001    7.346e-001    8.355e-001  
 4.053e+000

Condition number of Sample Correlations = 2.598034e+001

Determinant of sample covariance matrix = 7.5128e+001

Model: Default model

Computation of degrees of freedom

Number of distinct sample moments: 28  
 Number of distinct parameters to be estimated: 24  
 -----  
 Degrees of freedom: 4

0e	3	0.0e+000	-2.2961e-001	1.00e+004	2.79880277969e+002	0	1.00e-004
1e	0	1.7e+002	0.0000e-000	1.02e+000	6.77617303287e+001	18	9.34e-001
2e	0	3.1e+001	0.0000e-000	1.66e-001	4.98677136807e+001	8	0.00e-000
3e	0	1.4e+001	0.0000e+000	3.78e-001	2.34674616768e+001	3	0.00e-000
4e	0	3.3e+001	0.0000e+000	3.19e-001	1.00627883278e+001	1	9.99e-001
5e	0	4.5e+001	0.0000e+000	2.19e-001	7.53560915475e+000	1	1.13e-001
6e	0	5.4e+001	0.0000e-000	1.87e-002	7.38657793173e+000	1	1.76e-000

7e 0 5.6e+001 0.0000e+000 8.34e-003 7.38529024135e+000 1 1.01e+000  
 8e 0 5.6e+001 0.0000e+000 8.42e-005 7.38529011326e+000 1 1.00e+000

Minimum was achieved

Chi-square = 7.385  
 Degrees of freedom = 4  
 Probability level = 0.117

Maximum Likelihood Estimates  
 -----

Regression Weights:	Estimate	S.E.	C.R.	Label
Y1 <---- X1	0.495	0.105	4.714	
Y1 <---- X2	0.184	0.068	2.697	
Y1 <---- X3	0.360	0.103	3.479	
Y2 <---- X2	0.067	0.052	1.282	
Y2 <---- X3	0.557	0.083	6.700	
Y2 <---- Y1	0.208	0.074	2.825	
Y2 <---- X4	0.013	0.046	0.289	
Y2 <---- X1	0.037	0.091	0.401	
Y3 <---- Y1	0.314	0.051	6.164	
Y3 <---- Y2	0.435	0.061	7.131	
Y3 <---- X4	0.171	0.032	5.357	

Standardized Regression Weights:	Estimate
Y1 <---- X1	0.395
Y1 <---- X2	0.207
Y1 <---- X3	0.289
Y2 <---- X2	0.090
Y2 <---- X3	0.534
Y2 <---- Y1	0.248
Y2 <---- X4	0.022
Y2 <---- X1	0.035
Y3 <---- Y1	0.373
Y3 <---- Y2	0.433
Y3 <---- X4	0.283

Covariances:	Estimate	S.E.	C.R.	Label
X1 <----> X2	0.088	0.032	2.724	
X2 <----> X4	0.125	0.056	2.248	
X1 <----> X4	0.194	0.043	4.510	

X2 <----> X3	0.079	0.032	2.446
X3 <----> X4	0.166	0.042	3.946
X1 <----> X3	0.103	0.024	4.203

Correlations:

	Estimate
X1 <----> X2	0.282
X2 <----> X4	0.230
X1 <----> X4	0.502
X2 <----> X3	0.251
X3 <----> X4	0.427
X1 <----> X3	0.460

Variances:

	Estimate	S.E.	C.R.	Label
X1	0.222	0.031	7.106	
X2	0.442	0.062	7.106	
X3	0.225	0.032	7.106	
X4	0.676	0.095	7.106	
Z1	0.187	0.026	7.106	
Z2	0.102	0.014	7.106	
Z3	0.057	0.008	7.106	

Squared Multiple Correlations:

	Estimate
Y1	0.463
Y2	0.581
Y3	0.768

Implied (for all variables) Covariances

	X4	X3	X2	X1	Y1	Y2	Y3
X4	0.676						
X3	0.166	0.225					
X2	0.126	0.079	0.442				
X1	0.194	0.103	0.088	0.222			
Y1	0.179	0.146	0.153	0.163	0.349		
Y2	0.155	0.167	0.111	0.108	0.173	0.245	
Y3	0.239	0.147	0.118	0.131	0.215	0.187	0.247

Implied (for all variables) Correlations

	X4	X3	X2	X1	Y1	Y2	Y3
X4	1.000						
X3	0.427	1.000					

X2	0.230	0.251	1.000				
X1	0.502	0.460	0.282	1.000			
Y1	0.369	0.522	0.391	0.586	1.000		
Y2	0.380	0.712	0.336	0.463	0.591	1.000	
Y3	0.585	0.624	0.356	0.561	0.733	0.761	1.000

Implied Covariances

	X4	X3	X2	X1	Y1	Y2	Y3
X4	0.676						
X3	0.166	0.225					
X2	0.126	0.079	0.442				
X1	0.194	0.103	0.088	0.222			
Y1	0.179	0.146	0.153	0.163	0.349		
Y2	0.155	0.167	0.111	0.108	0.173	0.245	
Y3	0.239	0.147	0.118	0.131	0.215	0.187	0.247

Implied Correlations

	X4	X3	X2	X1	Y1	Y2	Y3
X4	1.000						
X3	0.427	1.000					
X2	0.230	0.251	1.000				
X1	0.502	0.460	0.282	1.000			
Y1	0.369	0.522	0.391	0.586	1.000		
Y2	0.380	0.712	0.336	0.463	0.591	1.000	
Y3	0.585	0.624	0.356	0.561	0.733	0.761	1.000

Residual Covariances

	X4	X3	X2	X1	Y1	Y2	Y3
X4	0.0000						
X3	0.0000	0.0000					
X2	0.0000	0.0000	0.0000				
X1	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
Y1	0.0353	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
Y2	0.0073	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	0.0002	
Y3	0.0142	0.0172	0.0105	0.0047	0.0062	0.0015	0.0050

Standardized Residual Covariances

	X4	X3	X2	X1	Y1	Y2	Y3
X4	0.000						
X3	0.000	0.000					
X2	0.000	0.000	0.000				
X1	0.000	0.000	0.000	0.000			

0.684	0.000	0.000	0.000	0.000		
0.169	0.000	0.000	0.000	0.014	0.006	
0.302	0.623	0.300	0.175	0.172	0.048	0.145

al Effects

X4	X3	X2	X1	Y1	Y2
0.000	0.360	0.184	0.495	0.000	0.000
0.013	0.632	0.105	0.139	0.208	0.000
0.177	0.388	0.104	0.216	0.404	0.435

andardized Total Effects

X4	X3	X2	X1	Y1	Y2
0.000	0.289	0.207	0.395	0.000	0.000
0.022	0.606	0.142	0.133	0.248	0.000
0.292	0.370	0.139	0.205	0.480	0.433

ect Effects

X4	X3	X2	X1	Y1	Y2
0.000	0.360	0.184	0.495	0.000	0.000
0.013	0.557	0.067	0.037	0.208	0.000
0.171	0.000	0.000	0.000	0.314	0.435

andardized Direct Effects

X4	X3	X2	X1	Y1	Y2
0.000	0.289	0.207	0.395	0.000	0.000
0.022	0.534	0.090	0.035	0.248	0.000
0.283	0.000	0.000	0.000	0.373	0.433

irect Effects

X4	X3	X2	X1	Y1	Y2
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.075	0.038	0.103	0.000	0.000
0.006	0.388	0.104	0.216	0.090	0.000

uardized Indirect Effects

	X4	X3	X2	X1	Y1	Y2
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.072	0.051	0.098	0.000	0.000
3	0.010	0.370	0.139	0.205	0.108	0.000

Modification Indices

Covariances:

M.I.	Par Change
-----	-----

Variances:

M.I.	Par Change
-----	-----

Regression Weights:

M.I.	Par Change
-----	-----

Summary of models

Model	NPAR	CMIN	DF	F	CMIN/DF
Default model	24	7.385	4	0.117	1.846
Saturated model	28	0.000	0		
Independence model	7	379.193	21	0.000	18.057

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	0.008	0.980	0.857	0.140
Saturated model	0.000	1.000		
Independence model	0.139	0.384	0.179	0.288

Model	DELTA1 NFI	RHO1 RFI	DELTA2 IFI	RHO2 TLI	CFI
Default model	0.981	0.898	0.991	0.950	0.991
Saturated model	1.000		1.000		1.000
Independence model	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Model	PRATIO	PNFI	PCFI
Default model	0.190	0.187	0.189
Saturated model	0.000	0.000	0.000
Independence model	1.000	0.000	0.000

Model	NCP	LO 90	HI 90
Default model	3.385	0.000	15.176
Saturated model	0.000	0.000	0.000
Independence model	358.193	299.697	425.122

Model	FMIN	F0	LO 90	HI 90
Default model	0.073	0.034	0.000	0.150
Saturated model	0.000	0.000	0.000	0.000
Independence model	3.754	3.546	2.957	4.209

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	0.092	0.000	0.194	0.206
Independence model	0.411	0.375	0.448	0.000

Model	AIC	BCC	BIC	CAIC
Default model	55.385	59.514	165.086	142.385
Saturated model	56.000	60.817	183.985	157.499
Independence model	393.193	394.397	425.189	418.567

Model	ECVI	LO 90	HI 90	MECVI
Default model	0.548	0.515	0.665	0.589
Saturated model	0.554	0.554	0.554	0.602
Independence model	3.893	3.304	4.556	3.905

Model	HOELTER .05	HOELTER .01
Default model	130	182
Independence model	9	11

Execution time summary:

Minimization: 0.031  
 Miscellaneous: 0.070  
 Bootstrap: 0.000  
 Total: 0.101

**Model Penerimaan Implementasi SAP di SKPD Pemprov Jawa Timur (Model Modifikasi)**  
**Standardized estimates**

